BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 bahwa luas wilayah daratan dengan luas wilayah daratan mencapai 65.526,72 Km^2 atau 6.552.672 Ha. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS		KETERANGAN
		(Ha)	%	
I	Kawasan Lindung	2.329.745	35,55	
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam	656.270*	10,00	* Termasuk DPCLS seluas 5.510Ha. Dalam Proses Persetujuan DPRRI
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam Air	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21,00	*Termasuk DPCLS seluas 9.802Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
I	Kawasan Budi daya Hutan	2.078.858	31,73	
	Hutan Produksi Tetap(HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,30	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
III.	Areal Penggunaan Lain(APL)	2.083.765	32,00	
	APL	2.083.765	32,00	
IV.	Perairan (Danau dan Sungai)	60.304	0,92	
	Jumlah III& IV	2.144.069	32,72	
	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)	6.552.672	100,00	

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033

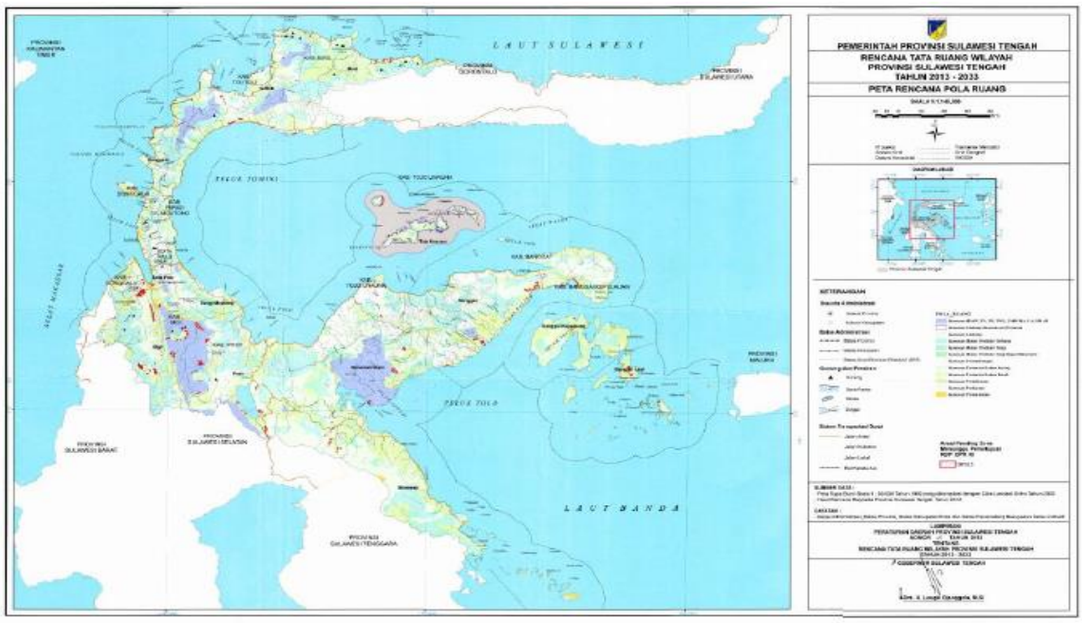
Sementara menurut sumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah (2021), luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yakni 61.841,29 Km2, secara rinci diperlihatkan Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten

No.	Kabupaten	Ibukota	Ketinggian Tempat (mpdl)	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
1.	Banggai Kepulauan	Salakan	104	2.488,79	4,02
2.	Banggai	Luwuk	125	9.672,70	15,64
3.	Morowali	Bungku	3	3.037,04	4,91
4.	Poso	Poso Kota	18	7.112,25	11,50
5.	Donggala	Banawa	35	4.275,08	6,91
6.	Tolitoli	Baolan	8	4.079,77	6,60
7.	Buol	Biau	63	4.043,57	6,54
8.	Parigi Moutong	Parigi	29	5.089,91	8,23
9.	Tojo Una-Una	Ampana	117	5.721,15	9,25
10.	Sigi	Bora	183	5.196,02	8,40
11.	Banggai Laut	Banggai	24	725,67	1,17
12.	Morowali Utara	Kolonodale	50	10.004,28	16,18
13.	Palu	Palu	64	395,06	0,64
Jumlah				**61.841,29**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021.

Selanjutnya pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini.



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033

Gambar 2.1
Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 193.923,75 Km^2 dengan jumlah pulau sebanyak 1.140 pulau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Secara administrasi, hingga saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten

Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang terdiri dari 176 Kecamatan, dan 2.020 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.3
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan
Di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut kabupaten/Kota
Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1.	PALU	8	46
2.	SIGI	16	177
3.	DONGGALA	16	167
4.	PARIGI MOUTONG	23	283
5.	POSO	19	170
6.	TOJO UNA-UNA	12	146
7.	BANGGAI	23	337
8.	BANGGAI KEPULAUAN	12	144
9.	BANGGAI LAUT	7	66
10.	MOROWALI	9	133
11.	MOROWALI UTARA	10	126
12.	BUOL	11	115
13.	TOLITOLI	10	110
	JUMLAH SULTENG	**176**	**2.020**

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2022.

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara $2^{0}22'$ Lintang Utara dan $3^{0}48'$ Lintang Selatan serta $119^{0}22'$ dan $124^{0}22'$ Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah Wilayah Nusantara dan di tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.

2.1.1.1.3 Topografi

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 - 3 derajat sekitar 11,8 persen;
- Kemiringan 3 - 15 derajat sekitar 8,9 persen;
- Kemiringan 15 - 40 derajat sekitar 19,9 persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9 persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m – 100 m = 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m – 500 m = 27,2 persen;
- Ketinggian 501 m – 1.000 m = 26,7 persen; dan
- Ketinggian 1.001 m ke atas = 25,9 persen.

2.1.1.1.4 Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

2.1.1.1.5 Hidrologi

Di sepanjang wilayah Sulawesi Tengah terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di sejumlah wilayah kabupaten/kota (Tabel 2.5). Selain daerah aliran sungai juga terdapat beberapa danau yang hampir seluruhnya berada di kawasan lindung. Danau dan sumber daya sungai tersebut dimanfaatkan untuk pertanian, energi listrik dan kebutuhan rumah tangga. Luas kecamatan dan rencana pengembangan sistem jaringan pengolahan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi di Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Luas Kecamatan pada dalam Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi di Sulawesi Tengah

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
A.	**Provinsi Sulawesi Tengah**			
1	Kabupaten Donggala	Balaesang	169,18	1,16
		Balaesang Tanjung	189,49	1,3
		Banawa	100,32	0,69
		Banawa Selatan	313,93	2,15
		Banawa Tengah	79,95	0,55
		Labuan	169,18	1,16
		Pinembani	447,77	3,07
		Rio Pakawa	881,47	6,05
		Sindue	138,67	0,95
		Sindue Tobata	260,59	1,79
		Sirenja	183,2	1,26
		Tanantovea	245,02	1,68
		Sindue	201,97	1,39

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
		Tombusabora		
		Total Luas	**3.380,73**	**23,21**
2	Kota Palu	Mantikulore	201,43	1,38
		Palu Barat	22,99	0,16
		Palu Utara	37,01	0,25
		Tawaeli	53,02	0,36
		Ulujadi	53,22	0,37
		Palu Selatan	29,06	0,2
		Palu Timur	10,76	0,07
		Tatanga	14,18	0,1
		Total Luas	**421,68**	**2,89**
3	Kabupaten Sigi	Dolo	40,84	0,28
		Dolo Barat	128,29	0,88
		Dolo Selatan	397,31	2,73
		Kinovaro	34,19	0,23
		Kulawi	1.139,97	7,82
		Kulawi Selatan	406,9	2,79
		Lindu	576,9	3,96
		Marawola	40,9	0,28
		Marawola Barat	157,31	1,08
		Nokilalaki	80,37	0,55
		Palolo	592,18	4,06
		Pipikoro	991,72	6,81
		Sigi Biromaru	324,29	2,23
		Sumbasa	162,43	1,11
		Tanam Bulava	57,73	0,4
		Total Luas	**5.131,34**	**35,22**
4	Kabupaten Poso	Lore Barat	322,08	2,21
		Lore Peore	577,26	3,96
		Lore Selatan	483,08	3,32
		Lore Tengah	696,04	4,78
		Lore Timur	149,75	1,03
		Lore Utara	333,3	2,29
		Total Luas	**2.561,50**	**17,58**

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Palu Lariang tersaji pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Pembagian DAS di WS Palu Lariang

Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km2)	Persentase DAS Dalam WS (%)	Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km2)	Persentase DAS Dalam WS (%)
1	Lariang	7.264,97	49,87	27	Watutela	30,18	0,21
2	Minti	326,28	2,24	28	Watutailo	15,28	0,1
3	Sulung	970,3	6,66	29	Biulunion gga	30,05	0,21
4	Pangian	140,39	0,96	30	Taipa	88,29	0,61
5	Sawi	52,97	0,36	31	Tabeo	16,07	0,11
6	Randomayang	94,52	0,65	32	Taweli	104,27	0,72
7	Kasuloang	138,76	0,95	33	Lambagu	92,54	0,64
8	Bambaira	6,49	0,04	34	Labuan	158,67	1,09
9	Tampaore	16,45	0,11	35	Toaya	77,41	0,53
10	Kumboki	26,6	0,18	36	Masaengi	93,66	0,64
11	Surumana	304,08	2,09	37	Tibo	143,97	0,99
12	Bambalalombi	35,39	0,24	38	Batusuya	93,49	0,64
13	Mamara	119,86	0,82	39	Aliandu	110,49	0,76
14	Tolongano	12,86	0,09	40	Loro	29,48	0,2
15	Kangando	17,68	0,12	41	Sinapa	4,79	0,03
16	Towale	37,93	0,26	42	Sikara	6,23	0,04
17	Tomaku	10,74	0,07	43	Omba	20,77	0,14
18	Donggala	56,3	0,39	44	Tondo	26,18	0,18
19	Uwemole	6,03	0,04	45	Lente	105,83	0,73
20	Lottu	3,8	0,03	46	Tompo	95,86	0,66
21	Nggoji	19,19	0,13	47	Lende	30,01	0,21
22	Watusampu	20,64	0,14	48	Airmakuni	96,52	0,66
23	Buluri	37,17	0,26	49	Kusu	46,96	0,32
24	Owenumpu	22,86	0,16	50	Kamonji	46,32	0,32
25	Palu	3.063,96	21,03	51	Tompe	50,08	0,34
26	Lepata	77,5	0,53	52	Maruri	71,65	0,49

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :4/PRT/M/2015

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa DAS Palu Lariang memiliki sejumlah beberapa sub DAS yang cukup besar dan memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan pertanian, industri dan rumah tangga. Jika

ditinjau dari wilayah sungai strategis nasional yang terdapat di Sulawesi Tengah, terdapat beberapa wilayah sungai strategis sebagaimana terlihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Wilayah Sungai Strategis Nasional Di Provinsi Sulawesi Tengah (WS Parigi – Poso)

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km2)	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
A.	**Provinsi Sulawesi Tengah**				
1.	Kabupaten Morowali Utara	Mori Atas	768,89	13,02	1,7
		Mori Utara	699,82	140,94	20,1
		Soyo Jaya	1.221,09	39,51	3,2
Sub Total Kabupaten Morowali Utara				**193,47**	**2,25**
2.	Kabupaten Parigi Moutong	Ampibabo	279,61	279,61	100
		Balinggi	119,64	119,64	100
		Kasimbar	271,56	194,76	71,7
		Parigi	104,65	104,65	100
		Parigi Barat	78,72	78,72	100
		Parigi Selatan	439,97	356,92	81,1
		Parigi Tengah	64,41	64,41	100
		Parigi Utara	29,65	29,65	100
		Sausu	291,61	291,61	100
		Sinju	111,94	111,94	100
		Toribulu	97,57	97,51	99,9
		Torue	575,29	399,35	69,4
Kabupaten Parigi Moutong			**Sub Total**	**2.128,77**	**24,72**
		Danau Poso	366,95	366,95	100
		Lage	411,13	411,13	100
		Lore Piore	506,89	42,7	8,4
		Lore Selatan	510,77	80,8	15,8
		Lore Tengah	594,25	29,26	4,9
		Lore Utara	484,69	31,96	6,6
		Pamona Barat	227,55	227,55	100
		Pamona Pusalemba	486,81	486,81	100
		Pamona Selatan	381,89	312,06	81,7

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km2)	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
3.	Kabupaten Poso	Pamona Tenggara	312,08	184,64	59,2
		Pamona Timur	713,97	166,78	23,4
		Pamona Utara	685,47	598,76	87,3
		Poso Kota	35,95	35,95	100
		Poso Kota Selatan	41,42	41,42	100
		Poso Kota Utara	37,68	37,68	100
		Poso Pesisir	334,64	252,97	75,6
		Poso Pesisir Selatan	430,92	418	97
		Poso Pesisir Utara	555,24	470,02	84,7
Sub Total Kabupaten Poso				**4.195,44**	**48,72**
4.	Kabupaten Tojo Una-Una	Tojo	422,81	422,81	100
		Tojo Timur	1.318,41	1.255,53	95,2
		Ulu Bongka	1.538,42	17,82	1,2
Sub Total Kabupaten Tojo Una-Una				**1.696,16**	**19,7**
Total Luas WS Parigi Poso				**8.610,57**	

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Secara rinci pembagian DAS di WS Parigi Poso disajikan pada tabelberikut:

Tabel 2.7
Pembagian DAS di WS Parigi Poso

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km^2)	Persentase DAS Dalam WS (%)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Km^2)	Persentase DAS Dalam WS (%)
1	Tompis	118,04	1,37	26	Tiwa'a	31,13	0,36
2	Kasimbar	104,87	1,22	27	Masani	38,61	0,45
3	Toribulu	154,46	1,79	28	Lape	26,95	0,31
4	Tapoya	223,74	2,60	29	Puna	778,30	9,04
5	Silangga	68,40	0,79	30	Mapane	59,42	0,69
6	Marantale	41,50	0,48	31	Poso	2.674,85	31,07
7	Salumbia	31,80	0,37	32	Tongko	297,21	3,45

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km^2)	Persentase DAS Dalam WS (%)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Km^2)	Persentase DAS Dalam WS (%)
8	Toboli	29,55	0,34	33	Malei	203,31	2,36
9	Pelawa	50,43	0,59	34	Bambalo	45,24	0,53
10	Baliara	87,93	1,02	35	Toliba	200,26	2,33
11	Olaya	53,09	0,62	36	Tambiano	51,86	0,60
12	Korontua	35,32	0,41	37	Mawomba	64,66	0,75
13	Dolago	175,11	2,03	38	Kabalo	134,46	1,56
14	Tindaki	146,50	1,70	39	Tayawa	81,62	0,95
15	Sampaloe	60,05	0,70	40	Ue Kuli	44,66	0,52
16	Torue	62,60	0,73	41	Betaue	218,53	2,54
17	Tolai	61,26	0,71	42	Ue Dele	17,02	0,20
18	Topeau	54,00	0,63	43	Sandada	43,20	0,50
19	Suli	150,82	1,75	44	Tojo	216,48	2,51
20	Sausu	568,64	6,60	45	Masalongi	245,65	2,85
21	Tambarana	246,52	2,86	46	Pancuma	80,71	0,94
22	Kalora	8,47	0,10	47	Tongku	122,17	1,42
23	Samalera	17,65	0,20	48	Ue Podi	142,77	1,66
24	Kilo	129,64	1,51	49	Padapu	27,83	0,32
25	Kameasi	45,48	0,53	50	Kayunyole	37,76	0,44

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Selanjutnya Wilayah Danau Kawasan Lindung di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Wilayah Danau Kawasan Lindung Di Provinsi Sulawesi Tengah

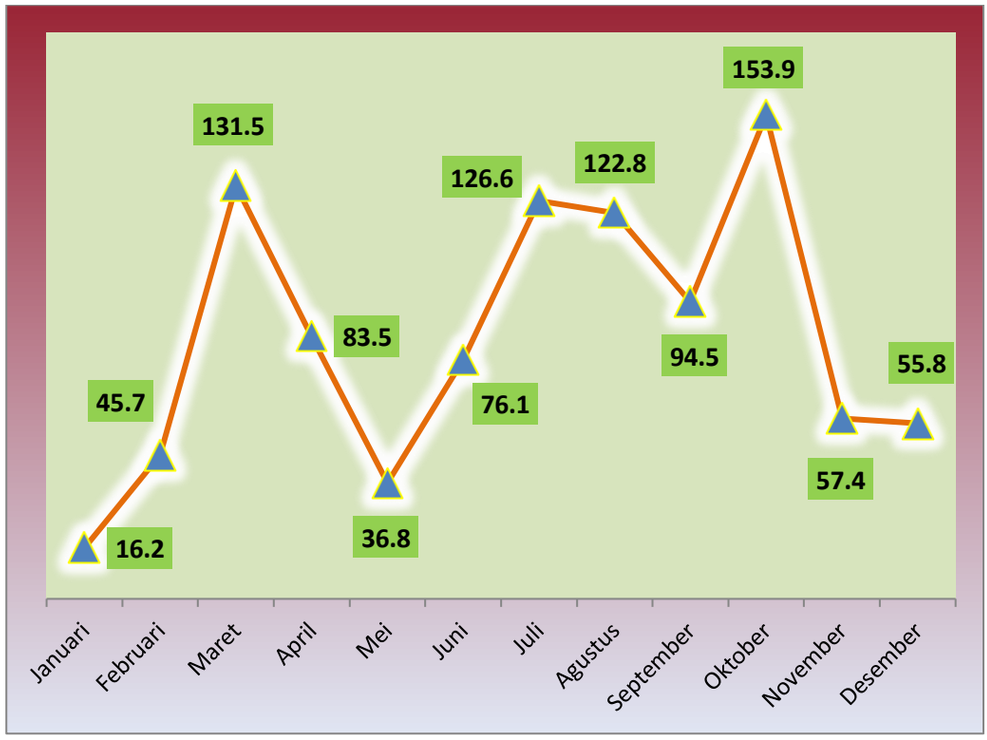
No.	Nama Danau	Kabupaten/Kota	Luas (Km^2)
1	Tatawu	Donggala	0,625
2	Padang	Donggala	0,02875
3	Kalimpaa	Donggala	0,055
4	Wanga	Poso	0,245
5	Dampelas	Donggala	4,9375
6	Rano	Donggala	2,50
7	Lindu	Sigi	33,925
8	Bolano Toga	Parigi Moutong	0,2575

No.	Nama Danau	Kabupaten/Kota	Luas (Km^2)
9	Batu Dako	Parigi Moutong	0,1775
10	Bolanosau	Parigi Moutong	0,9375
11	Dedei	Parigi Moutong	0,2125
12	Laut Kecil	Parigi Moutong	2,4375
13	Bolano Molosifat	Parigi Moutong	0,1250
14	Poso	Poso	369,385
15	Tanah Morambo	Poso	0,0625
16	Limbo Kasimpo	Poso	0,825
17	Telaga Toju	Poso	0,295
18	Tiu	Morowali	1,3125
19	Bae	Morowali	4,125
20	Kodi	Morowali	2,5625
21	Laindungan	Banggai	0,14
22	Petinding	Banggai	0,0325
23	Bakalan	Banggai	0,0625
24	Kobit	Banggai	0,03
25	Lamotong	Banggai	0,02
26	Tendetung	Banggai	1,4375
27	Alan	Banggai	0,09
28	Makapa B	Banggai	0,23

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

2.1.1.1.6 Klimatologi

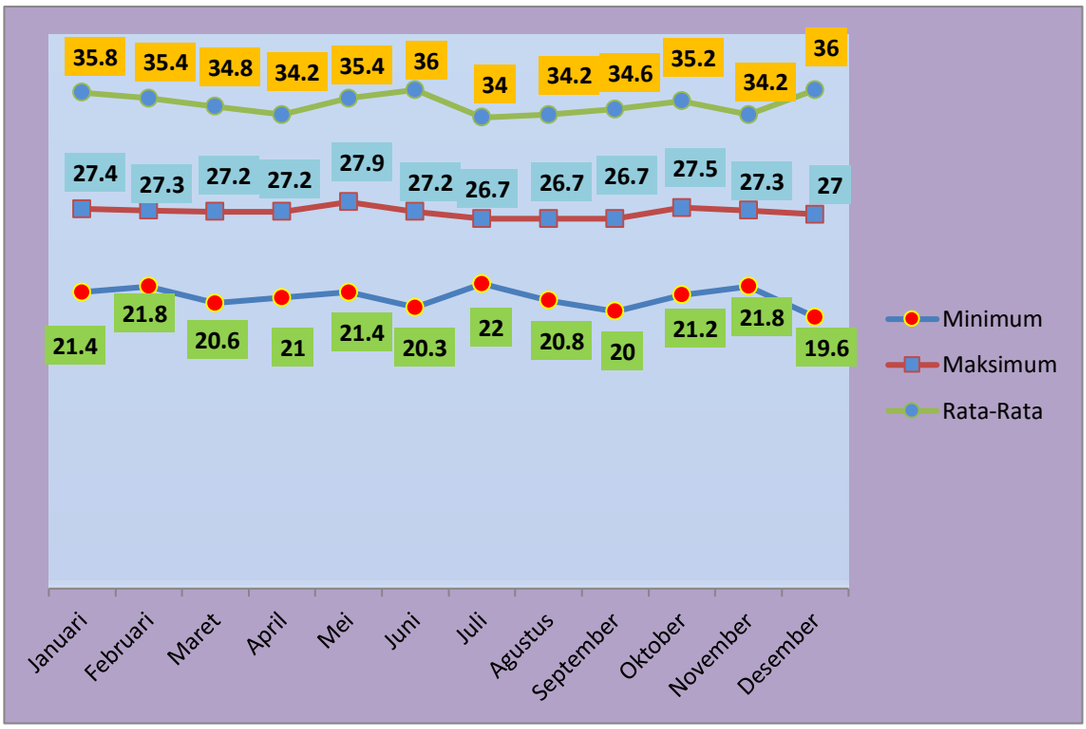
Kota Palu memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Sepanjang Tahun 2021 terjadi musim hujan di Kota Palu, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Oktober yaitu 153,9 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Januari yaitu 16,2 mm.



Sumber: BPS, 2022.

Gambar 2.2
Kondisi Curah Hujan di Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2021

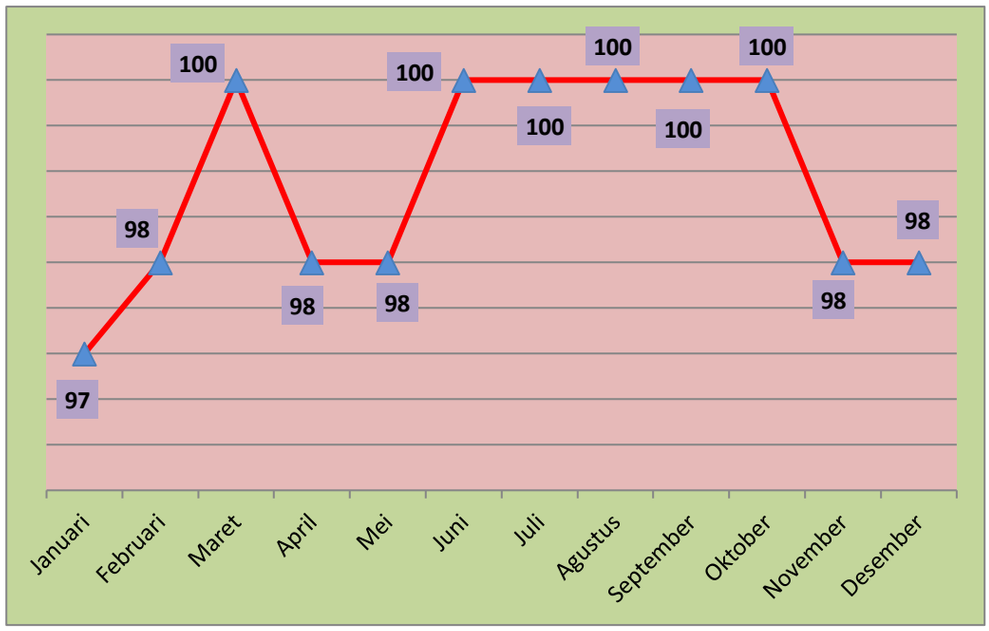
Pada Tahun 2021, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Bulan Juli yaitu 34^{0}C, dan tertinggi yaitu 35,8^{0}C terjadi pada Bulan Januari, sedangkan suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada Bulan Mei yaitu 27,9^{0}C, dan yang terendah pada Bulan Juli, Agustus dan bulan September yaitu 26,7^{0}C. Sementara suhu udara minimum yang tertinggi terjadi pada bulan Februai dan November yaitu 21,8^{0}C, dan yang terendah pada bulan Desember yaitu 19,6^{0}C.



Sumber: BPS, 2022.

Gambar 2.3
Suhu Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2021

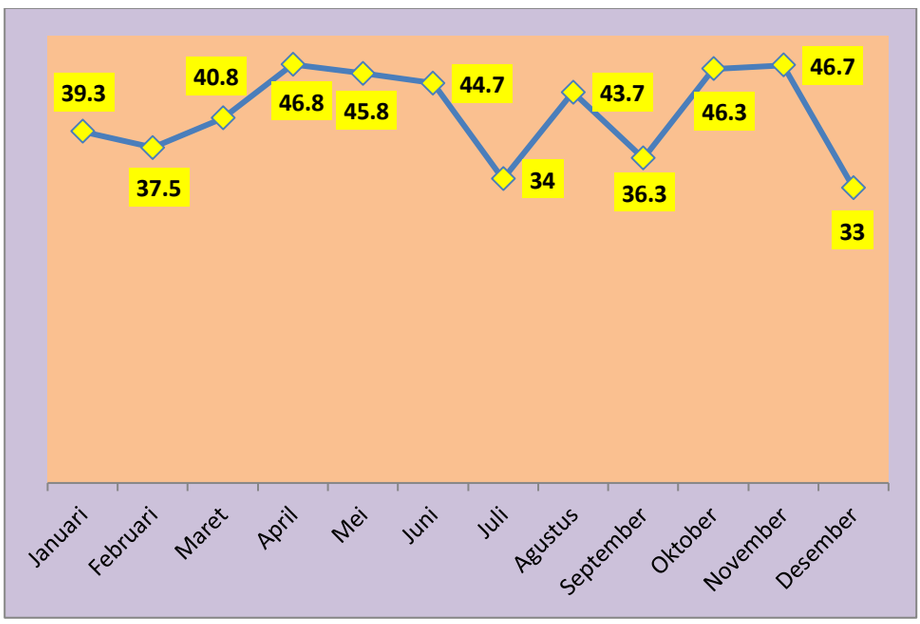
Kelembaban udara rata-rata di Kota Palu selama Tahun 2021 terjadi pada Bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober dengan kelembaban udara tertinggi yaitu 100 persen dan terendah terjadi pada Bulan Januari yaitu 97,00 persen.



Sumber: BPS, 2022.

Gambar 2.4
Kelembaban Udara Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2021 (%)

Intensitas sinar matahari pada Tahun 2021. Rata-rata penyinaran tertinggi terjadi pada Bulan April yaitu mencapai 46,8 persen, sedangkan terendah terjadi pada Bulan Desember yaitu 33 persen.



Sumber: BPS, 2022.

Gambar 2.5
Rata-Rata Intensitas Sinar Matahari di Kota Palu Tahun 2021

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan mahluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (*tangible use*) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (*intangible use*) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumberdaya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033, Luas Kawasan Lindung yaitu 2.329.745 Ha, Kawasan Budidaya Hutan seluas 2.078.858 Ha, Areal Pengguna Lain (APL) seluas 2.083.765 Ha, dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Fungsi Kawasan	Luas		Keterangan
		(Ha)	%	
I.	**Kawasan Lindung**	**2.329.745**	**35,55**	
	Kawasan Konservasi SuakaAlamdan Pelestarian Alam	656.270*	10	* Termasuk DPCLS seluas 5.510 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
	Kawasan Konservasi Suaka Alamdan Pelestarian Alam Air	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21	*Termasuk DPCLS seluas9.802Ha. DalamProses Persetujuan DPR RI

No.	Fungsi Kawasan	Luas		Keterangan
		(Ha)	%	
II.	**Kawasan Budidaya Hutan**	**2.078.858**	**31,73**	
	Hutan Produksi Tetap(HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,3	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
III.	**Areal Penggunaan Lain (APL)**	**2.083.765**	**32**	
	APL	2.083.765	32	
IV.	**Perairan(Danau dan Sungai)**	**60.304**	**0,92**	
	Jumlah III& IV	**2.144.069**	**32,72**	
	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)	**6.552.672**	**100**	

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.2.1 Pertanian

Berdasarkan data RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 luas potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha, sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

Untuk lahan basah; pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman pangan. Lahan basah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

Untuk Lahan Kering; lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Lahan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan seluas 168.250 Ha yang pengelolaannya lebih diarahkan pada pola tanam satu kali seluas 12.630 Ha, tanam dua kali seluas 124.713 Ha, tanam tiga kali seluas 6.132 Ha, tidak tanam padi seluas 3.689 Ha, tidak diusahakan atau bero seluas 21.086 Ha.
- Untuk lahan kering yang terdiri dari tegalan atau kebun seluas 577.490 Ha dan ladang atau huma seluas 241.220 Ha. Selanjutnya total luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 266.552 Ha yang terdiri masing-masing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 119.702 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 146.850 Ha. Ketersediaan lahan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Sawah Lestari.

a. Tanaman Pangan

Jenis pertanian tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 memiliki luas panen 185 626,64 ha, meningkat dibandingkan pada tahun 2020 dengan luas panen 180.509,55 Ha, sedangkan jumlah produktivitas pada tahun 2020 seluas 44,88

ku/ha, tahun 2021 meningkat menjadi 46,69 ku/ha, sementara pada tahun 2020 produksi padi 810.108,26 ku, meningkat dibandingkan pada tahun 2021 produksi padi sebesar 866 668,66 ku, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi1 (ku)	
	2020	2021x	2020	2021x	2020	2021x
1	2	3	4	5	6	7
Banggai Kepulauan	665,64	509,6	45,23	42,17	3 010,66	2 149,16
Banggai	35 825,73	37 558,08	42,12	43,57	150 885,18	163 626,66
Morowali	9 224,84	8 889,56	45,6	51,11	42 068,22	45 434,34
Poso	25 284,09	24 952,20	39,3	43	99 359,51	107 306,23
Donggala	13 720,97	13 376,32	48,29	43,45	66 260,44	58 122,33
Tolitoli	14 910,76	13 588,55	56,04	44,66	83 556,72	60 684,03
Buol	5 019,45	6 354,19	41,57	39,6	20 866,59	25 164,20
Parigi Moutong	47 991,21	54 387,78	45,81	51,92	219 829,78	282 407,04
Tojo Una-Una	1 506,68	1 260,76	44,2	41,78	6 660,20	5 267,84
Sigi	18 556,55	17 568,29	44,81	48,51	83 143,90	85 229,76
Banggai Laut	–	–	–	–	–	–
Morowali Utara	7 727,65	7 017,09	44,17	43,43	34 133,56	30 472,58
Kota Palu	75,98	164,22	43,89	48,99	333,5	804,49
Sulawesi Tengah	**180 509,55**	**185 626,64**	**44,88**	**46,69**	**810 108,26**	**866 668,66**

Sumber : BPS, 2022

Selanjutnya pada tahun 2021 produksi beras mengalami peningkatan yaitu 508 940,91 ton, jika dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2020 yaitu 475.726,51 ton, dapat ditunjukkan pada tebel berikut :

Tabel 2.11
Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah
Tahun 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Produksi Beras (ton)	
	2020	2021[x]
1	2	3
Banggai Kepulauan	1 767,97	1 262,07
Banggai	88 605,55	96 087,81
Morowali	24 704,05	26 680,79
Poso	58 347,70	63 014,31
Donggala	38 910,66	34 131,65
Tolitoli	49 067,70	35 635,98
Buol	12 253,67	14 777,37
Parigi Moutong	129 092,44	165 840,18
Tojo Una-Una	3 911,12	3 093,49
Sigi	48 825,27	50 050,17
Banggai Laut	–	–
Morowali Utara	20 044,53	17 894,66
Kota Palu	195,85	472,43
Sulawesi Tengah	**475 726,51**	**508 940,91**

Sumber : BPS, 2022

Pada tabel tersebut, bahwa produksi beras yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong, pada tahun 2020 sebesar 129.092,44,- ton, atau 27,14 persen, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 165.840,18,- atau 22,16 persen.

Sementara itu daerah irigasi, luas areal sawah potensial 47.640 Ha, sedangkan fungsional sangat menentukan keberhasilan produksi beras. Pada tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Tengah jumlah daerah irigasi sebanyak 30 luas areal sawah fungsional 34.504 Ha, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional Menurut Kabupaten/Kota Kewenangan dan tanggungjawab Provinsi Sulawesi Tengah (Ha) Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional *(ha)*
1	2	3	4
Banggai Kepulauan	-	-	-
Banggai	8	13 316	8 890,51
Morowali	2	3 893	4 484,00
Poso	4	5 628	3 817,00
Donggala	1	1 625	923,22
Tolitoli	3	4 348	2 947,50
Buol	1	1 028	534,15
Parigi Moutong	8	14 923	11 664,53
Tojo Una-Una	-	-	-
Sigi	2	1 669	492,9
Banggai Laut	-	-	-
Morowali Utara	1	1 210	750
Kota Palu	-	-	-
Sulawesi Tengah	**30**	**47 640**	**34 504**

Sumber : BPS, 2022

Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah yang memiliki irigasi yang terbanyak yaitu dengan jumlah 8 irigasi, dan memiliki areal persawahan potensial sebanyak 14.923 Ha, sedangkan areal persawahan fungsional sebanyak 11.664,53 Ha.

Sedangkan jumlah daerah irigasi, luas areal sawah potensial yang menjadi keweangan Pusat 30.564,88 Ha, sedangkan fungsional sangat menentukan keberhasilan produksi beras. Pada tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi keweangan Pusat jumlah daerah irigasi sebanyak 6 luas areal sawah fungsional 20.260,15 Ha, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional Menurut Kabupaten/Kota Kewenangan dan tanggungjawab Pusat (Ha) Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional *(ha)*
1	2	3	4
Banggai Kepulauan	–	–	–
Banggai	3	9 550,47	7 164,99
Morowali	–	–	–
Poso	–	–	–
Donggala	–	–	–
Tolitoli	–	–	–
Buol	–	–	–
Parigi Moutong	2	12 833,76	7 820,16
Tojo Una-Una	–	–	–
Sigi	1	8 180,65	5 275
Banggai Laut	–	–	–
Morowali Utara	–	–	–
Kota Palu	–	–	–
Sulawesi Tengah	**6**	**30.564,88**	**20.260,15**

Sumber : BPS, 2022

b. Hortikultura

Pencapaian produksi pertanian hortikultura bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabe rawit, Kentang, Kubis, Kangkung, Petsai dan tomat masih dipenuhi dari produksi sendiri, dan hanya beberapa komoditi dari daerah lain sebagai tambahan, dapat dilihat pade tabel berikut :

Tabel 2.14
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Jenis Tanaman Provinsi Sulawesi Tengah (Ha) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabe Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Kangkung	Petsai/Sawi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Banggai Kepulauan	19	57	127	-	-	61	-	58	8
Banggai	112	155	707	-	13	237	-	116	58
Morowali	55	82	287	-	-	73	-	94	98
Poso	178	203	351	39	1 670	309	47	183	872
Donggala	84	211	278	7	95	143	-	85	21
Tolitoli	9	71	67	-	-	20	-	44	11
Buol	6	32	433	-	-	32	-	9	5
Parigi Moutong	210	163	785	-	-	247	15	98	40
Tojo Una-Una	27	30	466	-	-	62	-	20	6
Sigi	49	8	152	2	3	105	5	12	49
Banggai Laut	-	1	18	-	-	13	-	21	6
Morowali Utara	1	18	138	-	-	25	-	52	18
Palu	62	19	64	-	-	79	-	46	37
Sulawesi Tengah	810	1 049	3 874	48	1 780	1 405	67	838	1 227

Sumber : BPS, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa areal yang tersedia untuk penanaman kesembilan jenis komoditi tersebut Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 memiliki areal seluas 11.098 Ha, dan yang terluas yaitu 3.874 Ha, untuk areal penanaman cabe rawit, sedangkan areal yang jenis komoditi paling sedikit adalah Kentang yaitu seluas 48 Ha.

2.1.1.2.2 Perkebunan

Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan dengan karakteristik/ lingkungan dengan ketinggian di bawah 2000 m, kelerengan kawasan di bawah 40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

Potensi perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 289.805 Ha, dengan potensi komoditi kelapa seluas 61.999 Ha, kakao 120.085 Ha, cengkeh 33.361 Ha, karet 6.250 Ha, jambu mente 9.815 Ha, pala 11.434 Ha dan sawit rakyat 23.115 Ha.

2.1.1.2.3 Peternakan

Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan potensi areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha.

Adapun jenis ternak yang diusahakan diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

2.1.1.2.4 Perikanan

Potensi perairan laut Sulawesi Tengah seluas 193.923,75 km^2 yang banyak mengandung berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, terbagi dalam 3 (tiga) zona yaitu (1) Selat Makasar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Di Teluk Tolo terdapat 68.000 ton per tahun, Teluk Tomini 78.000 ton per tahun, Selat Makasar dan Laut Sulawesi 68.000 ton per tahun. Dari potensi

ikan lestari tersebut jumlah ikan yang dapat ditangkap sebesar 217.280 ton per tahun.

2.1.1.2.5 Industri

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfataan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam. Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan industri Provinsi Sulawesi Tengah ke depan diarahkan pada pengolahan barang manufaktur dan agroindustri yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu dan industri pengolahan tambang pada Kawasan Industri Morowali (KI-Morowali) serta Industri Gas Bumi di Kabupaten Banggai.

2.1.1.2.6 Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Adapun Potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah adalah:

a. **Kabupaten Banggai Kepulauan** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau

Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;

b. **Kabupaten Buol** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;

c. **Kabupaten Donggala** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.

d. **Kabupaten Morowali – Morowali Utara** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Cagar Alam Morowali, Pemancingan Putri Malu, Air Terjun Mempueno, Sumber Air Panas One Pute, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah;

e. **Kabupaten Parigi Moutong** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja

Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;

f. **Kabupaten Poso** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalit Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;

g. **Kabupaten Tolitoli** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompaile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.

h. **Kabupaten Tojo Una-una** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Kepulauan Togean, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matako, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri;

i. **Kabupaten Banggai** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permadian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat,

Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;

j. **Kota Palu** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya.

k. **Kabupaten Sigi** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Camping Ground Paneki, Matantimali, Pemandaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air TerjunTamunggu Indah.

2.1.1.2.7 Pertambangan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO). Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan

produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Disamping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 trilyun kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 2.15
Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah

No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
I.	**Batuan Ornamen/poles**		
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM
2	Marmer/pualam dan Sarpentin	Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.

No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
		dan Kab. Banggai	
		Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali	
II.	**Batuan Bahan Konstruksi**		
3	Sirtukil	Terdapat Kota Palu dan disemuaKabupaten se Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakanbatuan yang terdiri daribatuanGranit, Granodiorit, Basal, Gabro,Andesit, Dasit, Serpentinit, Dunit,juga dari Breksi dan KonglomeratDi Kab. Donggala dan Kota Paludiantar-pulaukan keKalimantan Timur.
III.	**Mineral Non Logam lainnya**		
4	Batugamping	Kab. Donggala, Buol, Poso, BanggaiKepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, BanggaiKepulauan mempunyai potensiBahan Baku Semen yang sudahmelalui studi Kelayakan danAMDAL.
5	Lempung	Disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata,Genteng dan batako.
6.	Pasir Kwarsa	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan	Umumnya mempunyai kadar SiO3 kurang dari 75 %
7.	Gypsum	Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan
8.	Talk	Kab. Banggai, dan Tojo Unauna	Berupa Sisipan pada batuan batuan UltrabasaPertanian (Kaptan), Kadar Mg 03
9.	Dolomit	Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur(Magnesium) sampai 35 %

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng.

Selain hal tersebut di atas, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

- Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik
- Panas Bumi : 378 mWe
- Sumber Energi Terbarukan:
  - *Air : 1.001,980 MW*
  - *Matahari : 5.512 kWh/m^2*
  - *Angin : 2 – 5 m/s*
  - *Biogas : 19.026 kW*
- Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel) : 260.070 ha.

Potensi energi air di Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1, PLTA Poso-2 dan PLTA Poso-3. PLTA Poso 2 telah beroperasi sejak Tahun 2012 dengan Kapasitas 3x65 MW, sementara PLTA Poso-1 dengan kapasitas 4x30 MW dan PLTA Poso-3 dengan kapasitas 4x50 MW. Ketiga pembangkit tersebut direncanakan sebagai pembangkit Peaker dengan total kapasitas 515 MW.

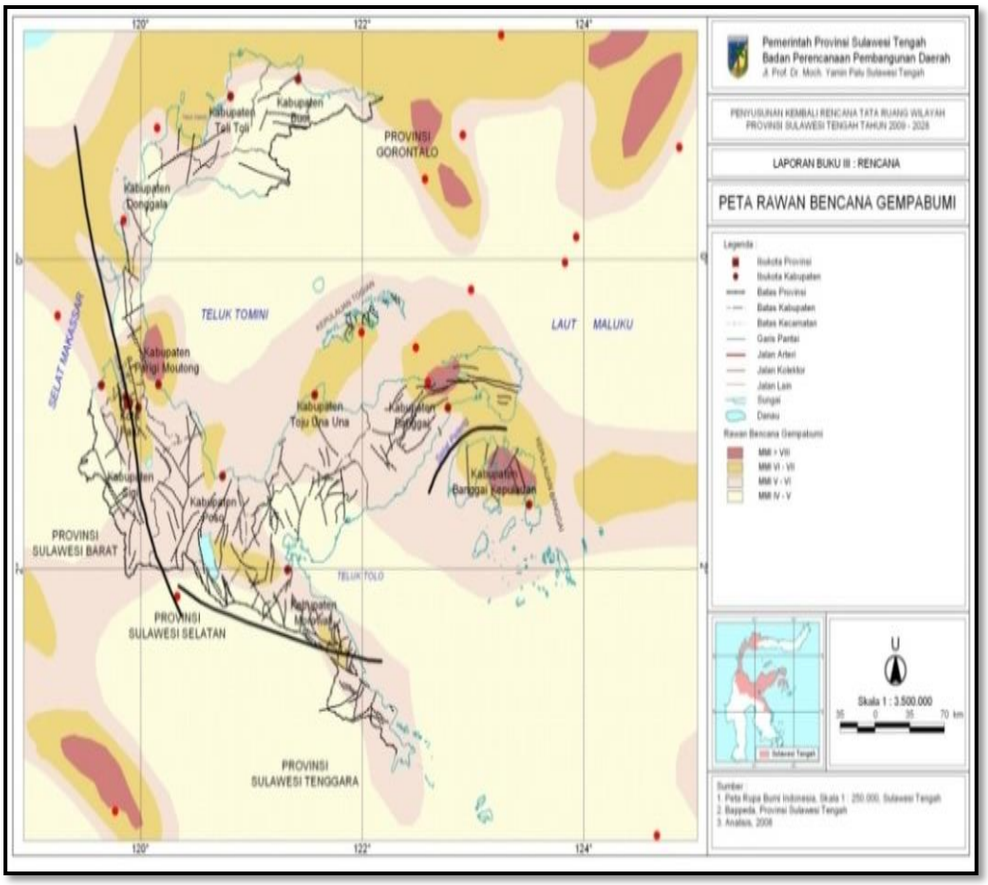
Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 %. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatka terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat dibeberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20-40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64 – 78 %, yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternative dengan memanfaatkan *Solar Home System* (SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km, hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi Tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/s.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori Kawasan/Zona Rawan Bencana, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi yaitu Gunung Colo yang terletak di Pulau Una-una Kabupaten Tojo Unauna, kawasan rawan gempa yang berskala tinggi di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Bangkep, Parigi Moutong, berskala menengah di Kabupaten Sigi, Tolitoli, Morowali, Poso, sementara berskala rendah di Kabupaten Buol dan Morowali.



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1.3.1 Tatanan Tektonik dan Sejarah Kegempaan Palu Sulawesi Tengah

Menurut Daryono (2011) Daerah Palu merupakan salah satu kawasan seismik aktif di Indonesia. Tingginya tingkat aktivitas kegempaan di kawasan ini tidak lepas dari lokasinya yang berada pada zona benturan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif mengakibatkan Daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia berkaitan dengan aktivitas sesar aktif. Menurut Hamilton (1979), ada beberapa segmentasi sesar yang sangat berpotensi membangkitkan gempa bumi kuat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sesar-sesar tersebut

adalah: (a) Sesar Palu-Koro yang memanjang dari Palu ke arah Selatan dan Tenggara melalui Sulawesi Selatan bagian Utara menuju ke selatan Bone sampai di laut Banda, dengan panjang patahan sekitar 500 Kilometer (b) Sesar Saddang yang memanjang dari pesisir Pantai Mamuju memotong diagonal melintasi daerah Sulawesi Selatan bagian tengah, Sulawesi Selatan bagian selatan, Bulukumba menuju ke Pulau Selayar bagian Timur, dan (c) Sesar Parit-Parit di Laut Makassar Selatan dan Laut Bone, dan beberapa anak patahan baik yang berada di darat maupun di laut.

Untuk mengetahui tingkat aktivitas kegempaan di Palu, perlu dilakukan kajian sejarah gempabumi dan seismisitas. Berdasarkan distribusi seismisitas, tampak klaster aktivitas gempabumi yang cukup tinggi di sepanjang sesar aktif Palu-Koro hingga memotong Kota Palu. Ditinjau dari kedalaman gempabuminya, aktivitas gempabumi di zona ini tampak didominasi oleh gempabumi kedalaman dangkal antara 0 hingga 60 kilometer, yang merupakan cerminan pelepasan tegangan kerak bumi yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif.

Klaster seismisitas gempabumi dangkal ini terkonsentrasi hampir merata baik di lepas pantai maupun di daratan. Klaster seismisitas ini merupakan gambaran dari sangat aktifnya kondisi tektonik di kawasan ini. Kondisi seismisitas ini menunjukkan bahwa daerah Palu dan sekitarnya merupakan daerah yang rawan terhadap gempabumi dan tsunami. Apalagi kondisi seismisitas dan tektonik yang ada mendukung untuk terjadinya gempabumi kuat dengan kedalaman dangkal yang dapat membangkitkan tsunami.

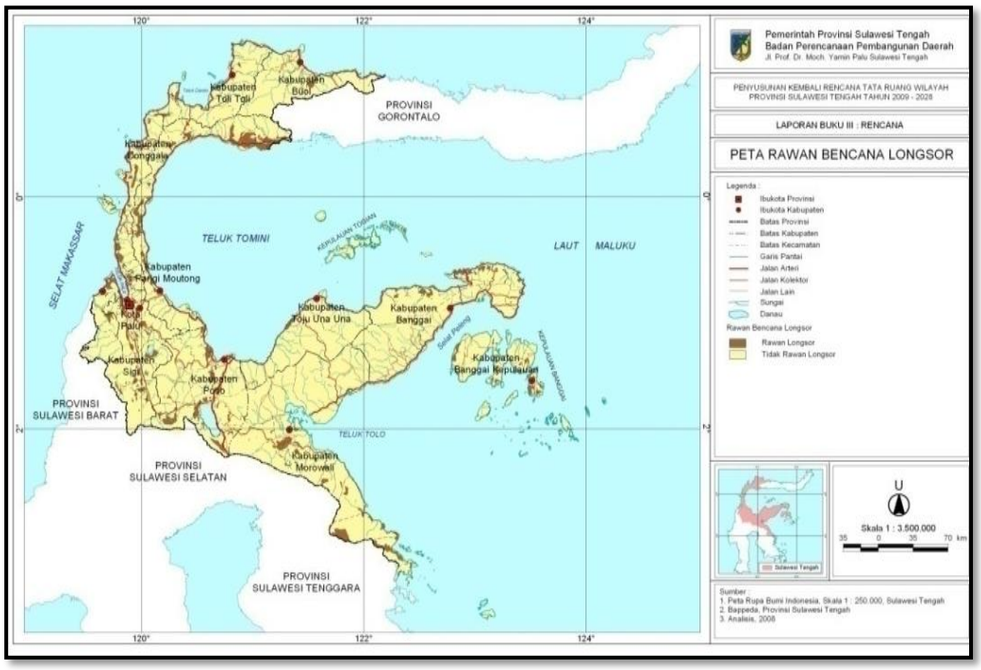
Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah misalnya, tercatat sebagai daerah rawan gempa karena salah satu wilayah yang memiliki aktivitas tektonik tertinggi di Indonesia. Penyebab utamanya tidak lain

adalah karena di kota Palu terdapat patahan kerak bumi (sesar) berdimensi cukup besar, dikenal dengan sesar Palu-Koro. Sesar itu memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone dengan panjang patahan sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong jantung kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sesar yang merupakan pertemuan lempeng-lempeng tektonik di bawah perut bumi itu jenis sesar aktif. Sesar itu terus bergerak satu sama lain dan memiliki sifat pergeseran sinistral (pergeseran ke arah kanan) dengan kecepatan geser sekitar 14-17 mm/tahun. Pergeseran pada lempeng-lempeng tektonik yang cukup aktif di sesar Palu Koro membuat tingkat kegempaan di wilayah ini juga dikategorikan cukup tinggi. Catatan seismograf pada Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Palu menyebutkan, hampir setiap menit Palu dan Donggala diguncang gempa. Hanya saja getarannya kecil-kecil, dan hanya bisa dicatat seismograf. Mengutip ungkapan Kepala BMKG Palu, Mudjianto, dalam sebuah situs internet sekitar September 2010, bahwa kota Palu diguncang gempa 600 kali dalam sebulan dengan kekuatan 3 sampai 6 SR memperlihatkan betapa tingginya aktifitas tektonik di kawasan ini.

Potensi gempa juga bertambah dengan fakta bahwa pulau Sulawesi dilewati oleh apa yang dikenal dengan formasi Pasific ring of fire yang membentang dari Jepang, Filipina, Maluku dan Sulawesi. Formasi ini berupa sederetan gunung api yang menjadi tempat kurang lebih 450 gunung api aktif maupun tidak aktif atau sekitar 75% dari jumlah gunung api di seluruh dunia. Sekitar 90% gempa dan 80% gempa terbesar terjadi di sepanjang formasi ini.

2.1.1.3.2 Kawasan Tanah Longsor dan Likufaksi

Kawasan tanah longsor berpotensi terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Poso dan Morowali, sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai dan Kota Palu.



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.

Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Longsor Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1.4 Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2010-2021 cenderung meningkat, yakni dari 2.635,01 jiwa pada Tahun 2010 menjadi 3.021.879 jiwa pada Tahun

2021. Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2021 sebesar 1,62 persen dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2021 sebesar 48 jiwa/km^2.

Tabel 2.16
Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO.	INDIKATOR	2021
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.021.879
	- Laki-Laki	1.551.317
	- Perempuan	1.470.562
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,62
3.	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	48

Sumber: BPS, 2022.

Dilihat dari struktur kelompok umur, penduduk Sulawesi Tengah di dominasi oleh kelompok usia produktif. Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
0 – 4	141.298	135.438	276.736
5 – 9	137.682	132.669	270.351
10 – 14	136.067	127.936	264.003
15 – 19	134.325	125.247	259.572
20 – 24	136.550	127.526	264.076
25 – 29	133.353	124.784	258.137
30 – 34	125.667	118.982	244.649
35 – 39	117.086	111.085	228.171
40 – 44	109.394	104.211	213.605
45 – 49	97.827	93.124	190.951
50 – 54	83.252	78.883	162.135
55 – 59	68.195	64.496	132.691

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
60 – 64	51.512	48.633	100.145
65 – 69	36.813	34.986	71.799
70 – 74	22.417	21.978	44.395
75 +	19.879	20.584	40.463
Tidak Tahu/*Unknow*			
Jumlah	**1.551.317**	**1.470.562**	**3.021.879**

Sumber: BPS, 2022.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Tujuan pembangunan ekonomi secara substansi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 (c-to-c) secara kumulatif sepanjang tahun 2021 dibanding 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 11,70 persen, yang pertumbuhannya terjadi pada seluruh lapangan usaha.

a. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha

Sejak Pandemi Covid-19 melanda perekonomian pada awal Tahun 2020, tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan sampai dengan Triwulan I Tahun 2020, namun mampu mempertahankan pertumbuhan positif tertinggi ke-3 secara nasional 4,58 persen. Seiring dengan digalakkannya program vaksinasi secara masal serta berbagai intervensi kebijakan pemerintah berupa

program subsidi dan insentif bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19, berangsur-angsur perekonomian nasional mulai menunjukkan ke arah positif mulai awal Tahun 2021 termasuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara kumulatif sepanjang tahun 2021 dibanding 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 11,70 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri pengolahan sebesar 19,62 persen," diikuti lapangan usaha konstruksi sebesar 16,88 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,46 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 12,23 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,29 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Sulteng triwulan IV tahun 2021 dibanding triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,89 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali industri pengolahan yang kontraksi sebesar 0,66 persen.

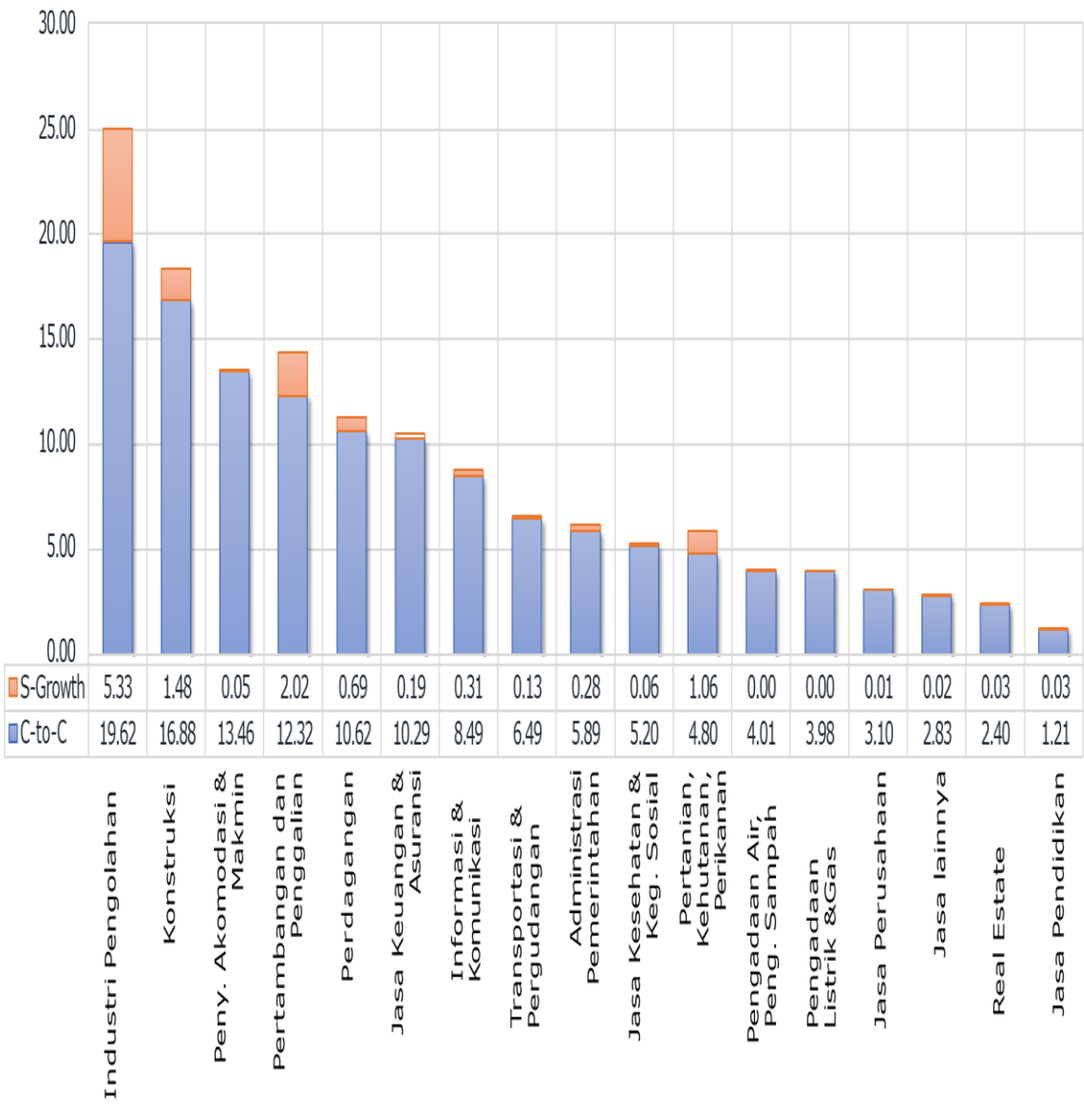
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 30,18 persen, konstruksi sebesar 14,70 persen, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 13,76 persen.

Sementara itu, lapangan usah pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 6,61 persen dan 2,69 persen.

Selain itu ekonomi Sulteng triwulan IV 2021 dibanding triwulan IV 2020 atau year on year (yoy) mengalami pertumbuhan sebesar 11,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 30,09 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 24,84 persen.

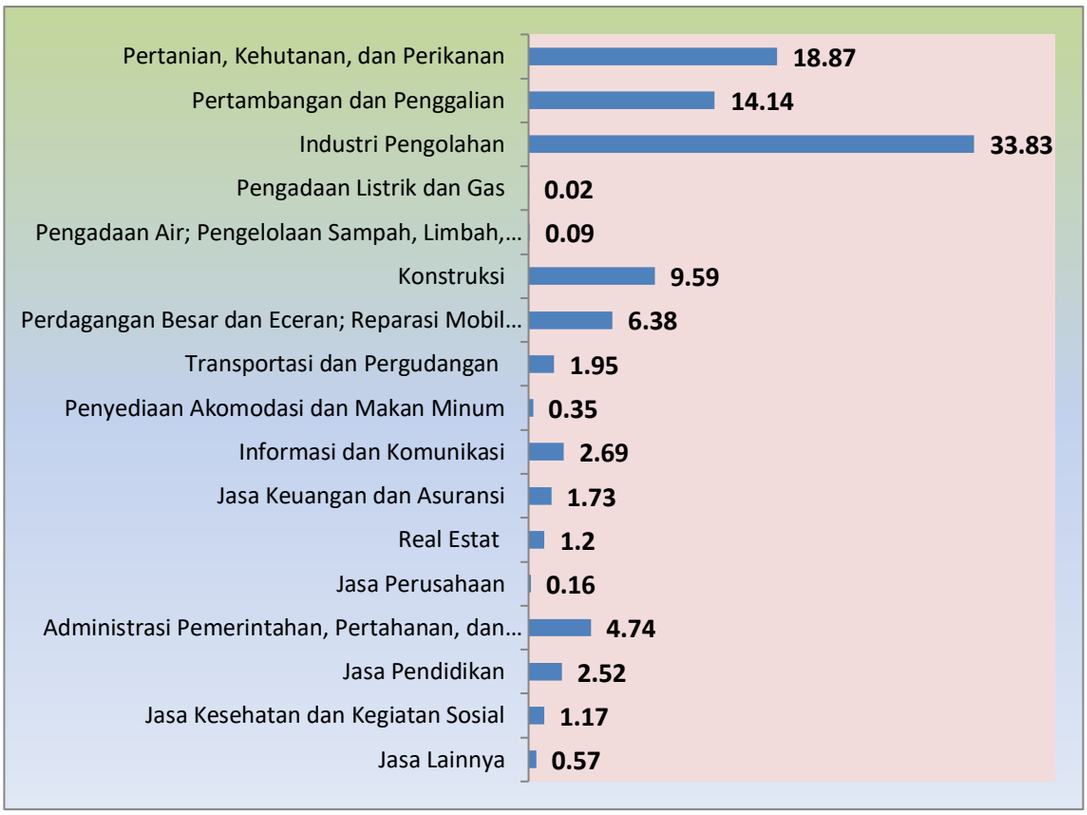
Sementara itu industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 10,80 persen, 11,92 persen dan 10,49 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :



	Industri Pengolahan	Konstruksi	Peny. Akomodasi & Makmin	Pertambangan dan Penggalian	Perdagangan	Jasa Keuangan & Asuransi	Informasi & Komunikasi	Transportasi & Pergudangan	Administrasi Pemerintahan	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Pengadaan Air, Peng. Sampah	Pengadaan Listrik &Gas	Jasa Perusahaan	Jasa lainnya	Real Estate	Jasa Pendidikan
S-Growth	5.33	1.48	0.05	2.02	0.69	0.19	0.31	0.13	0.28	0.06	1.06	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03
C-to-C	19.62	16.88	13.46	12.32	10.62	10.29	8.49	6.49	5.89	5.20	4.80	4.01	3.98	3.10	2.83	2.40	1.21

Sumber: BPS 2022

Gambar 2.8
Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 (c-to-c)

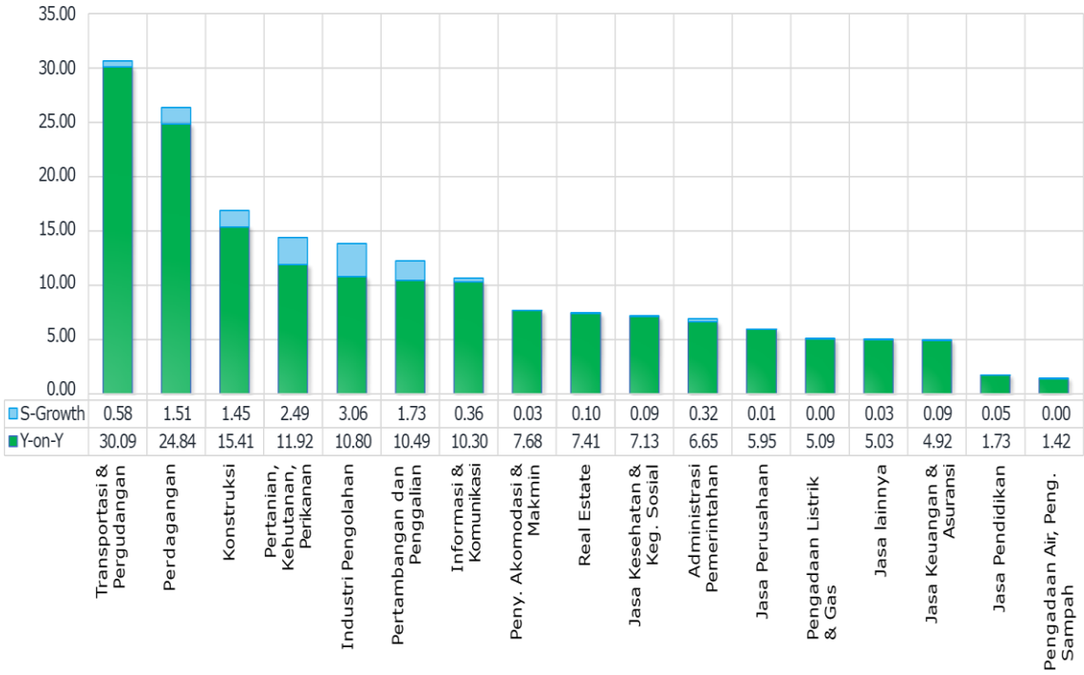


Sumber: BPS 2022.

Gambar 2.9
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2021

Bila dilihat dari distribusi pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dengan distribusi yang tertinggi adalah sebesar 33,83 persen oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, diikuti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,87.

Sementara distribusi lapangan usaha yang paling rendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas hanya sebesar 0,02 persen, disusul Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,09 persen.



Sumber: BPS 2022

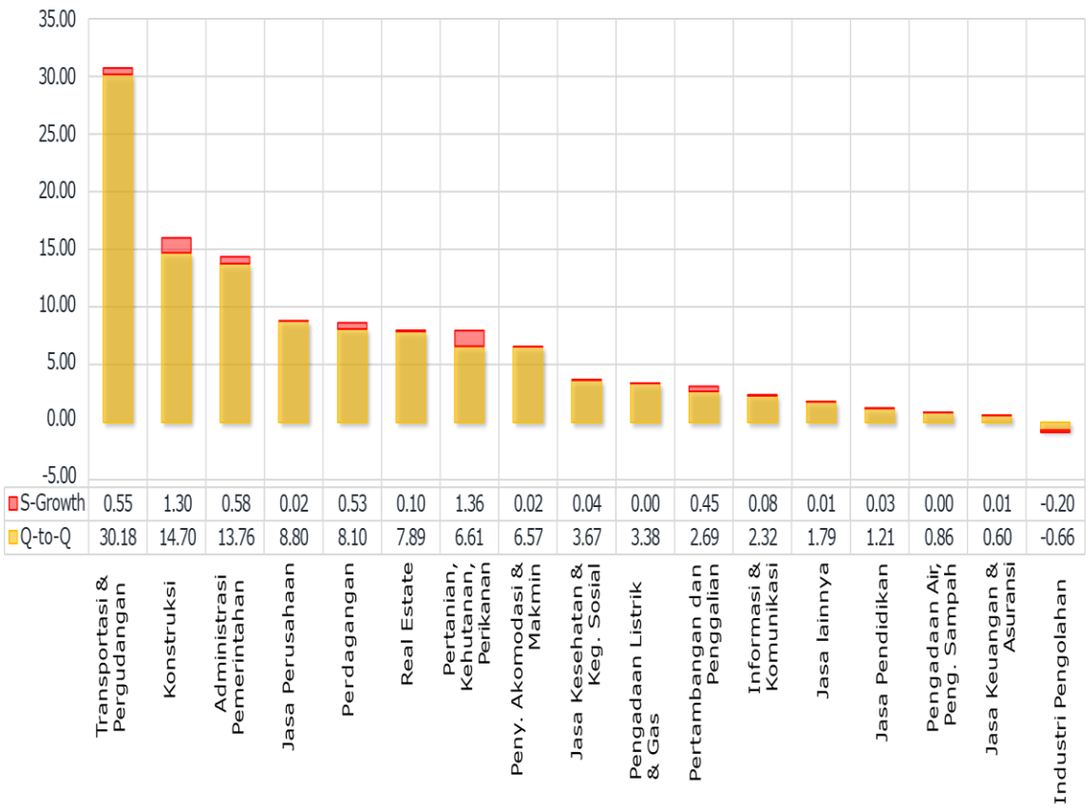
Gambar 2.10
Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV 2021 (y-on-y)

Menurut sumber pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2021 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020 (y-on-y) paling besar disumbang oleh lapangan usaha usaha Transportasi dan Perdagangan yang memiliki sumber pertumbuhan tertinggi 30,09 persen, kemudian disusul oleh Lapangan Usaha Perdagangan sebesar 24,84 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha triwulan IV tahun 2021 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (34,88 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (18,23 persen); Pertambangan dan Penggalian (14,72 persen); serta Konstruksi (9,49 persen) dan Perdagangan (6,33 persen).

Sedangkan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV tahun 2021 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami

pertumbuhan sebesar 4,89 persen. Dari tujuh belas lapangan usaha, hanya tiga lapangan usaha mengalami kontraksi, yakni lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,86 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,60 persen; dan Industri Pengolahan sebesar -0,66 persen, sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,18 persen, diikuti peningkatan pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,70 persen, serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 13,76 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :



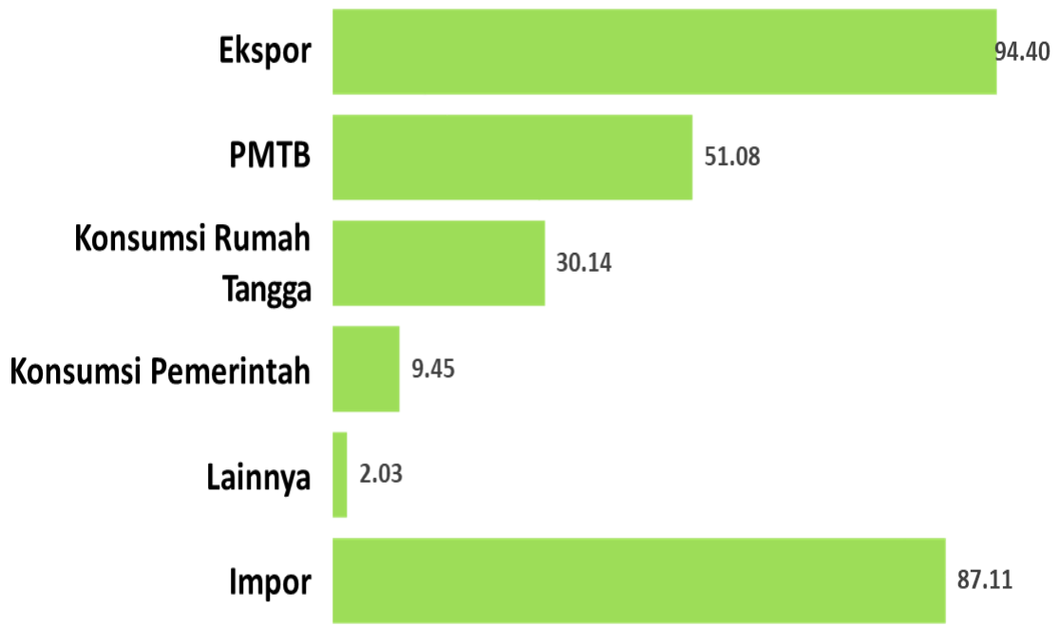
Sumber: BPS 2022.

Gambar 2.11
Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV Tahun 2021 (q-to-q)

b. PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2021 dibanding dengan triwulan III Tahun 2021

(q-to-q) mencapai 4,89 persen. Di tengah pandemi Covid-19, kinerja Ekspor Barang dan Jasa menjadi penggerak utama pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah yaitu tingginya ekspor dipengaruhi permintaan luar negeri produk besi baja dari nikel yang tumbuh sebesar 24,06 persen mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah secara keseluruhan tetap bergerak positif. Pertumbuhan juga terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 14,6 persen. Sedangkan komponen yang lain mengalami kontraksi.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.12
Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Beberapa Komponen Triwulan IV Tahun 2021 (persen)

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 90,40 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen Pengeluaran Impor sebesar 87,11 persen,

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT).

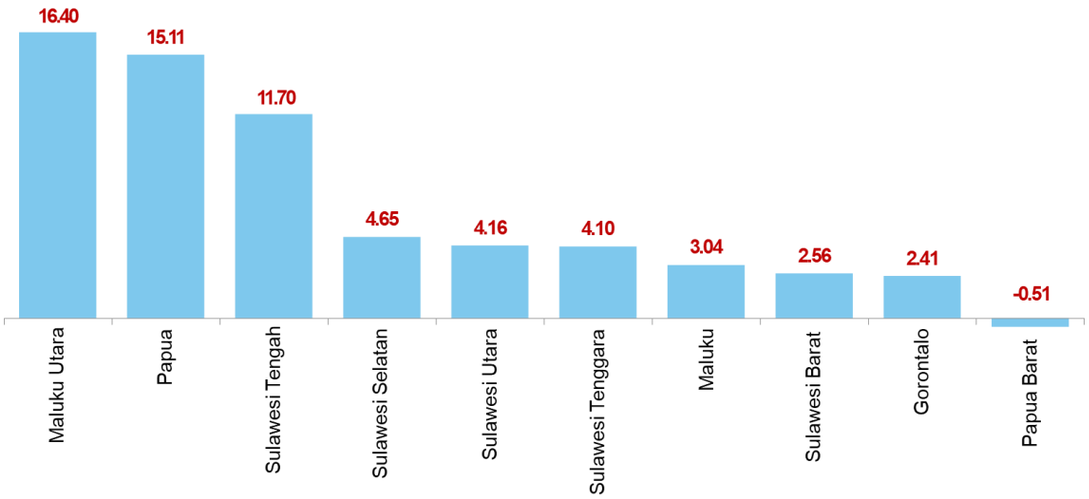
Sementara ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 11,90 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara signifikan sebesar 35,73 persen, disusul komponen Impor sebsar 29,34 persen, dan Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 21,48 persen. Dapat dilihat pada tebel berikut :



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.13
Pertumbuhan Beberapa Komponen Triwulan IV-2021 (y on y) (persen)

Selain itu secara spasial, ekonomi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Maluku Utara sebesar 16,40 persen, sementara Provinsi Sulawesi Tengah menempati urutan ketiga sesudah Provinsi Papua dengan pertumbuhan sebesar 11,70 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat mengalami kontraksi sebesar 0,51 persen, seperti pada tabel berikut :



Sumber: BPS, 2022.

Gambar 2.14
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi se-Sulampua
tahun 2021

Sementara distribusi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada perspektif pertumbuhan ekonomi Sulampua tahun 2021 sebesar 15,54 persen meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 13,87 persen, dan distribusi pertumbuhan ekonomi yang tertinggi didominasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 34,30 persen.

Disisi lain laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 hanya sebesar 4,86 persen, meningkat secara signifikan pada tahun 2021 sebesar 11,70 persen.

Pertumbuhan Lapangan Usaha didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,62 persen, namun menurun jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 23,68 persen, disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,88 persen, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 hanya sebesar -8,47 persen serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,46 persen, juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -11,05 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2021

No.	Lapangan Usaha	2020 x	2021 x x
1	2	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,34	4,8
B	Pertambangan dan Penggalian	10,36	12,32
C	Industri Pengolahan	23,68	19,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,12	3,98
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,8	4,01
F	Konstruksi	-8,47	16,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,15	10,62
H	Transportasi dan Pergudangan	-33,12	6,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,05	13,46
J	Informasi dan Komunikasi	8,56	8,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,8	10,29
L	Real Estat	0,38	2,4
M,N	Jasa Perusahaan	-2,57	3,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,21	5,89
P	Jasa Pendidikan	-1,63	1,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,11	5,2
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-0,04	2,83
C	**Produk Domestik Regional Bruto**	**4,86**	**11,70**

Sumber: BPS, 2022

2.1.2.1.2 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB perkapita

merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah biasa menggunakan pengeluaran per kapita, tetapi bisa juga menggunakan pendekatan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, PDRB per kapita kabupaten/kota di Sulawesi Tengah cukup beragam. Kabupaten dengan PDRB per kapita ADHB yang tertinggi adalah Kabupaten Morowali yaitu sebesar 375.097 ribu rupiah per tahun, kemudian diikuti Kabupaten Morowali Utara sebesar 86.716 ribu rupiah per tahun, dan Kota Palu sebesar 64.232 ribu rupiah per tahun.

PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan *trend* peningkatan yakni dari Rp66.306,27 ribu pada Tahun 2020 menjadi Rp81.733,04 ribu pada Tahun 2021, Capaian PDRB perkapita tersebut masih rendah dibandingkan dengan PDB perkapita nasional.

Sementara PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2010 pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 49.588,29 ribu rupiah, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 45.052,32 ribu rupiah, dan PDRB perkapita yang tertinggi di Kabupaten Morowali sebesar 327.058 ribu rupiah, dan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 22.478 ribu rupiah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (ribu rupiah), 2020–2021

Kabupaten/Kota	*ADHB*		*ADHK*	
	2020 x	2021 x x	2020 x	2021 x x
1	2	3	4	5
Banggai Kepulauan	32.002,00	32.782,00	21.732,00	22.478,00
Banggai	75.697,00	78.581,00	51.235,00	51.510,00
Morowali	388.051,00	375.097,00	274.166,00	327.058,00
Poso	37.757,00	37.109,00	25.491,00	26.269,00
Donggala	39.124,00	39.761,00	27.217,00	28.203,00
Tolitoli	36.995,00	35.999,00	24.608,00	25.469,00
Buol	38.881,00	35.400,00	26.499,00	27.483,00
Parigi Moutong	39.124,00	36.480,00	25.249,00	26.224,00
Tojo Una-Una	34.229,00	37.089,00	22.796,00	23.317,00
Sigi	35.196,00	37.707,00	23.845,00	24.560,00
Banggai Laut	33.707,00	31.966,00	22.843,00	23.677,00
Morowali Utara	92.644,00	86.716,00	67.002,00	72.944,00
Palu	60.892,00	64.232,00	41.516,00	43.460,00
Jumlah Kabupaten/Kota	**66.362,02**	**81.795,34**	**45.266,17**	**49.736,41**
Sulawesi Tengah	**66.306,27**	**81.733,04**	**45.052,32**	**49.588,29**

Sumber: BPS, 2022 (Diolah)

2.1.2.1.3 Potensi Daerah

2.1.2.1.3.1 Pertanian

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah di Sektor Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Pembangunan di sektor pertanian menjadi lebih penting disebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah pertanian dan mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam/berkebun dan nelayan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Sub Sektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 – 2020

NO.	KOMODITAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi (Sawah+Ladang)					
	- Luas Panen (Ha)	228.571	243.070	204.158	186.100,44	180.510
	- Produksi (Ton)	1.103.169	1.144.398	954.794	844.904,30	810.108
	- Produktivitas (Kw/Ha)	48,26	47,08	46,77	45,40	44,88
2	Jagung					
	- Luas Panen (Ha)	62.165,4	78.993,3	93.551,80	129.765	130.012
	- Produksi (Ton)	317.669	374.322	386.606	564.404	568.473
	- Produktivitas (Kw/Ha)	51,10	47,39	41,33	43,49	43,72
3	Kedelai					
	- Luas Panen (Ha)	8.867,8	3.450,8	21.107,20	5.594	2.835
	- Produksi (Ton)	15.358	4.962	26.573	5.336	3.654
	- Produktivitas (Kw/Ha)	17,32	14,38	12,59	9,54	12,89
4	Kacang Tanah					
	- Luas Panen (Ha)	3.246,8	2.549,9	2.803,40	2.085	1.960
	- Produksi (Ton)	4.410	2.766	3.432	2.196	2.099
	- Produktivitas (Kw/Ha)	13,58	10,85	12,24	10,53	10,71
5	Kacang Hijau					
	- Luas Panen (Ha)	944,7	586,2	698,30	469	460
	- Produksi (Ton)	780	780	573	68	373
	- Produktivitas (Kw/Ha)	8,25	8,25	8,20	1,46	8,11
6	Ubi Kayu					
	- Luas Panen (Ha)	1.808,5	1.991,5	1.993,10	1.687	1.626
	- Produksi (Ton)	34.970	54.225	58.426	46.667	40.046
	- Produktivitas (Kw/Ha)	193,37	272,28	293,13	276,69	246,29
7	Ubi Jalar					
	- Luas Panen (Ha)	1.102,7	1.215,2	1.314,50	1.087	1.311
	- Produksi (Ton)	15.684	15.464	19.791	19.072	14.857
	- Produktivitas (Kw/Ha)	142,23	127,25	150,60	175,47	113,33

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021.

Perkembangan produksi tanaman padi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2018 cenderung meningkat, sedangkan

pada Tahun 2019-2020 produksinya mengalami penurunan yaitu Pada Tahun 2019 sebesar 844.904 ton, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 810.108 ton pada tahun 2020 produksi tertinggi yaitu komoditi padi dengan produksi mencapai 810.108 ton dan luas panen 180.510 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 44,88 kw/ha, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah komoditi jagung dengan produksi mencapai 568.473 ton dan luas panen 130.012 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 43,72 kw/ha, dan komoditi ubi kayu dengan produksi mencapai 40.046 ton dan luas panen 1.626 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 246,29 kw/ha. Sedangkan produksi terendah yakni komoditi kacang hijau dengan produksi hanya 373 ton dan luas panen 460 ha dengan tingkat produktivitas sebesar 8,11 kw/ha, sehingga kontribusi sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB tahun 2020 mencapai 4,05 persen, kalau dibandingkan periode 2018-2019 cenderung meningkat, namun jika dibandingkan pada tauhn 2016-2017 kontribusinya menurun.

Pada Sub Sektor Tanaman Hortikultura kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2020 mencapai 2,64 persen cenderung meningkat dibandingkan pada periode 2018-2019, namun jika dibandingakan periode tahun 2016-2017 cenderung menurun, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Sub Sektor Tanaman Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 – 2020

NO.	KOMODITAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Bawang Merah**					
	- Produktivitas (Ku/ha)	46,46	49,89	57,49	47,82	54,30
	- Luas Panen (Ha)	1,506	1,718	1,333	1,361	1,055
	- Produksi (Ton)	6.997	8.572	7.663	6.508	5.725
2	**Cabai Besar**					
	- Produktivitas (Ku/ha)	54,54	54,31	67,93	62,55	74,34
	- Luas Panen (Ha)	872	1.230	1.105	854	974
	- Produksi (Ton)	4.756	6.680	7.507	5.342	7.238
3	**Cabai Rawit**					
	- Produktivitas (Ku/ha)	57,77	72,32	68,34	61,77	60,88
	- Luas Panen (Ha)	2.014	2.935	3.809	3.664	4.113
	- Produksi (Ton)	11.635	21.226	26.032	22.632	25.042
4	**Kentang**					
	- Produktivitas (Ku/ha)	86,02	179,88	129,43	122,03	119,66
	- Luas Panen (Ha)	66	108	112	106	67
	- Produksi (Ton)	568	1.943	1.450	1.294	802
5	**Jahe**					
	- Produktivitas (Kg/M^2)	2,72	3,89	3,85	2,66	3,39
	- Luas Panen (M^2)	179.202	209.861	212.027	112.399	100.563
	- Produksi (Kg)	486.666	817.221	815.911	299.388	340.830
6	**Jeruk**					
	- Produktivitas (Ku/Phn)	0,97	1,23	1,32	1,17	0,44
	- Tanaman Menghasilkan (Phn)	22.808	10.779	29.369	33.589	115.160
	- Produksi (Ku)	22.047	13.284	38.910	39.242	50.328
7	**Pisang**					
	- Produktivitas (Ku/Rumpung)	0,98	0,57	0,48	0,54	0,78
	- Tanaman Menghasilkan (Rumpung)	310.656	252.539	235.576	456.614	313.596
	- Produksi (Ku)	305.946	144.792	111.919	244.881	244.221
8	**Durian**					
	- Produktivitas (Ku/Phn)	1,92	1,72	1,29	1,01	1,01
	- Tanaman Menghasilkan (Phn)	91.791	78.420	102.423	249.441	191.876
	- Produksi (Ku)	176.662	134.933	131.879	252.881	193.819
9	**Krisan**					
	- Produktivitas (Tangkai/M^2)	29,10	2,87	2,90	3,94	2,76
	- Luas Panen (M^2)	3.618	17.004	11.299	2.655	1.527
	- Produksi (Tangkai)	105.296	48.841	32.789	10.469	4.219
10	**Anggrek**					
	- Produktivitas (Tangkai/M^2)	55,61	8,01	4,29	8,05	3,59
	- Luas Panen (M^2)	1.338	7.471	6.311	6.988	6.699
	- Produksi (Tangkai)	74.400	59.813	27.077	56.237	24.064

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021.

Dilihat pada tabel diatas bahwa Cabai Rawit merupakan produksi komoditi di Provinsi Sulawesi Tengah yang tertinggi, pada periode 2019-2020 cenderung meningkat, namun jika dibandingkan pada Tahun 2018 produksinya mengalami penurunan yaitu dengan jumlah sebesar 26.032 ton, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 25.042 ton, sedangkan luas panen pada tahun 2020 seluas 4.113 ha, sementara tingkat produktivitas mencapai 60,88 Ku/Ha.

2.1.2.1.3.2 Perkebunan

Perkembangan usaha perkebunan di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup nyata dengan beberapa komoditas andalan seperti : kakao, cengkeh, dan kelapa. Disamping itu terdapat juga beberapa komoditi potensi lainnya seperti: kemiri, pala dan Vanili.

Komoditi tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan devisa negara, juga mencakup rangkaian kegiatan produksinya termasuk peluang terbukanya lapangan kerja yang cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Sub Sektor Perkebunan telah memberikan andil yang cukup baik dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2021 Sub Sektor Perkebunan berkontribusi sebesar 11 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, ditinjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020 – 2021

NO.	KOMODITI	2020	2021
1	2	3	4
1.	**Kakao**		
	- Luas Panen (Ha)	279.217	272.325,6
	- Produksi (Ton)	127.206,86	127.206,86
2.	**Kelapa**		
	- Luas Panen (Ha)	214.591	143.135,17
	- Produksi (Ton)	191.541,91	195.160,06
3.	**Kopi**		

NO.	KOMODITI	2020	2021
1	2	3	4
	- Luas Panen (Ha)	9.951	10.339,50
	- Produksi (Ton)	2.593,57	3.548,64
4.	**Cengkeh**		
	- Luas Panen (Ha)	76.347	77.039,9
	- Produksi (Ton)	19.430,90	23.308,5
5.	**Lada**		
	- Luas Panen (Ha)	3.098	3.098
	- Produksi (Ton)	257,40	363,5
6.	**Pala**		
	- Luas Panen (Ha)	21.752	21.689,9
	- Produksi (Ton)	602,60	991,2
7.	**Jambu Mete**		
	- Luas Panen (Ha)	13.709	13.483,5
	- Produksi (Ton)	2.213,20	2.591,8
8.	**Karet**		
	- Luas Panen (Ha)	7.763	7.828
	- Produksi (Ton)	4.306,33	4.747,30
9.	**Vanili**		
	- Luas Panen (Ha)	654	773,7
	- Produksi (Ton)	22,00	41,00
10.	**Kelapa Sawit**		
	- Luas Panen (Ha)	144.793	214.143,41
	- Produksi (Ton)	272.275,15	310.435,97
11.	**Sagu**		
	- Luas Panen (Ha)	3.245	3.253,6

NO.	KOMODITI	2020	2021
1	2	3	4
	- Produksi (Ton)	940,8	903
12.	**Kemiri**		
	- Luas Panen (Ha)	5.456	5.622,5
	- Produksi (Ton)	1.211,0	1.205,6

Sumber: BPS 2022.

Selama periode Tahun 2020-2021 perkembangan produksi komoditi tanaman perkebunan di Sulawesi Tengah rata-rata mengalami peningkatan. Komoditi perkebunan yang memiliki produksi terbesar pada Tahun 2021 yaitu kelapa, kelapa sawit, kakao, dan cengkeh.

Pada tahun 2021 Produksi tanaman kelapa sawit mencapai 310.435,97 ton dengan luas panen 214.143,41 ha, sementara produksi Kelapa pada Tahun 2021 mencapai 195.160,06 ton dengan luas panen 143.135,17 ha, , produksi kakao sebanyak 127.206,86 ton dengan luas panen 272.325,6 ha, dan produksi cengkeh sebesar 23.308,5 ton dengan luas panen 77.039,9 ha.

2.1.2.1.3.3 Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Sulawesi Tengah terdiri dari: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

Tabel 2.23
Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021

NO.	KOMODITI	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Ternak Besar**					
	- Kerbau	3.884	3.409	2.421	2.876	3.086
	- Sapi	353.486	267.483	358.496	402.191	434.070
	- Kuda	1.661	1.410	1.340	1.094	1.099
2.	**Ternak Kecil**					
	- Kambing	445.337	433.335	531.533	555.399	588.009
	- Domba	7.351	7.429	7.922	10.942	12.538
	- Babi	230.356	261.820	265.719	229.154	222.268
3.	**Ternak Unggas**					
	a. Ayam Ras	13.852.266	11.798.788	12.959.955	8.562.221	9.246.048
	- Petelur	2.081.518	557.159	645.025	1.299.790	1.263.744
	- Pedaging	11.770.748	11.241.629	12.314.930	7.262.431	7.982.304
	b. Ayam Kampung	4.477.451	4.400.735	5.250.361	4.711.438	5.118.732
	c. Itik	792.469	873.446	912.818	1.230.712	1.244.398

Sumber: BPS, 2022.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, selama periode tahun 2017-2021, jenis ternak besar mengalami peningkatan populasi walaupun pada jenis sub ternak kuda yang cenderung menurun, namun pada jenis ternak kecil dan ternak unggas pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2021.

Pada Tahun 2021, populasi terbanyak untuk kategori jenis ternak besar yaitu sapi dengan jumlah populasi sebanyak 434.070 ekor, mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2020 berjumlah 402.191 ekor, Sementara untuk kategori jenis ternak kecil populasi terbanyak yaitu kambing dengan jumlah 588.009 ekor, mengalami peningkatan dari tahun 2020 berjumlah 555.399 ekor. Untuk kateori jenis ternak unggas populasi terbanyak yaitu ayam ras pedaging dengan jumlah populasi mencapai 7.982.304 ekor, namun jika dibandingkan dengan

populasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah 7.262.431 ekor.

2.1.2.1.3.4 Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dari 5 sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2020 Sektor Perikanan memberi konstribusi sebesar 6 persen terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.

Pada Tahun 2020 jumlah produksi perikanan budidaya sesuai data sementara mencapai 960.460,28 ton, menurun dibanding Tahun 2019 yang produksinya hanya sebesar 964.509,04 ton. Sementara produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2020 mencapai 201.101,80 ton meningkat dari Tahun 2019 yang sebesar 196.519,30 ton.

Perkembangan produksi perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020* (Ton)

NO.	JENIS USAHA PERIKANAN	2016	2017	2018	2019	2020*
1.	**Perikanan Budidaya**	**1.339.013,78**	**1.059.008,70**	**918.186,40**	**964.509,04**	**960.460,28**
	a. Jaring Apung Laut	61,62	736,90	1.885,82	728,47	727,17
	b. Jaring Apung Tawar		63,00	63,58	61,02	61,43
	c. Jaring Tancap Tawar	475,70	482,80	480,53	473,42	475,83
	d. Karamba	26,29	27,00	24,71	25,09	25,50
	e. Kolam	7.727,94	4.542,64	18.014,59	2.976,29	3.490,26
	f. Laut Lainnya		1,90	5.519,02	22,95	-
	g. Minapadi Sawah	26,69	51,00	12,00	25,00	86,45
	h. Rumput Laut	1.208.044,74	948.163,60	763.704,45	922.897,05	918.788,40
	i. Tambak	122.650,80	104.939,86	128.481,71	37.299,76	36.805,24
2.	**Perikanan Tangkap**	**212.330,60**	**174.964,00**	**171.115,00**	**196.519,30**	**201.101,80**
	a. Laut	210.140,20	174.049,30	168.550,50	193.605,20	198.240,60
	b. Perairan Umum	2.190,40	914,70	2.564,50	2.914,10	2.861,20

Sumber : Dinas Kelauatan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021.

Kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang cukup besar juga dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah, karena adanya ekosistem pesisir dan pulau kecil seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, yang sangat luas dan beragam. Ekosistem pesisir dan pulau-pulai kecil Provinsi Sulawesi Tengah cukup beragam seperti ekosistem terumbu karang seluas 186.766,71 Ha, padang lamun seluas 27.406,48 Ha dan mangrove seluas 33.876,29 Ha yang merupakan sumberdaya hayati potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wilayah perairan Sulawesi Tengah memiliki letak strategis yang berada di garis khatulistiwa dengan posisi di tengah Pulau Sulawesi.

Aspek keaneragaman sumberdaya hayati, kawasan perairan sangat subur dengan keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup lengkap, dimana kawasan Sulawesi Tengah letaknya di sekitar Khatulistiwa dan merupakan jantung dari segitiga karang dunia (World Coral Triangle) yang merupakan pusat keberadaan sumberdaya terumbu karang dunia. Posisi yang dianggap sangat menguntungkan, karena memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi wilayah ke depan.

2.1.2.1.3.5 Kehutanan

Perkembangan produksi hasil hutan di Sulawesi Tengah selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif. Jenis hasil hutan Kayu Bulat pada Tahun 2021 mencapai 84.441,35* m^3 meningkat di banding Tahun 2020 yang produksinya sebanyak 65.019,12 m^3. Sementara produksi Kayu Gergajian pada Tahun 2021 mencapai 28.771,89* m^3 meningkat dibanding Tahun 2020 sebesar 24.465,17 m^3. Namun Hasil jenis hutan lainnya yaitu rotan dengan

jumlah produksi pada Tahun 2020 mencapai 1.864,20 ton meningkat dibanding Tahun 2019 yang produksinya mencapai 1.040,00 ton. Untuk jenis hasil hutan Damar produksinya pada Tahun 2020 sebanyak 335,0 ton menurun dibanding Tahun 2019 yang produksinya mencapai 440,0 ton, sementara pada tahun 2021 masih nol, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Perkembangan Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Hasil Hutan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kayu Bulat (m^2)	46.681,61	76.255,49	111.091,49	65.019,12	84.441,35*
2.	Kayu Gergajian (m^2)	17.434,06	37.658,75	25.728,64	24.465,17	28.771,89*
3.	Rotan (ton)	4.620,00	1.380,00	1.040,00	1.864,20	-
4.	Damar (ton)	440	600	440	335	-

Sumber : BPS, 2021 dan Data Statistik Dinas Kehutanan 2022

2.1.2.1.4 Laju Inflasi

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

A. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Pada bulan Desember 2021, indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan

sebesar 0,84 persen dari 108,66 pada bulan November 2021 menjadi 109,57 pada bulan Desember 2021. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 1,80 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,78 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, (1,14 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,54 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,30 persen), kelompok kesehatan (0,24 persen) dan kelompok pendidikan (0,03 persen). Sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen.

Tabel 2.26
IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2020-2021)

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2020	IHK Des 2020	IHK Nov 2021	IHK Des 2021	IInflasi Tahun Kalender 2021 1) (%)	Inflasi Tahun Kalender 2021 2) (%)	Inflasi Tahun ke Tahun 3) (%)	Andil Inflasi 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umum (Headline)	**107,21**	**107,21**	**108,66**	**109,57**	**0,84**	**2,2**	**2,2**	**0,84**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	111,64	111,64	112,52	114,52	1,78	2,58	2,58	0,48
Pakaian dan Alas Kaki	107,03	107,03	107,75	107,48	-0,25	0,42	0,42	-0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,5	102,5	104,4	104,96	0,54	2,4	2,4	0,1
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin	102,73	102,73	104,96	105,27	0,3	2,47	2,47	0,02
Kesehatan	108,19	108,19	110,43	110,7	0,24	2,32	2,32	0,01
Transportasi	104	104	105,54	107,44	1,8	3,31	3,31	0,24
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,72	99,72	100,88	100,16	-0,71	0,44	0,44	-0,04
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,95	102,95	105,53	106,73	1,14	3,67	3,67	0,02
Pendidikan	111,48	111,48	112,26	112,29	0,03	0,73	0,73	0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	114,65	114,65	115,13	115,5	0,32	0,74	0,74	0,03
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111,23	111,23	114,93	114,92	-0,01	3,32	3,32	0

Sumber : BPS 2022

Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,20 persen. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,67 persen, sedangkan yang terendah terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42 persen.

Inflasi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,84 persen disumbangkan oleh andil kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,48 persen, diikuti oleh kelompok transportasi (0,24 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,10 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dan kelompok

perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil yang sama (0,02 persen), serta kelompok kesehatan (0,01 persen). Sementara itu kelompok pendidikan memberikan andil positif dibawah 0,01 persen, Andil negatif pada periode ini disumbangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen, serta kelompokperawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil dibawah 0,01 persen.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain cabai rawit (0,22 persen), angkutan udara (0,21 persen), minyak goreng (0,10 persen), bahan bakar rumah tangga (0,04 persen), pisang (0,04 persen), ikan selar (0,04 persen), cabai merah (0,04 persen), beras (0,04 persen), martabak (0,02 persen), dan aksesoris kendaraan (0,02 persen). Sedangkan beberapakomoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain telepon seluler (0,04 persen), jagung manis (0,04 persen), kangkung (0,02 persen), kol putih/kubis (0,01 persen), bawang merah (0,01 persen), sepatu wanita (0,01 persen), gaun/terusan wanita (0,01 persen), ikan asin teri (0,01 persen), ikan layang (0,01 persen), dan ikan bandeng (0,01 persen).

Tabel 2.27
Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Bulan Desember 2021

No.	Komoditas	Andil (%)	No.	Komoditas	Andil (%)
1	2	3	4	5	6
1	Cabai Rawit	0,22	1	Telepon Seluler	-0,04
2	Angkutan Udara	0,21	2	Jagung Manis	-0,04
3	Minyak Goreng	0,1	3	Kangkung	-0,02
4	Bahan Bakar Rumah Tangga	0,04	4	Kol Putih/Kubis	-0,01
5	Pisang	0,04	5	Bawang Merah	-0,01
6	Ikan Selar	0,04	6	Sepatu Wanita	-0,01

No.	Komoditas	Andil (%)	No.	Komoditas	Andil (%)
1	2	3	4	5	6
7	Cabai Merah	0,04	7	Gaun/Terusan Wanita	-0,01
8	Beras	0,04	8	Ikan Asin Teri	-0,01
9	Martabak	0,02	9	Ikan Layang	-0,01
10	Aksesoris Kendaraan	0,02	10	Ikan Bandeng	-0,01

Sumber : BPS 2022

B. Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Pengeluaran

1) Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1,78 persen yakni dari 112,52 pada bulan November 2021 menjadi 114,52 pada bulan Desember2021. Secara keseluruhan kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,48 persen. Kenaikan indeks harga tertinggi terjadi pada subkelompok makanan sebesar 2,24 persen, diikuti subkelompok minuman yang tidak beralkohol serta subkelompok rokok dan tembakau masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,18 persen.

2) Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,25 persen yakni dari 107,75 pada bulan November 2021 menjadi 107,48 pada bulan Desember 2021. Kelompok ini memberikan andil negatif terhadap inflasi sebesar 0,02 persen. Subkelompok alas kaki dan subkelompok pakaian mengalami penurunan indeks harga masing-masing sebesar 0,61 dan 0,17 persen.

3) Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,54 persen, yakni dari 104,40 pada bulan November 2021 menjadi 104,96 pada bulan Desember 2021. Kelompok ini memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,10 persen. Subkelompok listrik, dan bahan bakar rumah tangga dan subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan mengalami kenaikan indeks harga masing-masing sebesar 0,88 persen dan 0,87 persen, sedangkan subkelompok sewa dan kontrak rumah dan subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya relatif stabil.

4) Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,30 persen dari 104,96 pada bulan November 2021 menjadi 105,27 pada bulan Desember 2021. Kelompok ini memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,02 persen. Kenaikan indeks harga terjadi pada subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,71 persen. Sedangkan subkelompok peralatan rumah tangga mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,02 persen. Sementara subkelompok furnitur, perlengkapan dan karpet, subkelompok tekstil rumah tangga, subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum, dan subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun relatif tidak mengalami perubahan indeks harga.

5) Kesehatan

Kelompok kesehatan mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,24 persen yakni dari 110,43 pada November 2021 menjadi 110,70 pada Desember 2021. Kelompok ini menyumbangkan andil terhadap inflasi

sebesar 0,01 persen. Hanya subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan yang mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,56 persen, sedangkan subkelompok jasa rawat jalan, subkelompok jasa rawat inap serta subkelompok jasa kesehatanlainnya terpantau relatif stabil.

6) Transportasi

Kelompok transportasi mengalami kenaikan indeks harga tertinggi sebesar 1,80 persen yakni dari 105,54 pada bulan November 2021 menjadi 107,44 pada bulan Desember 2021. Kelompok ini menyumbangkan andil terhadap inflasi sebesar 0,24 persen. Kenaikan indeks harga terjadi pada subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 6,36 persen, diikuti subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,41 persen, dan subkelompook pembelian kendaraan sebesar 0,07 persen. Sementara subkelompok jasa pengiriman barang pada bulan ini relatif tidak mengalami perubahan.

7) Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,71 persen yakni dari 100,88 pada November 2021 menjadi 100,16 pada Desember 2021. Kelompok ini memberikan andil negatif terhadap inflasi sebesar 0,04 persen. Subkelompokperalatan informasi dan komunikasi serta subkelompok jasa keuangan mengalami penurunan indeks harga masing-masing sebesar 2,12 persen dan 0,95 persen, sementara itu subkelompoklayanan informasi dan komunikasi pada bulan ini relatif tidak mengalami perubahan.

8) Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1,14 persen yakni dari 105, 53 pada bulan November 2021 menjadi 106,73 pada bulan Desember 2021. Kelompok

ini menyumbangkan andil terhadap inflasi sebesar 0,02 persen. Kenaikan indeks harga hanya terjadi pada subkelompok koran, buku dan perlengkapan sekolah sebesar 2,44 persen, sementara subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga, subkelompok layanan rekreasi dan olahraga, serta subkelompok layanan kebudayaan terpantau relatif stabil.

9) Pendidikan

Kelompok pendidikan mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,03 persen, yakni dari 112,26 pada bulan November 2021 menjadi 112,29 pada bulan Desember 2021. Kelompok ini memberikan andil terhadap inflasi dibawah 0,01 persen. Hanya subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini yang mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,09 persen. Sementara subkelompok pendidikan menengah, subkelompok pendidikan tinggi, serta subkelompok pendidikan lainnya terpantau relatif stabil.

10) Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang dipengaruhi oleh subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,32 persen, yakni dari 115,13 pada bulan November 2021 menjadi 115,50 pada bulan Desember 2021. Kelompok ini memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,03 persen.

11) Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,01 persen, yakni dari 114,93 pada bulan November 2021 menjadi 114,92 pada bulan Desember 2021. Kelompok ini menyumbangkan andil terhadap inflasi dibawah 0,01 persen. Subkelompok perawatan pribadi mengalami penurunan indeks

harga sebesar 0,15 persen, sedangkan subkelompok perawatan pribadi lainnya mengalami kenaikan indeks sebesar 0,30 persen, sementara itu subkelompok jasa lainnya relatif tidak mengalami perubahan indeks harga.

C. Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mulai dihitung dan disajikan pada bulan Januari 2020. Inflasi gabungan dua kota selama bulan Desember 2021 adalah sebesar 0,84 persen, inflasi tahun kalender sebesar 2,20 persen, serta inflasi tahun ke tahun sebesar 2,20persen.

D. Perbandingan Inflasi Kota Palu dan Kota Luwuk

Pada bulan Desember 2021 Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,77 persen. Indeks harga konsumen (IHK) di Kota Palu mengalami kenaikan dari 108,58 pada November 2021 menjadi 109,42 pada Desember 2021. Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember2020 hingga Desember 2021 sebesar 2,14 persen.

Inflasi di Kota Palu disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,69 persen, diikuti oleh kelompok transportasi (1,67 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,38 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,56 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,36 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32 persen), kelompok kesehatan (0,28 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,03 persen). Penurunan indeks harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok pakaian dan alas kaki masing-masing sebesar 0,88 persen dan 0,35 persen. Sementara kelompok pendidikan terpantau relatif stabil.

Pada periode yang sama Kota Luwuk mengalami inflasi sebesar 1,05 persen. Indeks harga konsumen (IHK) di Kota Luwuk mengalami kenaikan dari 109,04 pada November 2021 menjadi 110,18 pada Desember 2021. Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2020 hingga Desember 2021 sebesar 2,48 persen.

Tabel 2.28
Perbandingan IHK dan Inflasi Kota Palu, Kota Luwuk serta Gabungan Dua Kota Menurut Kelompok Pengeluaran 2021

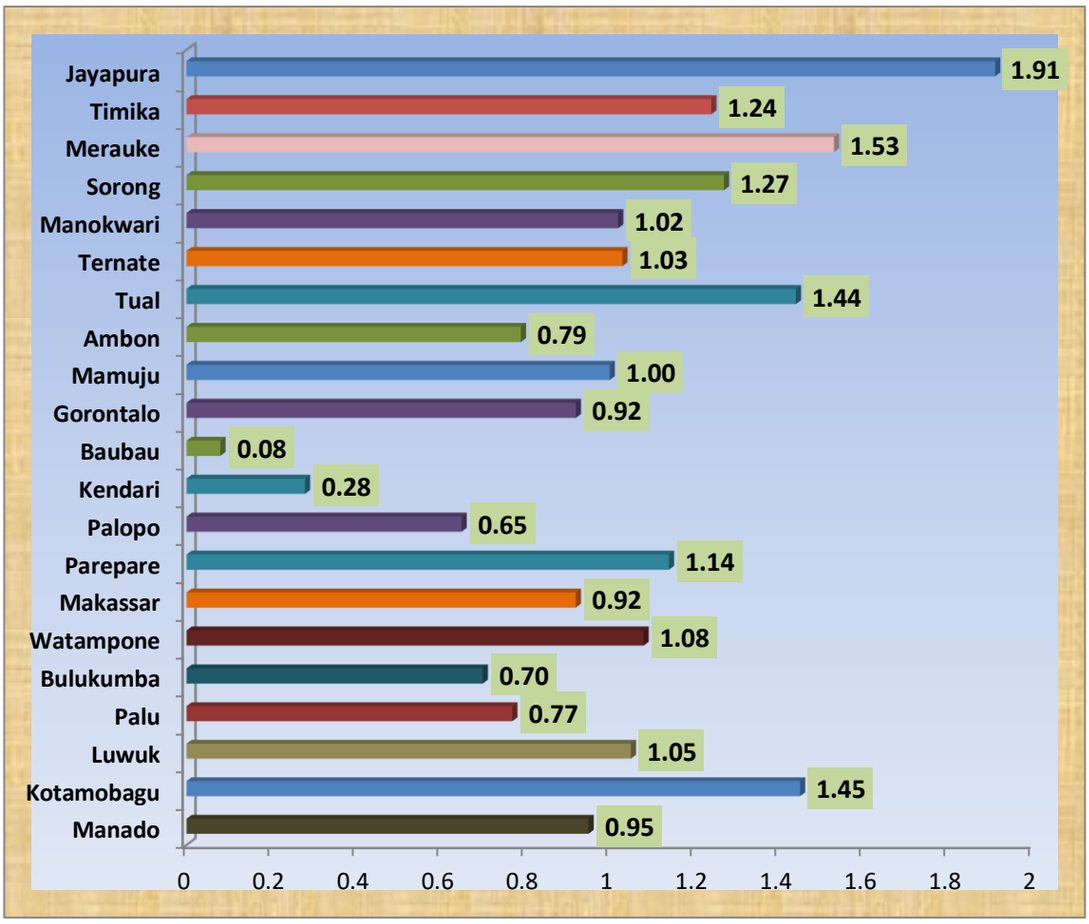
Kelompok Pengeluaaran	Kota Palu		Kota Luwuk		Gabungan 2 Kota	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
1	2	3	4	5	6	7
Umum	**109,42**	**0,77**	**110,18**	**1,05**	**109,57**	**0,84**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	114,20	1,69	115,55	2,03	114,52	1,78
Pakaian dan Alas Kaki	107,35	-0,35	107,96	0,11	107,48	-0,25
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Ru-mah Tangga	105,30	0,56	103,13	0,39	104,96	0,54
Perlengkapan, Peralatan, dan PemeliharaanRutin Rumah Tangga	105,66	0,36	104,02	0,07	105,27	0,30
Kesehatan	111,21	0,28	107,12	0,00	110,70	0,24
Transportasi	109,19	1,67	99,59	2,43	107,44	1,80
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,16	-0,88	100,16	-0,03	100,16	-0,71
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,15	1,38	104,74	0,01	106,73	1,14
Pendidikan	113,28	0,00	106,16	0,20	112,29	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	111,46	0,32	139,12	0,36	115,50	0,32
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	114,76	0,03	115,49	-0,13	114,92	-0,01

Inflasi di Kota Luwuk disebabkan oleh naiknya indeks harga kelompok transportasi sebesar2,43 persen, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau (2,03 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,39 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,36 persen), kelompok

pendidikan (0,20 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,11 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaanrutin rumah tangga (0,07 persen), dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,01 persen), Sementara itu penurunan indeks harga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,13 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,03 persen). Sedangkan kelompok kesehatan relatif tidak mengalami perubahan indeks harga.

E. Perbandingan Inflasi di Kawasan Sulampua dan Tingkat Nasional

Pantauan IHK nasional di 90 kota pantauan IHK nasional, sebanyak 88 kota mengalami inflasidan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,91 persen dan terendah di Kota Pekanbaru sebesar 0,07 persen. Kota Dumai mengalami deflasi tertinggi sebesar 0,13 persen, sementara Kota Bukittinggi mengalami deflasi terendah sebesar 0,04 persen. Kota Palu menempati urutan ke-34 inflasi di tingkat nasional dan urutan ke-17 di kawasan Sulampua, sementara Kota Luwuk menempati urutan ke-14 inflasi di tingkat nasional dan urutan ke-9 di kawasan Sulampua, seperti pada tabel berikut.



Sumber Data : BPS 2022

Gambar 2.15
Perbandingan Inflasi di Kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua, Desember 2021

Dari 88 kota di tingkat nasional yang mengalami inflasi selama Desember 2021, inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura 1,91 persen, diikuti oleh Kota Singaraja (1,70 persen), Merauke (1,53 persen), Kotamobagu (1,45 persen), Tual (1,44 persen), Tanjung Selor (1,31 persen), Pangkal Pinang dan Sorong (1,27 persen), Timika (1,24 persen), Sumenep (1,17 persen), Tanjung Pandan dan Pare-pare (1,14 persen), Watampone (01,08 persen), Luwuk (1,05 persen), Ternate (1,03 persen) serta kota-kota lainnya dengan inflasi dibawah 1,03 persen. Sementara 2 kota yang mengalami deflasi yakni Dumai (0,13 persen), dan Bukittinggi (0,04 persen).

Tabel 2.29
Indeks harga Konsumen, Inflasi Deseember 2021 dan Inflasi Tahun Kalender (%)

No.	Kota	IHK	Inflasi Desembe r2021 (%)	Inflasi Tahun Kalender (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Manado	108,56	0,95	2,65
2	Kotamobagu	109,51	1,45	2,51
3	Luwuk	110,18	1,05	2,48
4	Palu	109,42	0,77	2,14
5	Bulukumba	109,02	0,70	2,16
6	Watampone	106,68	1,08	2,26
7	Makassar	107,92	0,92	2,26
8	Parepare	108,74	1,14	4,09
9	Palopo	107,58	0,65	2,96
10	Kendari	108,49	0,28	3,05
11	Bau-Bau	105,92	0,08	1,05
12	Gorontalo	107,12	0,92	2,59
13	Mamuju	108,62	1,00	4,39
14	Ambon	109,79	0,79	4,05
15	Tual	110,34	1,44	3,45
16	Ternate	108,57	1,03	2,38
17	Manokwari	111,32	1,02	3,39
18	Sorong	107,45	1,27	3,49
19	Merauke	105,84	1,53	1,68
20	Timika	109,40	1,24	2,09
21	Jayapura	105,87	1,91	1,70

Sumber Data : BPS 2022

Dari 21 kota di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), selama Desember 2021 tercatat seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,91 persen, diikuti oleh Merauke (1,53 persen), Kotamobagu (1,45 persen), Tual (1,44 persen), Sorong (1,27 persen), Timika (1,24 persen), Parepare (1,14 persen), Watampone (1,08 persen), Luwuk (1,05 persen), Ternate (1,03 persen),

Manokwari (1,02 persen), Mamuju (1,00 persen), Manado (0,95 persen), Makassar dan Gorontalo (0,92 persen), Ambon (0,79 persen), Palu (0,77 persen), Bulukumba (0,70 persen), Palopo (0,65 persen), Kendari (0,28 persen), serta Baubau (0,08 persen).

2.1.2.1.5 Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui distribusi pendapatan masyarakat, yang direfresentasikan melalui indikator indeks gini atau koefisien gini. Nilai indeks gini berada diantara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks gini bernilai 0 maka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan indeks gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna.

a. Perkembangan Gini Ratio Maret 2016 - September 2020

Nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 - September 2020 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2018 hingga September 2019 nilainya mengalami sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan hingga September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,334 mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,339, dan stagnan dibanding Maret 2020 yang juga sebesar 0,334. Untuk daerah perdesaan, pada September 2020 Gini Ratio sebesar 0,295 naik 0,003 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,292 namun stagnan dibanding Maret 2020 di angka yang sama. Untuk

tahun 2021 Gini Ratio sebesar 0,326 meningkat 0,005 poin dari tahun sebelumnya, target 2021 sebesar 0,334-0,324 poin. Kondisi capaian tersebut telah mencapai target RKPD Tahun 2021.

b. Perkembangan Distribusi Pengeluaran September 2019 - September 2020

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2020 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 20,48 persen, maupun dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 20,62 persen.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan, meskipun masih pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 19,63 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 22,38 persen.

Tabel 2.30
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Tengah September 2019, Maret 2020, dan September 2020 (Persen)

DAERAH/TAHUN	PENDUDUK 40 PERSEN TERBAWAH	PENDUDUK 40 PERSEN MENENGAH	PENDUDUK 20 PERSEN ATAS	GINI RATIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
September 2019	18,10	42,05	39,85	0,339
Maret 2020	19,15	40,68	40,17	0,334
September 2020	19,63	39,10	41,27	0,334
Perdesaan				
September 2019	22,66	38,92	38,41	0,292
Maret 2020	22,37	38,88	38,74	0,295
September 2020	22,38	38,50	39,12	0,295
Perkotaan+Perdesaan				
September 2019	20,48	37,82	41,71	0,330
Maret 2020	20,62	38,00	41,38	0,326
September 2020	20,92	37,92	41,16	0,321

Sumber: BPS, Tahun 2021

c. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan

Faktor utama yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2020 adalah perubahan pengeluaran per kapita penduduk. Berdasarkan data Susenas, tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan yang lebih besar dibanding penduduk kelompok 40 persen terbawah. Pada kelompok penduduk 20 persen teratas penurunan tersebut mencapai 3,24 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah hanya menurun sebesar 1,16 persen. Secara distribusi juga tercatat bahwa porsi pengeluaran penduduk kelompok 20 persen teratas secara total mengalami

penurunan sebesar 0,22 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah justru meningkat 0,30 persen.

d. Gini Ratio Menurut Provinsi di Sulawesi pada September 2019 - September 2020

Selama periode September 2019 - September 2020, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah merupakan yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi, baik secara total maupun menurut kategori wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada skala nasional, posisi nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir relatif stagnan. Pada September 2019 nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-11 terendah se-Indonesia, sedangkan pada Maret 2020 posisi tersebut hanya naik satu peringkat ke posisi 10, dan bertahan hingga September 2020.

Dibanding dengan Gini Ratio nasional pada September 2020 sebesar 0,385, hanya Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang memiliki nilai Gini Ratio lebih tinggi. Kondisi ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan September 2019 maupun Maret 2020, dimana selain kedua provinsi tersebut, juga terdapat Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.31
Gini Ratio menurut Provinsi Se-Sulawesi September 2019, Maret 2020, dan September 2020

KODE	PROVINSI	SEPTEMBER 2019			MARET 2020			SEPTEMBER 2020		
		KOTA	DESA	K + D	KOTA	DESA	K + D	KOTA	DESA	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
71	SULAWESI UTARA	0,375	0,346	0,376	0,371	0,344	0,370	0,367	0,346	0,368
72	SULAWESI TENGAH	0,339	0,292	0,330	0,334	0,295	0,326	0,334	0,295	0,321
73	SULAWESI SELATAN	0,393	0,354	0,391	0,384	0,356	0,389	0,384	0,352	0,382
74	SULAWESI TENGGARA	0,402	0,353	0,393	0,404	0,347	0,389	0,403	0,348	0,388
75	GORONTALO	0,399	0,393	0,410	0,393	0,392	0,408	0,390	0,391	0,406
76	SULAWESI BARAT	0,438	0,32	0,365	0,436	0,321	0,364	0,437	0,321	0,356
	INDONESIA	**0,391**	**0,315**	**0,380**	**0,393**	**0,317**	**0,381**	**0,399**	**0,319**	**0,385**

Sumber: BPS, Tahun 2021.

2.1.2.1.6 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah

Adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi dimasing-masing wilayah/daerah merupakan salah satu pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun demikian, adanya perbaikan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang diejawantahkan melalui program dan kegiatan di masing-masing wilayah kabupaten/kota diharapkan mampu meminimalisir adaya ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Salah satu indikator makro yang lazim digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu kawasan adalah analisis Indeks Williamson (IW).

Disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 cenderung meningkat yang direfleksikan dengan meningkatnya nilai Indeks Williamson, yakni dari 0,50 poin pada Tahun 2016 menjadi 0,84 poin pada Tahun 2020. Untuk itu langkah yang penting ke depan dilakukan adalah *memanage pengeluaran fiscal* dengan baik, menata

dan mempertajam kembali program pembangunan kewilayahan, dengan demikian maka kesenjangan pembangunan antar-daerah dapat dipersempit.



Sumber: BPS 2022

Gambar 2.16
Perkembangan Nilai Indeks Williamson Sulawesi Tengah
Tahun 2016 – 2020

2.1.2.1.7 Perkembangan Penduduk Miskin

Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai

intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Upaya tersebut terus dilakukan seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral. Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Secara umum, pada periode Maret 2014 - September 2021 jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019. Setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali meningkat, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 12,18 persen telah melampaui target RKPD Tahun 2021 sebesar 13,50-15,00 persen dapat dilihat pada tabel berikut indek:

Tabel 2.32
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
1	2	3	4	5	6
2014 Maret	336 900	303 975	67,08	325,57	392,65
2014 September	349 978	321 009	71,65	315,41	387,06
2015 Maret	358 399	331 855	77,97	343,66	421,62
2015 September	376 496	353 080	79,25	327,09	406,34
2016 Maret	391 070	370 392	75,45	345,07	420,52

2016	September	399 413	376 658	75,9	337,25	413,15
2017	Maret	416 453	383 097	77,98	339,88	417,87
2017	September	430 728	400 639	81,56	341,72	423,27
2018	Maret	434 414	405 707	85,03	335,18	420,21
2018	September	437 697	418 035	83,84	329,65	413,49
2019	Maret	457 193	433 870	84,74	325,62	410,36
2019	September	481 436	460 187	81,46	322,57	404,03
2020	Maret	489 881	467 770	80,73	318,00	398,73
2020	September	492 758	478 687	87,43	316,31	403,74
2021	Maret	506 383	492 234	88,31	316,14	404,44
2021	September	516 374	500 351	86,67	294,54	381,21

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.33
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2014-2021

Tahun		Persentase Penduduk Miskin		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
1		2	3	4
2014	Maret	9,77	15,27	13,93
2014	September	10,35	14,66	13,61
2015	Maret	10,93	15,9	14,66
2015	September	11,06	15,07	14,07
2016	Maret	10,18	15,91	14,45
2016	September	10,07	15,48	14,09
2017	Maret	10,16	15,54	14,14
2017	September	10,39	15,59	14,22
2018	Maret	10,15	15,51	14,01
2018	September	9,50	15,41	13,69
2019	Maret	9,32	15,26	13,48
2019	September	8,90	15,01	13,18
2020	Maret	8,76	14,69	12,92
2020	September	9,21	14,76	13,06
2021	Maret	9,15	14,73	13,00
2021	September	8,82	13,71	12,18

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 9,15 persen turun menjadi 8,82 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 14,73 persen turun menjadi 13,71 persen pada September 2021.

Sementara jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah bahwa jumlah penduduk miskin yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong baik pada tahun 2020 sebesar 78,76 ribu jiwa atau 16,64 persen maupun pada tahun 2020 sebesar 78,76 ribu jiwa atau 15,85 persen, dan yang paling rendah adalah di Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11,09 ribu jiwa atau 14,60 persen, pada tahun 2021 Kabuapetn Parigi kembali menjadi Kabupaten yang tertinggi jumlah penduduk miskin sebesar 76,79 ribu jiwa atau 15,28 persen, dan yang paling rendah adalah Kabupaten Banggai Laut sebesar 10,92 ribu jiwa atau 14,17 persen, sehingga secara keseluruhan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 404.44 ribu jiwa atau 13.00 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 398,73 persen, atau 12,92 persen, selanjutnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5
Banggai Kepulauan	16,7	16,33	14,04	13,72
Banggai	28,16	30,1	7,39	7,83
Morowali	16,5	17,07	13,43	13,75

Poso	40,2	41,99	15,45	15,92
Donggala	53,17	51,23	17,39	16,73
Tolitoli	30,51	32,19	12,85	13,51
Buol	22,93	23,46	13,93	14,06
Parigi Moutong	78,76	76,79	15,85	15,28
Tojo Una-Una	25,43	25,86	16,39	16,6
Sigi	30,00	31,51	12,45	13,05
Banggai Laut	11,09	10,92	14,6	14,17
Morowali Utara	18,38	18,4	14,1	13,9
Palu	26,89	28,6	6,8	7,17
Sulawesi Tengah	**398,73**	**404,44**	**12,92**	**13,00**

Sumber: BPS, 2022

Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari peran dan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah serta para *stakeholder* dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Meski demikian kita tidak berhenti sampai disini, karena tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah masih diatas tingkat kemiskinan nasional.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, September 2019 – September 2021

TAHUN	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
1	2	3	4
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)			
2019 Maret	1,43	2,71	2,33
2019 September	1,98	3,71	3,19
2020 Maret	1,68	2,96	2,58

2020	September	1,83	3,2	2,78
2021	Maret	1,55	2,82	2,43
2021	September	1,48	2,59	2,24
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)				
2019	Maret	0,32	0,76	0,63
2019	September	0,54	1,41	1,15
2020	Maret	0,43	0,92	0,77
2020	September	0,43	1,07	0,87
2021	Maret	0,41	0,75	0,64
2021	September	0,43	0,7	0,62

Sumber: BPS, 2022

Pada periode Maret 2021-September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021 adalah 2,43 dan pada September 2021 turun menjadi 2,24. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,64 menjadi 0,62 pada periode yang sama. Begitu juga apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu September 2020-September 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan, dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2020 adalah 2,78 dan pada september 2021 adalah 2,24, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,87 menjadi 0,82 persen.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 2,82 sementara di daerah perdesaan jauh lebih rendah, yaitu 1,55. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,75 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,41.

Dengan demikian, maka diperlukan sebuah strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik, pemerintah, dunia usaha, perguruan tingggi, lembaga swadaya masyarakat setempat, maupun masyarakat miskin sendiri. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus kedepan di Sulawesi Tengah yaitu:

1) Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor)*
2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment)*
3) Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

2.1.2.2.1.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pembangunan di sektor pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Salah satu sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai misinya untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah. Adapun beberapa arah kebijakan di antaranya yaitu penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas yang semakin baik, penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah. Perbaikan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta akses

pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan pendidikan. Masalah yang masih terjadi saat ini yaitu tidak meratanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, akses pendidikan berkualitas yang merata menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021

KABUPATEN/KOTA	SD		SMP		SMA/SMK		PERGURUAN TINGGI	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Banggai Kepulauan	137	136	65	64	38	39	1	2
Banggai	297	296	131	126	77	77	2	3
Morowali	127	124	48	45	27	23	2	2
Poso	168	167	78	80	34	34	5	6
Donggala	167	164	108	103	48	45	–	–
Tolitoli	110	110	72	72	38	38	5	5
Buol	113	108	67	65	24	23	2	2
Parigi Moutong	268	268	127	127	70	71	3	3
Tojo Una-Una	141	140	59	61	28	29	–	1
Sigi	174	172	83	82	42	38	4	4
Banggai Laut	65	65	39	39	21	20	–	–
Morowali Utara	121	121	49	47	19	20	–	–

Palu	46	46	35	34	38	37	13	13
SULTENG	**1.934**	**1.917**	**961**	**945**	**504**	**494**	**37**	**41**

Sumber: BPS, Tahun 2021

Sampai dengan Tahun 2021 fasilitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi sudah hampir merata disemua Kabupaten/Kota, walaupun masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum memiliki Perguruan Tinggi yaitu Kabupaten Donggala, Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara, dan Perguruan Tinggi yang terbanyak selain Kota Palu yang memang merupakan Ibu Kota Provinsi yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tolitoli masing – masing memiliki 5 Perguruan Tinggi.

2.1.2.2.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, yakni melalui Angka Partisipasi Kasar (APK).

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkatpendidikantertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitandengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Capaian APK SD di Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 sebesar 103,65 persen, sementara capaian APK SMP sebesar 93,17 persen dan capaian APK SMA sebesar 88,06 persen, dapat ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 2.37
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5
SD/MI/Sederajat	93,24	93,33	103,95	103,68
SMP/MTs/ Sederajat	74,42	74,99	91,98	93,17
SMA/SMK/MA/Sederajat	65,02	65,44	88,42	88,06

Sumber: BPS, 2022.

Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2021 capaian APK SD tertinggi terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 106,89 persen dan terendah terdapat di Kabupaten Tolitoli sebesar 95,54 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terapdate yaitu Kabupaten Banggai dan Kota Palu, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan serta Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
		SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat
1	2	6	7	8
1.	PALU	-	-	-
2.	SIGI	103,37	92,39	82,92
3.	DONGGALA	107,78	92,46	76,89
4.	PARIGI MOUTONG	100,56	89,94	87,43
5.	POSO	103,58	97,58	91,87
6.	TOJO UNA-UNA	106,89	79,26	87,93
7.	BANGGAI	-	-	-
8.	BANGGAI KEPULAUAN	110,21	79,77	78,56
9.	BANGGAI LAUT	97,97	107,64	80,97
10.	MOROWALI	109,42	102,31	83,39
11.	MOROWALI UTARA	98,3	101,7	87,43
12.	BUOL	110,00	89,08	78,79
13.	TOLITOLI	95.54	91.91	83.67

Sumber: BPS dan Dikjar Provinsi Sulteng 2021

Capaian APK SMP pada Tahun 2021 tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebesar 107,64 persen dan terendah di

Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 79,26 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terapdate yaitu Kabupaten Banggai dan Kota Palu.

Pada jenjang SMA Tahun 2021, capaian APK tertinggi terdapat di Kabupaten Poso sebesar 91,87 persen dan terendah di Kabupaten Donggala sebesar 76,89 persen, namun terdapat 2 (dua) Kabupaten yang datanya tidak terapdate yaitu Kabupaten Kabupaten Banggai dan Kota Palu.

2.1.2.2.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Sama halnya APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM ini melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, atau dengan perkataan lain APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Capaian APM pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 sesuai jenjang pendidikan yaitu APM SD/MI yang tertinggi terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 98,86 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong sebesar 90,83 persen, sementara capaian APM SMP/MTs pada yang tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara sebesar 84,73 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Tolitoli sebesar 64,24 persen, sedangkan capaian APM SMA/MA/SMK yang

tertinggi terdapat di Kabupaten Morowali Utara sebesar 71,16 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Tolitoli sebesar 56,29 persen, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	Angka Partisipasi Murni (APM)		
		SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/Sederajat
1	2	3	4	5
1.	PALU	-	-	-
2.	SIGI	93,5	75,84	58,82
3.	DONGGALA	94,08	78,44	61,17
4.	PARIGI MOUTONG	90,83	73,43	66,69
5.	POSO	93,92	78,7	69,49
6.	TOJO UNA-UNA	98,86	71,00	63,31
7.	BANGGAI	-	-	-
8.	BANGGAI KEPULAUAN	97,96	68,86	61,3
9.	BANGGAI LAUT	86,18	71,48	61,98
10.	MOROWALI	95,07	73,23	69,71
11.	MOROWALI UTARA	90,77	84,73	71,16
12.	BUOL	97,55	76,00	62,52
13.	TOLITOLI	91.53	64.24	56.29

Sumber: BPS, 2022.

2.1.2.2.2 Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia yang diatur di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.

Secara substansi, pemerintah maupun pemerintah daerah telah berupaya secara optimal dalam membangun derajat kesehatan masyarakat melalui sinergitas kebijakan pembangunan kesehatan yang diejawantahkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian kinerja pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa perkembangan indikator kesehatan, antara lain: Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Persentase Balita Gizi Buruk.

Selama periode Tahun 2016-2020, perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat yakni dari 67,31 tahun pada Tahun 2016 menjadi 68,75 tahun pada Tahun 2020. Sementara perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada periode 2016-2017 cenderung menurun, yakni dari 83,59 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2016 meningkat menjadi 213,44 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 menurun menjadi 153,88 Per 100.000 Kelahiran Hidup, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 213,41 Per 100.000 Kelahiran Hidup, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 131,24 Per 100.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) selama periode Tahun 2016-2020 berfluktiasi yakni dari 12,79 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2016 menurun menjadi 11,85 per 100.000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2017, pada tahun 2018 menurun menjadi 8,77 per 100.000 Kelahiran Hidup, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,94 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 8,21 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sementara Angka Kematian Balita (AKABA) pada periode yang sama pergerakannya berfluktuasi yakni pada Tahun 2016 sebesar 13,52 per 1000 Kelahiran Hidup, Tahun 2017 sebesar 0,49 per 1000 Kelahiran Hidup, Tahun 2018 sebesar 0,63 per 1000 Kelahiran Hidup, pada tahun 2019 menjadi 1,10 per 1000 Kelahiran Hidup, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 0,62 per 1000 Kelahiran Hidup.

Perkembangan persentase balita gizi buruk selama periode 2016-2020, menunjukkan *trend* yang membaik, yakni dari 0,16 persen pada Tahun 2016 berkurang sedikit menjadi 0,15 persen pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 14,16 persen, namun pada tahun 2019 menurun menjadi 10,83 persen, namun pada tahun 2020 kembali sedikit meningkat menjadi 11,54 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019

No.	Indikator Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,31	67,32	67,78	68,23	68,75
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	83,59	213,44	153,88	213,41	131,24
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	12,79	11,85	8,77	9,94	8,21
4	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	13,52	0,49	0,63	1,10	0,62
5	Persentase Balita Gizi	0,16	0,15	14,16	10,83	11,54

	Buruk (%)					

Sumber: BPS dan Dinkesda Provinsi Sulteng, 2021.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kekayaan seni dan kebudayaan Sulawesi Tengah yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota merupakan asset yang sangat penting nilainya bagi pengembangan dan pembangunan di Sektor Pariwisata. Seni dan budaya ini antara lain berupa tarian tradisional, berbagai macam seni rupa dan seni musik tradisional.

Perkembangan jumlah grup kesenian di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2015-2018 mengalami peningkatan yakni dari 259 sanggar seni pada Tahun 2015 menjadi 265 sanggar seni pada Tahun 2018, sementara jumlah gedung kesenian dari 4 unit pada Tahun 2015 meningkat menjadi 5 unit pada Tahun 2018.

Di bidang pemuda dan olah raga, jumlah gedung olahraga yang terdapat di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2015-2018 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 0,06 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2014 - 2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2015	2016	2017	2018
1	Kebudayaan				
	- Jumlah grup kesenian (sanggar)	259	261	265	265
	- Jumlah gedung	4	5	5	5
2	Pemuda dan Olahraga				
	Jumlah gedung olahraga (per 10.000 penduduk)	0,06	0,06	0,06	0,06

Sumber: Disbudpar dan Dispora Daerah Provinsi Sulteng, 2019.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

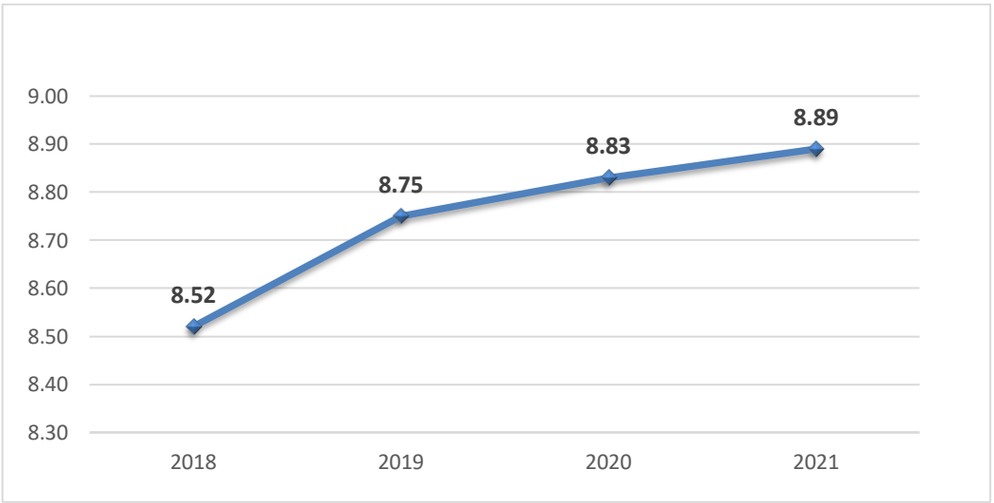
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang

berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu pembangunan atau investasi dibidang pendidikan dan kesehatan menempati posisi urgen dalam skala prioritas pembangunan daerah harus terus ditingkatkan.

Di bidang pendidikan, peningkatan sumber daya manusia lebih diutamakan dengan memberi kesempatan kepada penduduk usia sekolah, dimana luasnya wilayah yang harus dijangkau merupakan faktor yang cukup berpengaruh disamping faktor-faktor lainnya dalam menjalankan program-program pendidikan yang berimplikasi terciptanya SDM yang handal dan siap bersaing di era globalisasi.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan secara kontinyu mengalami perbaikan yang cukup nyata, hal ini terlihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia, pada tahun 2020 Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 8,83 Tahun naik menjadi sebesar 8,89 Tahun pada Tahun 2021 atau meningkat sebesar mencapai 0,06 Point sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



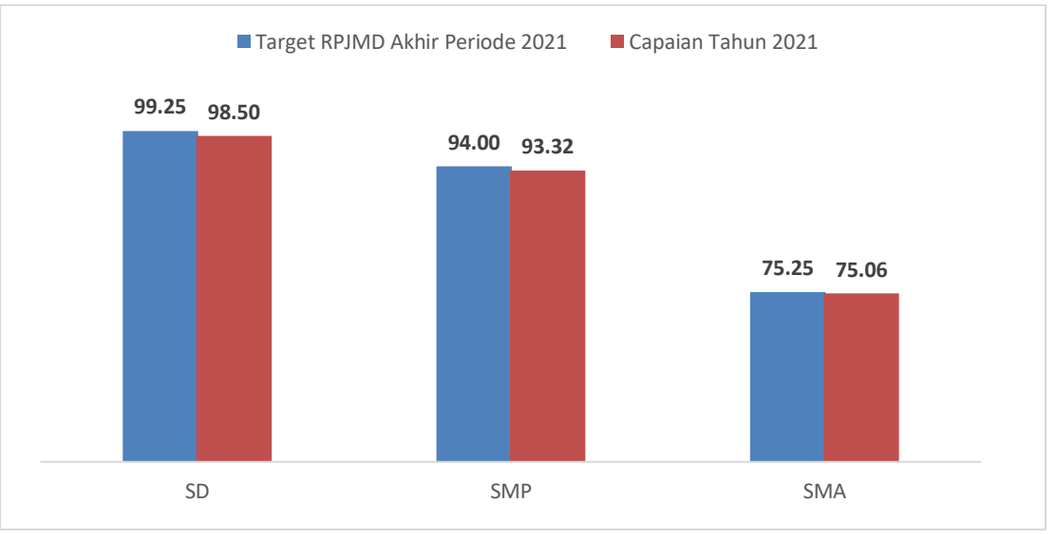
Sumber : BPS Prov. Sulteng 2022

Gambar 2.17

Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021

Indikator selanjutnya yaitu Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 Tahun keatas, hingga akhir Tahun 2021 telah mencapai 98,11 persen atau melampaui target RPJMD pada akhir periode Tahun 2021 yaitu sebesar 96,50 persen, hal ini menggambarkan bahwa semakin tingginya minat dan perhatian masyarakat dalam pendidikan formal maupun informal.

Indikator penting lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menunjukkan pencapaian masih di bawah target RPJMD Akhir RPJMD Tahun 2021, dimana untuk target Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Tahun 2021 yaitu sebesar 99,25 persen dengan capaian sebesar 98,50 persen, APS SMP/MTs dari target 94,00 persen realisasi mencapai sebesar 93,32 persen dan untuk APS SMA/MA/SMK capaian sebesar 75,06 persen dari target RPJMD sebesar 75,25 persen seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber : Bappeda Sulteng (data diolah kembali), 2022

Gambar 2.18
Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah
(APS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi untuk Capaian Indikator kinerja Program (Outcomes) urusan Pendidikan antara lain dapat dilihat pada 6 (enam) capaian indikator yaitu; 1) indikator meningkatnya persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 100,00 persen terealisasi sebesar 100,00 persen, 2) indikator Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus dari target 100,00 persen realisasi sebesar 45,00 persen, 3) indikator meningkatnya persentase terlaksananya pemenuhan pengembangan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK) dan jenjang pendidikan khusus dari target 100,00 persen realisasi sebesar 45,00 persen, 4) indikator meningkatnya persentase pemerataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari target 100,00 persen realisasi hingga semester I tahun 2021 sebesar 35,00 persen, 5) indikator meningkatnya persentase terlaksananya pengendalian perizinan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat dari target 100,00 persen realisasi hingga semester I tahun 2021 sebesar 45,00 persen, dan 6) indikator meningkatnya persentase terlaksananya pengembangan bahasa dan sastra daerah dari target 100,00 persen realisasi hingga semester I tahun 2021 sebesar 40,00 persen, sebagaiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Capian Indikator Kinerja Program (Outcomes)
Urusan Pendidikan Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Tingkat Capaian (%)

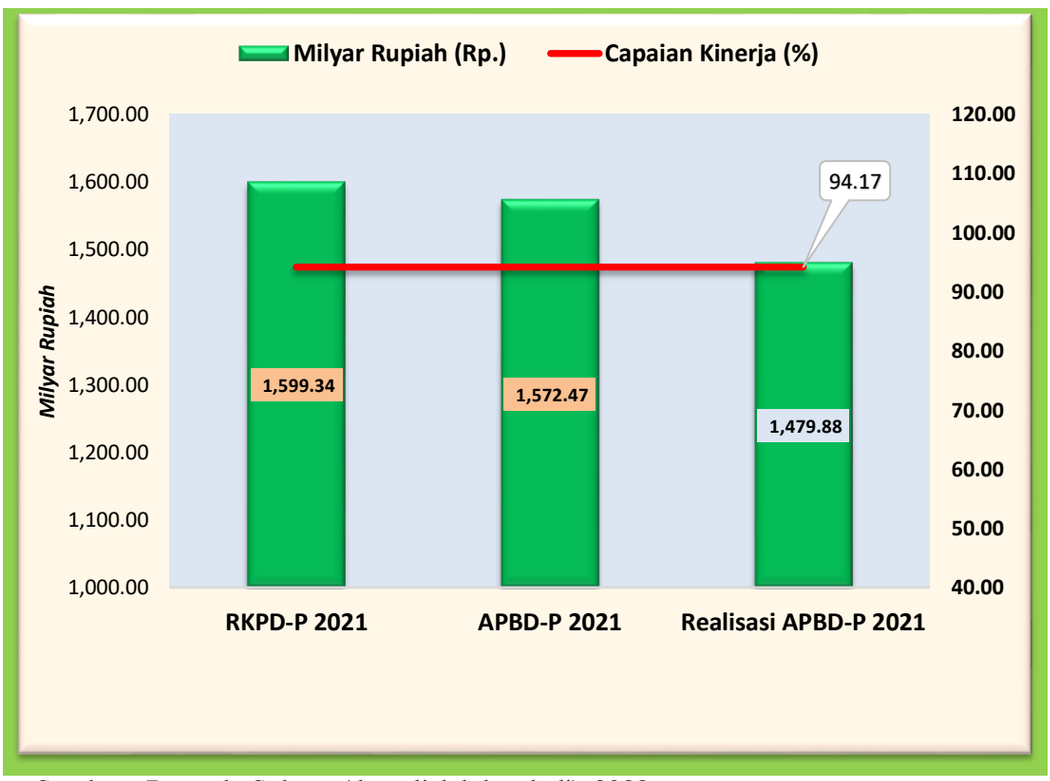
Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2021	Capaian 2021	Tingkat Capaian (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada DISDIKBUD	100	100	100
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100	75	75
3. Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100	95	95
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100	95	95
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pengendalian Perizinan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat	100	100	100
6. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Meningkatnya Persentase Terlaksananya Pengembangan Bahasa Dan Sastra Daerah	100	100	100

Sumber Bappeda Prov. Sulteng 2022 (data diolah Kembali)

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Bidang Pendidikan Tahun 2022, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran pada RKPD-P Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.599.335.984.724, menjadi sebesar Rp. 1.572.466.624.680, pada Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2021 dengan tingkat Capaian keuangan sebesar 98,32 persen, yang berarti terjadi deviasi sebesar 1,68 persen atau mengalami penurunan sebesar Rp. 26.869.360.044 terhadap target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2021. Sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.479.882.458.127 atau

mencapai sebesar 94,11 persen dengan nilai silpa sebesar Rp. 92.584.166.553.

Berdasarkan hasil Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Bidang Pendidikan pada Tahun 2021 Secara umum rata-rata tingkat capaian kinerja program (outcomes) mencapai sebesar 94,17 persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.



Sumber : Bappeda Sulteng (data diolah kembali), 2022

Gambar 2.19
Target dan Alokasi Anggaran (Milyar Rp.)
Serta Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2021

2.1.3.1.2 Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 dapat dilihat dari perkembangan indikator kesehatan pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016 – 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA BIDANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000)	13,8	14,00	11,22	14,2	14,2
2.	Rasio puskesmas per satuan penduduk (per 1000)	0,06	0,06	0,09	0,03	0,03
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1000)	0,0099	0,0107	0,0116	0,0124	0,0126
4.	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 1000)	0,027	0,026	0,028	0,035	0,041
5.	Rasio tenaga medis (bidan/perawat) persatuan penduduk (per 1000)	3,27	3,85	4,21	3,62	3,61

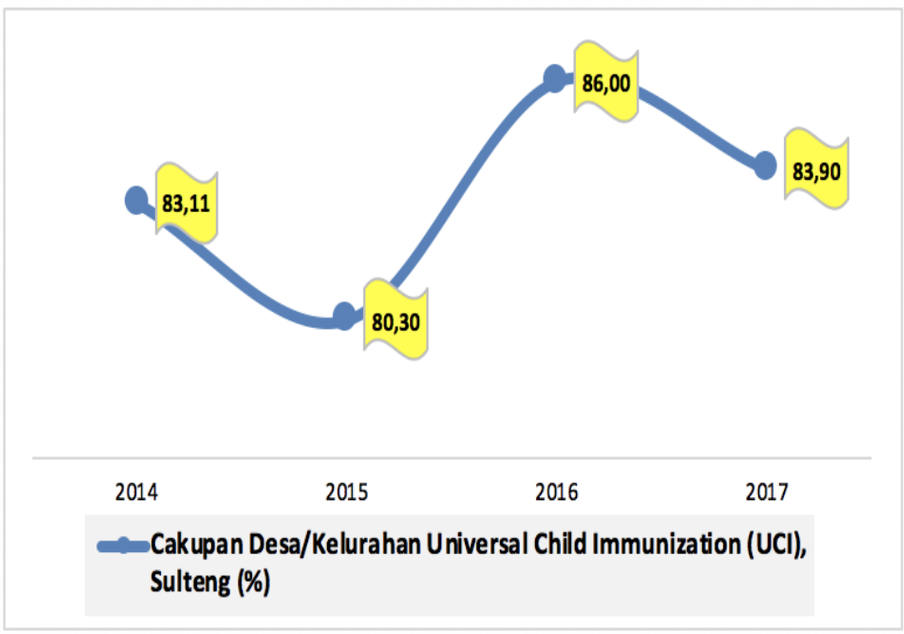
Sumber : Dinas Kesehatan, 2021 (Data diolah kembali).

Pada tabel diatas menunjukkan perkembangan indikator kinerja kesehatan di Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 sebagai berikut.

- Perkembangan rasio posyandu per satuan balita cenderung menurun, yakni dari 13,8 per 1000 balita pada Tahun 2016 menjadi 14,2 per 1000 balita pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio puskesmas per satuan penduduk mengalami penurunan yakni dari 0,06 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 0,03 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio rumah sakit per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 0,0099 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 0,0126 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.

- Perkembangan rasio dokter per satuan penduduk cenderung meningkat yakni dari 0,027 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 0,041 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.
- Perkembangan rasio tenaga medis (perawat/bidan) per satuan penduduk cenderung meningkat, yakni dari 3,27 per 1000 penduduk pada Tahun 2016 menjadi 3,61 per 1000 penduduk pada Tahun 2020.

Selanjutnya, perkembangan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2014-2017 cenderung fluktuatif, yakni pada Tahun 2014 sebesar 83,11 persen menurun menjadi 80,30 persen pada Tahun 2015, pada Tahun 2016 cakupan desa/kelurahan UCI meningkat menjadi 86,0 persen, selanjutnya menurun menjadi 83,90 persen pada tahun 2017.

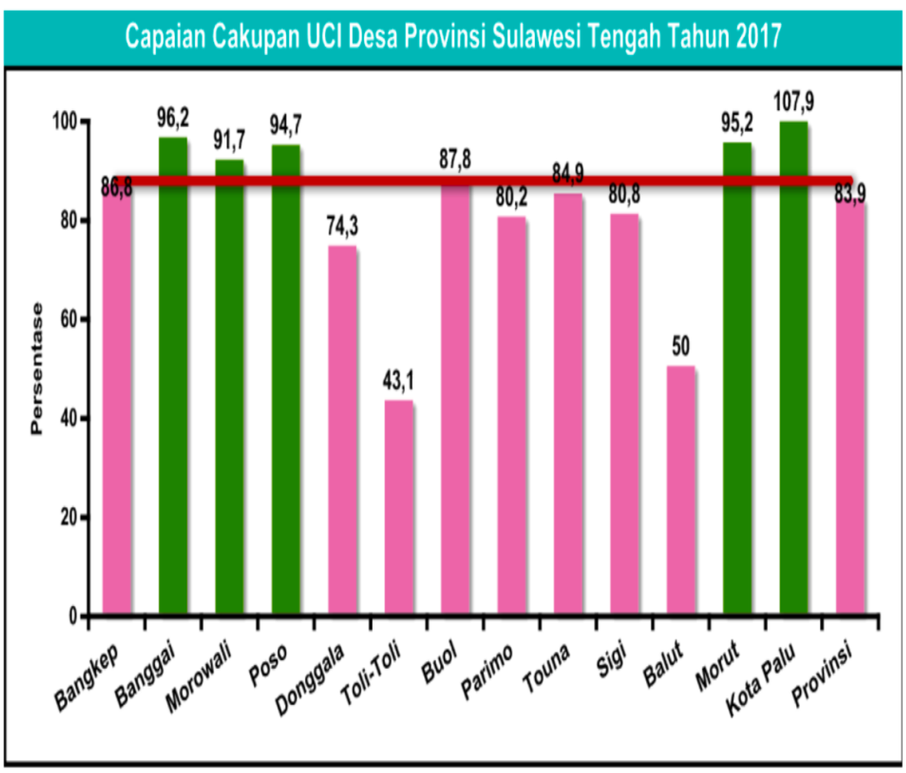


Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Gambar 2.20
Perkembangan Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 - 2017

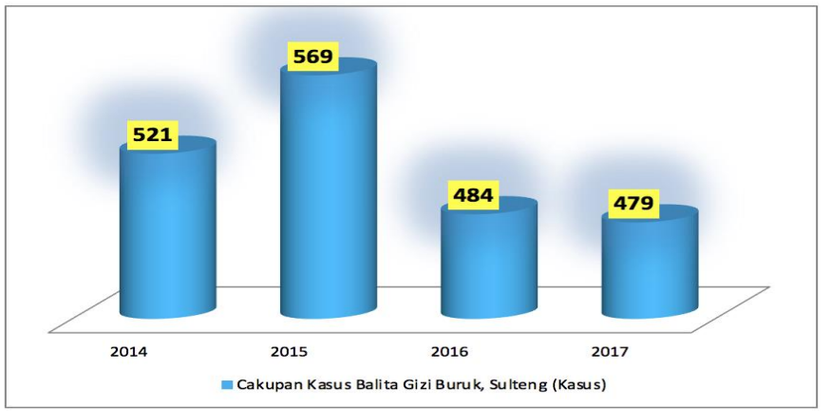
Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2017 capaian cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 107,9 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Tolitoli sebesar 43,1 persen. Dari 13 Kabupaten/Kota, terdapat 5 kabupaten/Kota yang mencapai terget yaitu Kabupaten Banggai (96,2%), Kabupaten Morowali (91,7%), Kabupaten Poso (94,7%), Kabupaten Morowali Utara (95,2%) dan Kota Palu (107,9%).



Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Gambar 2.21
Capaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten/Kota Tahun 2017

Sedangkan jumlah kasus balita gizi buruk di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebanyak 479 kasus, menurun dibanding dengan Tahun 2016 yang sebesar 484 kasus.



Sumber: Dinkesda Provinsi Sulteng, 2018.

Gambar 2.22
Perkembangan Jumlah Kasus Gizi Buruk
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014–2017

2.1.3.1.2.1 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan kesehatan reproduksi keluarga. Disamping itu melalui program KB juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga

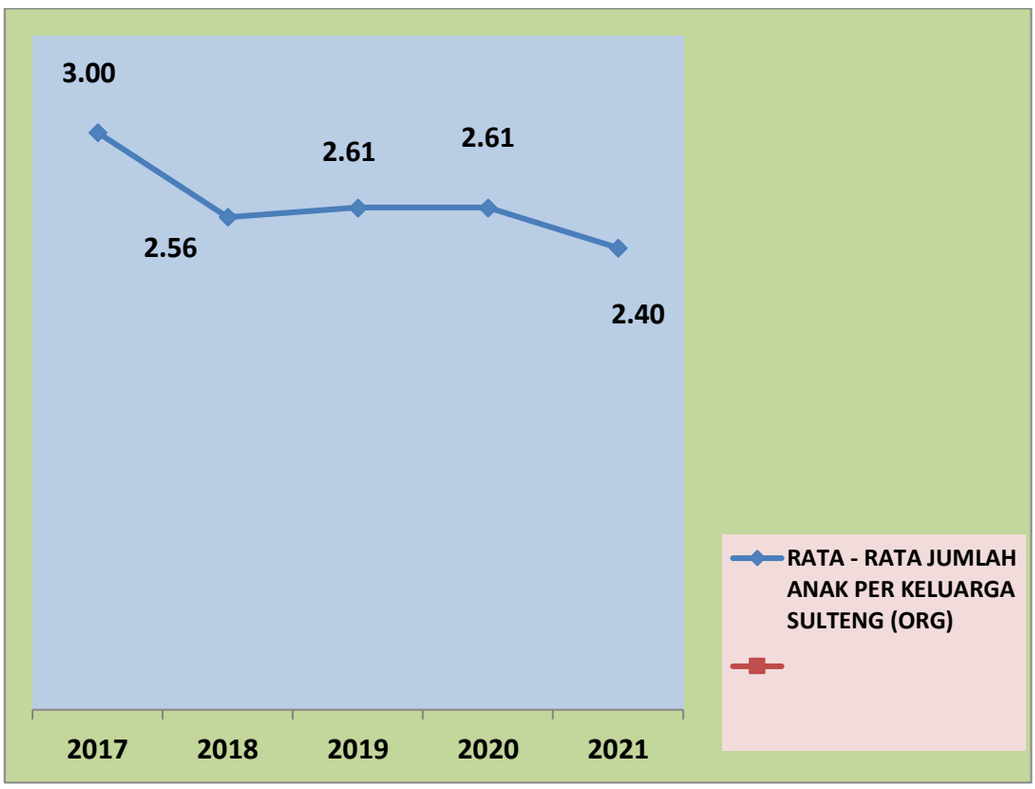
(kelompok masyarakat miskin), peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat.

Perkembangan pelaksanaan program KB di Sulawesi Tengah dapat dilihat dari beberapa indiktor pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Jumlah Anak per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Perserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2017 – 2021

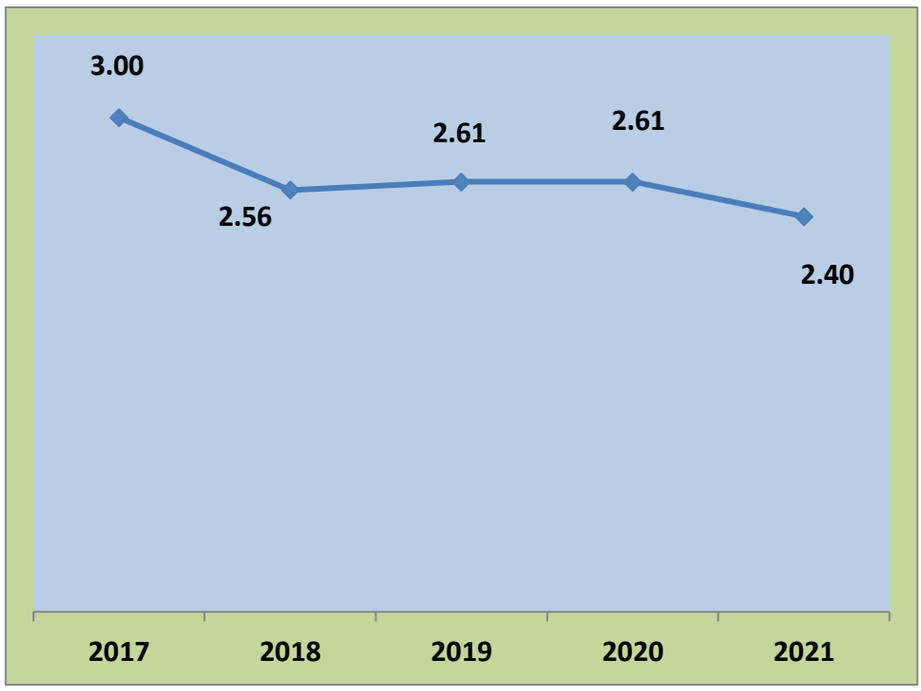
NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	RASIO AKSEPTOR KB SULTENG (%)	26,79	9,99	11,23	12,22	14,66
2	CAPAIAN PESERTA KB AKTIF SULTENG (%)	73,00	76,99	78,53	76,45	13,00
3	RATA - RATA JUMLAH ANAK PER KELUARGA SULTENG (ORG)	3	2,56	2,61	2,61	2,4

Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2022.



Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2022.

Gambar 2.23
Perkembangan Jumlah Anak per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Perserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2017 – 2021



Sumber: BKKBN Provinsi Sulteng dan BPS, 2021.

Gambar 2.24
Perkembangan Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga di Provinsi Sulawesi Tengah (Orang)
Tahun 2017 – 2021

Terlihat bahwa perkembangan rata-rata jumlah anak per keluarga sepanjang periode Tahun 2017-2021, sebanyak 3 anak per keluarga. Sementara rasio akseptor KB diantara pasangan usia subur pada Tahun 2017 sebesar 26,79 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2018 hanya sebesar 9,99 persen, pada tahun 2019 kembali naik sebesar 11,23 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 12,22 persen, dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 14,66 persen, Sedangkan pada cakupan peserta KB aktif pada Tahun periode tahun 2017-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 kembali menurun dari 76,45 manjadi 13,00 persen.

2.1.3.1.3 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan dan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang sangat berarti. Bahkan saat ini UKM menjadi ujung tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Perkembangan koperasi yang aktif, Usaha Mikro Kecil dan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Suawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.45
Banyaknya Koperasi menurut Status Keaktifan Koperasi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Kabupaten/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	2	3	4
Lingkup Provinsi	56	35	91
Kabupaten Banggai Kepulauan	76	21	97
Kabupaten Banggai	139	40	179
Kabupaten Morowali	55	95	150
Kabupaten Poso	234	125	359
Kabupaten Donggala	61	75	136
Kabupaten Tolitoli	79	100	179
Kabupaten Buol	35	191	226
Kabupaten Parigi Moutong	222	9	231
Kabupaten Tojo Una-Una	41	27	68
Kabupaten Sigi	66	14	80
Kabupaten Banggai Laut	24	33	57
Kabupaten Morowali Utara	39	82	121
Kota Palu	89	130	219

Jumlah	**1.216**	**977**	**2.193**

Sumber: BPS 2022

Jumlah koperasi menurut status keaktifan di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebanyak 2.193, yang aktif sebanyak 1.216 dan yang tidak aktif sebanyak 977, melihat data tersebut bahwa secara persentase pada tahun 2021 sebanyak 44,55 persen koperasi di Sulawesi Tengah berstatus tidak aktif.

Selanjutnya terlihat bahwa jumlah persentase koperasi yang aktif di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebesar 55,45 persen. Sementara perkembangan usaha mikro kecil dan kecil pada Tahun 2021 sebesar 97,50 persen menurun sedikit jika dibandingkan pada tahun 2020 szebesar 99,42 persen, sedangkan jumlah Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 725.143 unit usaha jika dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 721.643 unit, sementara Jumlah BPR/LKM dari tahun 2021 sebanyak 72 unit, hanya mengalami kenaikan 1 unit jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 71 unit, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Perkembangan Jumlah Koperasi UKM non BPR/LKM UKM (Unit) dan BPR/LKM (Unit) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2021

NO.	URAIAN	Target Indikator Kinerja Daerah		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Koperasi aktif	65,72	65,78	55,45	55,20	84,38	83,92
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	721.643	725.143	343.244	343.286	47,56	47,34
3.	Jumlah UKM BPR/LKM aktif	71	72	71	72	100,00	100,00
4.	Persentase Usaha Mikro dan kecil	97,07	97,10	99,42	97,50	102,42	100,41

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2022

Untuk melihat gambaran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dapat dilihat antara lain pada rasio capaian tahun 2021 dimana rasio capaian dari jumlah UKM non BPR/LKM aktif sebanyak 47,34 persen, sedangkan jumlah UKM BPR/LKM aktif dengan rasio capaian sebanyak 100,00 persen dan Usaha Mikro dan Kecil melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 100,41 persen.

Sementara terkait dengan gambaran capaian kinerja utama (IKU) Bidang Koperasi, UKM Tahun 2021 dapat dilihat antara lain pada capaian indikator Jumlah Koperasi berkualitas dari target 10 persen dapat terealisasi sebesar 26 persen dengan tingkat capaian sebesar 260,00 persen, indikator Peningkatan Usaha Kecil yang naik kelas dari target 3 unit dapat terealisasi sebanyak 3 unit usaha dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen, indikator selanjutnya yaitu jumlah angkatan diklat perkoperasian dari target 13 angkatan dapat terealiasi sebanyak 17 angkatan atau melampaui target RKPD dengan persentase capaian sebesar 131 persen, dan jumlah angkatan diklat umkm dari target 17 angkatan hanya dapat terealisasi sebanyak 15 angkatan atau masih di bawah target RKPD dengan persentase capaian sebesar 88,24 persen. Gambaran capaian seluruh Indikator Kinerja Program (Outcomes) Urusan Koperasi dan UMKM pada Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

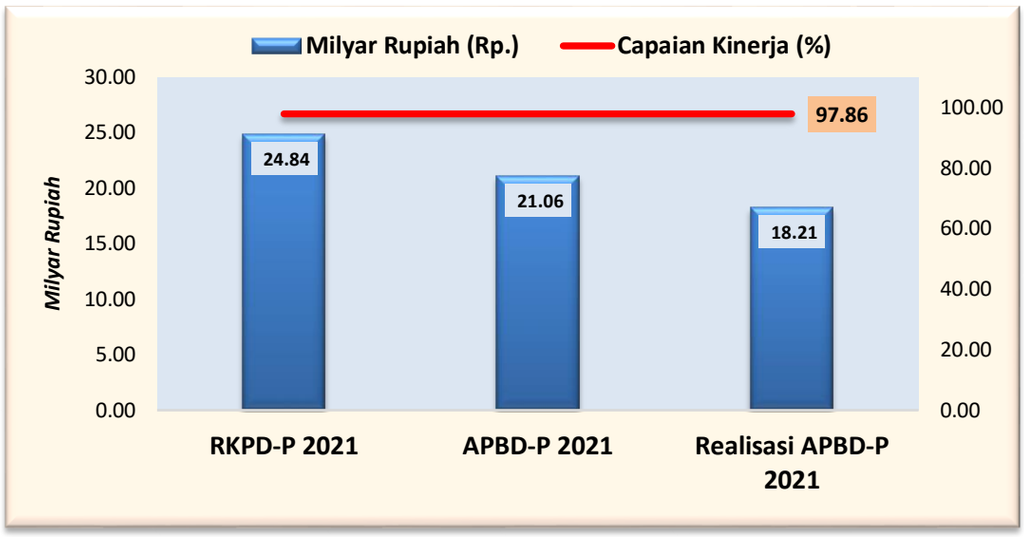
Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bidang Koperasi, UKM Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target RKPD 2021	Realisasi RKPD 2021	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	100,00
2	Jumlah Koperasi Berkualitas (%)	10	26	260,00
3	Jumlah Usaha Kecil yang Naik Kelas (unit)	3	3	100,00
4	Jumlah Diklat Perkoperasian (angkatan)	13	17	130,77
5	Jumlah Diklat UMKM (angkatan)	17	15	88,24

Sumber : Bappeda Sulteng (data diolah kembali), 2022

Dari hasil persandingan/konsistensi perencanaan penganggaran pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021, dapat diketahui bahwa penetapan pagu anggaran pada RKPD-P Tahun 2021 sebesar Rp. 24.841.848.676, menjadi Rp. 21.059.065.026 pada APBD-P Tahun 2021, yang berarti terjadi deviasi sebesar 15,23 persen atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3.782.783.650 terhadap Target Pagu Anggaran RKPD-P Tahun 2021. Sedangkan untuk realisasi keuangan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 18.214.693.905 atau mencapai sebesar 86,49 persen dengan nilai silpa sebesar Rp. 2.844.371.121.

Selanjutnya berdasarkan Matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, diketahui bahwa Tingkat Capaian Keuangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara umum mencapai 84,77 persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian keuangan berkategori 'Tinggi'. Sedangkan untuk tingkat capaian Kinerja RKPD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2021 secara umum mencapai 110,63 persen dengan kriteria penilaian realisasi capaian kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2022 (data diolah kembali)

Gambar. 2.25
Target dan Alokasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Koperasi dan UMKM Hidup Tahun 2021

2.1.3.1.4 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mensukseskan program/kegiatam pemberdayaan masyarakat baik program nasional maupun program yang dibangun melalui pemerintah daerah sangat dibutuhkan kesiapan institusi/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di daerah.

Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah kelompok binaan LPM di Sulawesi Tengah tidak mengalami perubahan sebanyak 1.842 lembaga. Dari jumlah binaan LPM tersebut, yang menjadi LPM berprestasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami perubahan sebanyak 12 LPM, namun jumlah LPM berprestasi tidak terdapat pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Perkembangan Kelompok Binaan LPM dan LPM Berprestasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	KELOMPOK LPM	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
2	LPM BERPRESTASI	12	12	12	12	0

Sumber: BPPMD Provinsi Sulteng, Tahun 2021.

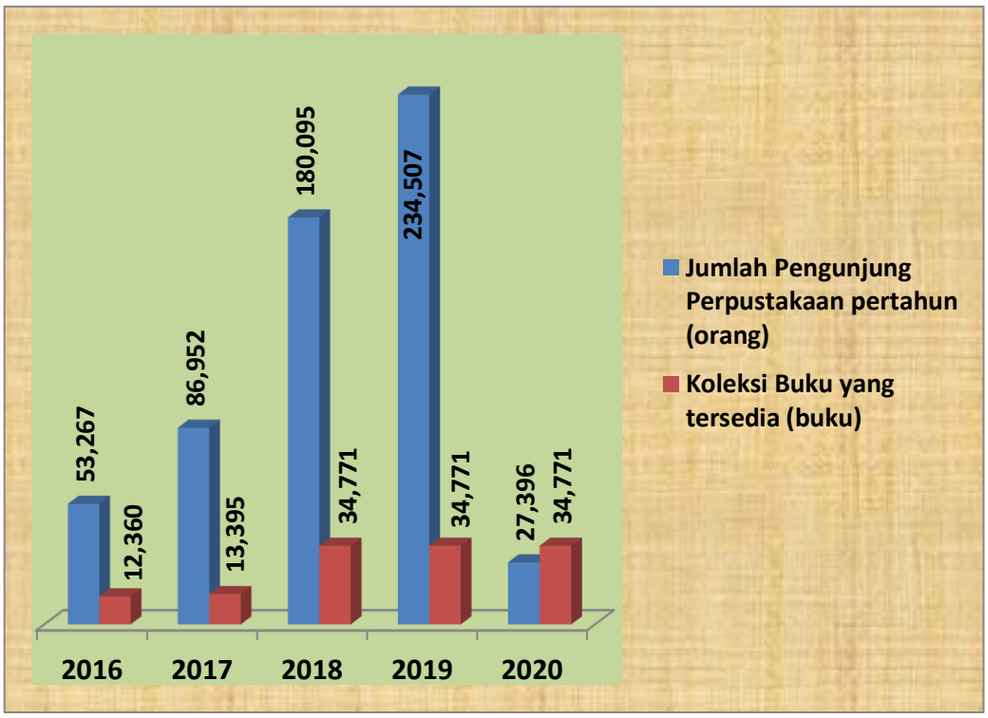
2.1.3.1.5 Kebudayaan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Sulawesi Tengah dan sekaligus sebagai pendorong perekonomian daerah. Untuk itu potensi pariwisata, seni dan budaya perlu terus untuk dikembangkan dan dipasarkan melalui kegiatan promosi, baik dalam negeri maupun manca negara.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 sebanyak 17 kali, dengan jumlah sarana fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya yaitu 20 buah. Selanjutnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Sulawesi Tengah sejak Tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yakni dari 16 situs/BCB pada Tahun 2014 menjadi 18 situs/BCB pada Tahun 2017.

2.1.3.1.6 Perpustakaan

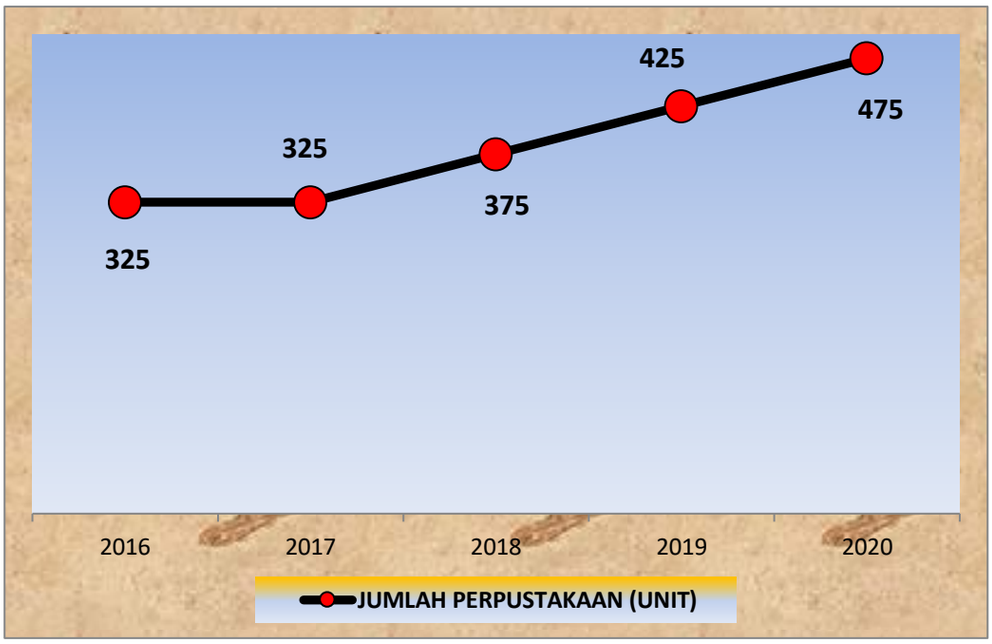
Perpustakaan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tengah. Sejak empat tahun terakhir, jumlah perpustakaan dan pengunjung perpustakaan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah koleksi buku yang tersedia.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2021

Gambar 2.26
Perkembangan Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020

Jumlah pengunjung perpustakaan di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 53.267 orang pada Tahun 2016 menjadi 234.507 orang, namun pada Tahun 2020 menurun drastis dengan itu jumlah pengunjung perpustakaan hanya sebanyak 27.396 orang atau sekitar 11,68 persen, namun pada sisi lain jumlah perpustakaan dari tahun 2017 dengan jumlah 325 unit mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 475 unit, dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2021.

Gambar 2.27
Perkembangan Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020

2.1.3.1.7 Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Pada Tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2,304,910 orang meningkat dibanding Tahun 2020 sebanyak 1,524,730 orang, angka orang bekerja pada tahun 2021 sebanyak 1,524,730 orang meningkat jika dibandingkan dengan tahun

2020 sejumlah 1.516,35 orang, selanjutnya tingkat pengangguran pada tahun 2021 sebesar 59,37 orang lebih rendah sedikit jika dibandingkan pada tahun 2020 berjumlah 59,38 orang, sementara tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2021 sebesar 68.73 persen, angka ini lebih rendah dibanding Tahun 2020 sebesar 69,44 persen, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 67.59 lebih rendah dari pada tahun 2020 dan tahun 2021, Sementara tingkat

pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2021 sebesar 3.75 persen lebih tinggi dibanding Tahun 2020 sebesar 2,66 persen, sementara pada tahun 2019 sebesar 3.15 persen, persentase ini lebih tinggi dari tahun 2020, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2017-2021

Indikator Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7
Angkatan Kerja (Orang)	1,428,583	1,502,972	1,486,561	1,575,730	2,304,910
Bekerja (Orang)	1,374,214	1,451,491	1,439,759	1,516,350	1,524,730
Pengangguran (Orang)	54,369	51,481	46,802	59,38	59,37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67.14	69.52	67.59	69.44	68.73
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	3.81	3.43	3.15	2.66	3.75

Sumber: BPS, 2022 dan Dinas Nakertrans Prov. Sulteng 2022

2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator antara lain; 1) Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi; serta 2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Provinsi

Sulawesi Tengah pada 2019 dokumen RPPLH proses penyusunan, yang antara lain memuat daya dukung dan daya 112amping lingkungan hidup.

2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah RPJMD.

2.1.3.1.9 Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Wewenang pemerintah daerah dalam urusan pertanahan terbatas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat diantaranya pemberian izin lokasi. Izin lokasi diwajibkan bagi setiap perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang akan menanamkan modal dengan memanfaatkan lahan/tanah lintas daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Selain berperan sebagai penyedia sumber pembiayaan pembangunan daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) juga berperan sebagai aktor/pelaku penting pembangunan daerah.

Perkembangan Nilai Investasi PMDN di Sulawesi Tengah sejak periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami perkembangan yang fuktuatif. Pada Tahun 2021 nilai PMDN sejumlah Rp3.012.341.100.000,- menurun dibanding realisasi Tahun 2020 sebesar Rp5.261.315.800.000,-. Sementara nilai investasi PMA di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2017-2021 juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada Tahun 2020 Nilai PMA mencapai Rp39.684.282.680.000,- meningkat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp25.617.411.568.119,-. keadaan realisasi Investasi PMA dan PMDN di Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017 – 2021

Tahun	PMA		PMDN	
	Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)
2017	43	20.635.458.000.000	75	1.929.657.000.000
2018	23	9.010.437.440.000	103	12.689.562.560.000
2019	68	27.075.580.350.000	162	4.438.798.800.000
2020	68	25.617.411.568.119	162	5.261.315.800.000
2021	46	39.684.282.680.000	379	3.012.341.100.000

Sumber: BPM-P2TSPD Provinsi Sulteng, 2022.

2.1.3.2.2 Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah turut memberi andil dalam proses pembangunan daerah.Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi magnet bagi wisatawan asing/mancanegara untuk berkunjung di daerah Sulawesi Tengah.

Selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri di Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi, yakni dari 3,050,126 orang Tahun 2017, Tahun 2018 meningkat menjadi 3,024,108 orang, pada Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 3,322,845 orang, pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan yakni berjumlah 1,824,916 orang pada tahun 2020 dan 714,703 pada tahun 2021, dan Sementara jumlah kunjungan wisatawan asing tahun 2017 sampai dengan 2021 juga terjadi jumlah yang fluktuasi yaitu dari 24,7809 orang pada Tahun 2017 menurun menjadi 23,952 orang pada Tahun 2018, namun pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan menjadi 26,491 orang, namun pada tahun 2020 kembali menurun secara drastis menjadi 11,921 orang, selanjutnya pada Tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 1,085 orang.

Tabel 2.51
Perkembangan Kunjungan Wisatawan
Di Sulawesi Tengah, Tahun 2017 – 2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Wisatawan Mancanegara	24,709	23,942	26,491	11,921	1,085
Wisatawan Nusantara (Domestik)	3,025,417	3,000,166	3,296,354	1,812,995	713,618
	3,050,126	**3,024,108**	**3,322,845**	**1,824,916**	**714,703**

Sumber: BPS dan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulteng, 2022.

2.1.3.2.3 Kelautan dan Perikanan

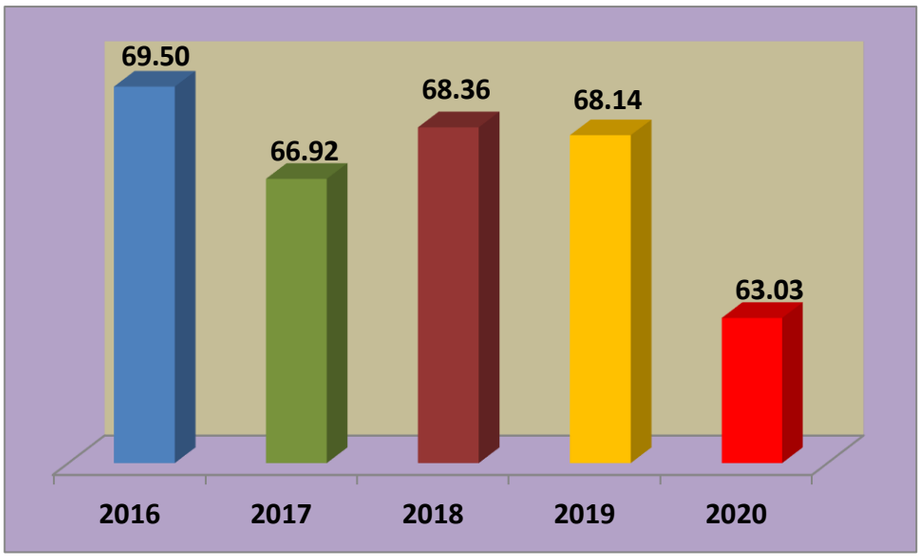
Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 mencapai 960.460.28 ton, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya mencapai 964.509,04 ton. Sementara produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 sebanyak 201.101,80 ton meningkat dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya sebesar 196.519,30 ton. Perkembangan produksi perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020

PRODUKSI PERIKANAN (TON)		
TAHUN	PERIKANAN BUDIDAYA	PERIKANAN TANGKAP
2016	1.339.013,78	212.330,60
2017	1.059.050,30	174.964,00
2018	918.186,40	171.115,00
2019	964.509,04	196.519,30
2020	960.460.28	201.101.80

Sumber: BPS, 2020; dan Diskanlat Provinsi Sulteng, 2021.

Perkembangan konsumsi ikan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 cenderung fluktuatif, dimana pada Tahun 2016 rata-rata konsumsi ikan mencapai 69,50 kalori/kapita/hari menurun menjadi 66,92 kalori/kapita/hari pada Tahun 2017, selanjutnya pada Tahun 2018 konsumsi ikan meningkat menjadi 68,36 kalori/kapita/hari, dan pada Tahun 2019 konsumsi ikan sedikit menurun menjadi 68,14 kalori/kapita/hari, dan terjadi penurunan drastis sebanyak 63.03 kalori/kapita/hari pada tahun 2020, dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS, Tahun 2021.

Gambar 2.28
Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Ikan
Di Sulawesi Tengah (Kalori/perkapita/tahun)
Tahun 2016 – 2020

Selanjutnya Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.379.159,41 ha melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 523/635A/Dis.KANLUT-GST/2017. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah tersebut terdiri atas:

1. Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto di Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol (60.042,75 ha);
2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una (137.766,95 ha);
3. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai Dalaka di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut (869.059,94 ha); dan

4. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali (312.289,77 ha).

2.1.2.3.4 Perindustrian dan Perdagangan

Perkembangan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tengah cenderung stagnan. Untuk sektor industri skala kecil dan menengah cukup berkembang tetapi untuk industri skala besar (industri manufaktur) tidak begitu berkembang. Industri skala kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat dan swasta, seperti industri kerajinan tangan (rotan dan bambu), meubel, food (kuliner), dan penginapan (homestay). Adapun sektor perdagangan lebih bergerak pada perdagangan antar pulau dan antar provinsi untuk komoditas hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038, Industri unggulan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

a. Industri Pangan terdiri dari :
   - Industri pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan
   - Industri Pengolahan Minyak Nabati
   - Industri berbahan baku ikan dan hasil kelautan
   - Industri olahan coklat
   - Industri bawang
   - Industri olahan kopi

b. Industri Hulu Agro
   - Indusri pengolahan kelapa terpadu
   - Industri pengolahan minyak atsiri (cengkeh, pala dan nilam)
   - Industri pengolahan kelapa sawit

- Industri karet
- Industri Pakan

c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu dan Rotan)
   - Industri Tekstil
   - Industri Furniture
   - Industri Pengolahan Kayu dan Rotan
   - Industri Kerajinan Kayu dan Anyaman Rotan

d. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
   - Industri Minyak dan Gas

e. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
   - Industri Besi
   - Industri Nikel
   - Industri Bahan Galian Bukan Logam

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah lebih dituntut sebagai pemrakarsa dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

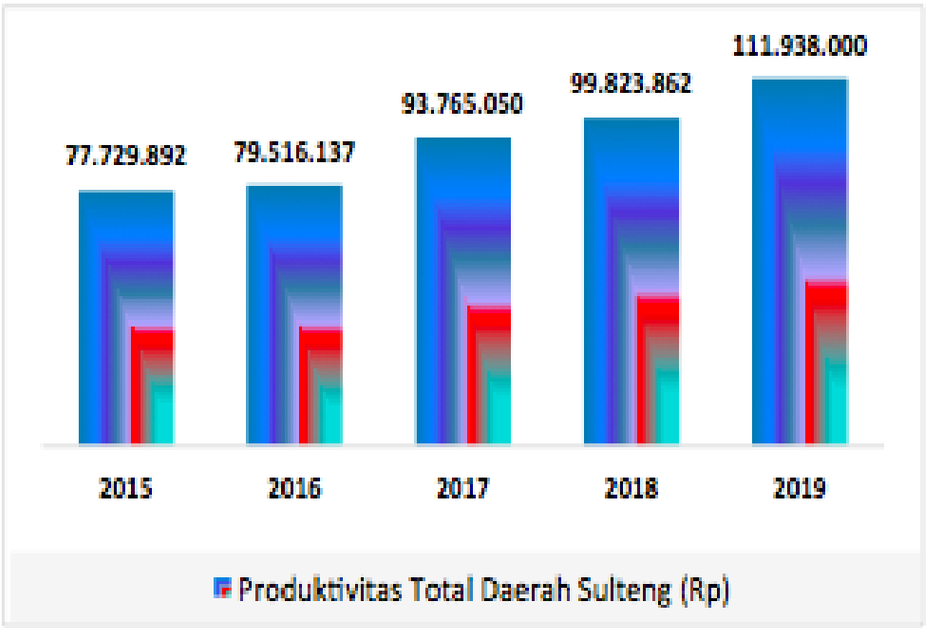
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Produktivitas Total Daerah

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang telah dicapai tidak lepas dari peran semua sektor lapangan usaha. Produktivitas Total daerah menunjukkan seberapa besar bilah tambah bruto yang diciptakan oleh suatu daerah. Nilai produktivitas sektor ekonomi daerah yang tangguh diharapkan dapat mendukung daya saing daerah di era otonomi.

Produktivitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan *trend*

yang meningkat, yakni dari Rp77.729.892,- pada Tahun 2015 menjadi Rp111.938.000,- pada Tahun 2019, dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,70 persen pertahun.



Sumber: BPS, Tahun 2020 (Data Diolah kembali).

Gambar 2.29
Perkembangan Produksi Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015–2019

2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

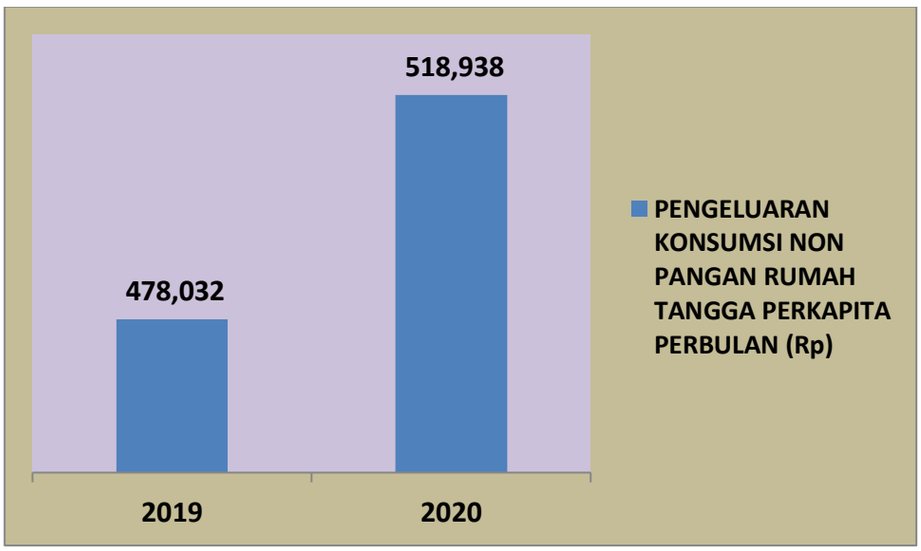
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 menunjukan *trend* peningkatan, yakni dari Rp983.641,- perkapita perbulan pada Tahun 2019 mencapai Rp1.035.777,- perkapita perbulan pada Tahun 2020, ditunjukkan pada gambar berikut :



Sumber: BPS, Tahun 2021.

Gambar 2.30
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019–2020

Selanjutnya, Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 juga menunjukan *trend* peningkatan, yakni dari Rp478.032,- perkapita perbulan pada Tahun 2019 menjadi Rp518.938,- perkapita perbulan pada Tahun 2020.



Sumber: BPS, Tahun 2021.

Gambar 2.31
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019–2020

2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu, dan diharapkan bahwa petani mengalami surplus (pendapatan melebihi pengeluaran=NTP>100). NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan nilai NTP dinyatakan dalam bentuk persentase.

Nilai Tukar Petrani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/dayabeli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Tengah selama Desember 2021 sebesar 103,51 naik 0,61 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya, Indeks harga yang diterima (It) mengalami peningkatan indeks sebesar 1,43 persensedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga mengalami kenaikan indeks sebesar 0,81 persen, NTP tertinggi terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 108,21 sedangkan NTP terendah terjadi pada subsektor Tanaman Pangan sebesar 95,93 persen, Nilai Tukar Usaha Rumahtangga Pertanian (NTUP) sebesar 105,12 mengalami kenaikan sebesar 1,24 persen dibandingkan bulan November 2021.

Di tingkat nasional pada bulan Desember 2021, NTP mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen bila dibandingkan dengan NTP bulan November, sedangkan untuk NTUP juga mengalami kenaikan sebesar 1,40 persen, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani di tingkat nasional pada bulan Desember 2021 masing-masing sebesar 108,34 dan 108,52.

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang berperan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, merupakan persentase yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik yang dikonsumsi oleh rumahtangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Sehingga, semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Dari hasil pemantauan harga penjualan komoditas hasil pertanian di tingkat produsen, biaya produksi, dan konsumsi rumahtangga terhadap barang dan jasa di wilayah perdesaan selama Desember 2021 menunjukkan bahwa NTP Provinsi Sulawesi Tengah naik sebesar 0,61 persen, yakni dari 102,88 pada November 2021 menjadi 103,51 pada Desember 2021. Hal ini disebabkan perubahan indeks harga yang diterima petani (It) lebih besar dibandingkan dengan kenaikan perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yakni masing-masing sebesar 1,43 persen dan 0,81 persen.

Tabel 2.53
NTP Menurut Subsektor dan Perkembangannya,
November – Desember 2021 (2018 = 100)

SUB SEKTOR	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4
1. **Tanaman Pangan**			
a. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	96,88	95,93	-0,97
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	107,71	107,72	0,01
- Padi	105,11	104,81	-0,29
- Palawija	119,65	121,10	1,21
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	111,19	112,29	0,99
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,99	113,35	1,21
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	109,11	109,55	0,40
2. Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	94,01	108,21	15,10
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	103,19	119,57	15,87
- Sayur-sayuran	102,72	122,60	19,35
- Buah-buahan	105,86	105,79	-0,07
- Tanaman Obat	94,74	95,81	1,13
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	109,76	110,50	0,67
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,37	111,23	0,77
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	106,67	106,84	0,16
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	107,86	107,93	0,06
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	118,71	119,68	0,82
- Tanaman Perkebunan Rakyat	118,71	119,68	0,82
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	110,05	110,89	0,76
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,04	111,02	0,89
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	110,11	110,26	0,13

1	2	3	4
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	99,11	97,98	-1,15
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	109,00	108,47	-0,48
- Ternak Besar	106,36	105,55	-0,77
- Ternak Kecil	110,57	110,94	0,33
- Unggas	118,01	118,57	0,47
- Hasil Ternak	116,80	116,54	-0,22
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)	109,97	110,71	0,67
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,38	111,71	1,21
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	109,47	109,47	0,00
5. Perikanan			
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,76	104,28	1,47
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)	112,17	114,70	2,25
- Tangkap	112,60	115,23	2,34
- Budidaya	107,23	108,59	1,27
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	109,16	109,99	0,77
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,17	112,46	1,16
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	105,54	105,57	0,02
5.1 Perikanan Tangkap			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,97	104,56	1,54
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan (It)	112,60	115,23	2,34
- Penangkapan Perairan Umum	99,30	101,94	2,66
- Penangkapan Laut	112,71	115,34	2,33
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)	109,35	110,20	0,78
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	111,19	112,50	1,18
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	105,95	105,97	0,02
5.2 Perikanan Budidaya			
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	100,25	100,94	0,69
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It)	107,23	108,59	1,27
- Budidaya Air Tawar	115,95	117,36	1,22
- Budidaya Laut	103,81	104,70	0,86
- Budidaya Air Payau	115,89	118,65	2,39
c. Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib)	106,96	107,58	0,58
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,99	111,94	0,86
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	100,86	100,98	0,12

1	2	3	4
NTP Gabungan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,88	103,51	0,61
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	113,45	115,08	1,43
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	110,28	111,17	0,81
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,70	111,83	1,02
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	109,26	109,47	0,19
NTP Gabungan Tanpa Perikanan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,89	103,45	0,55
b. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)	113,54	115,10	1,37
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	110,36	111,26	0,82
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	110,67	111,78	1,01
- Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	109,53	109,75	0,20

Sumber Data : BPS 2022

2. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It)

Selama Desember 2021, indeks harga yang diterima petani tercatat 115,08 atau naik sebesar 1,43 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 113,45. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya (It) sebagian besar subsektor yaitu tanaman pangan sebesar 0,01 persen, tanaman hortikultura sebesar 15,87 persen, tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,82 persen, dan subsektor perikanan sebesar 2,25 persen.

3. Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib)

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) dipengaruhi oleh komponen pengeluaran baik untuk konsumsi rumahtangga maupun fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang dibayar petani selama Desember 2021 seluruh subsektor mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya (Ib) seluruh subsektor.

4. NTP Menurut Subsektor

4.1 NTP Tanaman Pangan (NTPP)

NTP subsektor tanaman pangan selama bulan Desember 2021 mengalami penurunan indeks sebesar 0,97 persen yakni dari 96,88 pada November 2021 turun menjadi 95,93 pada Desember 2021. Penurunan NTPP disebabkan oleh perubahan indeks yang dibayar petani (Ib) lebih besar dari perubahan indeks yang diterima petani (Ib).

Perubahan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) pada subsektor tanaman pangan bulanDesember 2021 sebesar 0,99 persen dan perubahan indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,01 persen .

4.2 NTP Tanaman Hortikultura (NTPH)

Selama bulan Desember 2021 subsektor Hortikultura mengalami kenaikan NTP sebesar 15,10 persen atau berubah dari 94,01 pada November 2021 menjadi 108,21 pada Desember 2021. Kenaikan NTPH disebabkan oleh naiknya perubahan (It) sangat signifikan sebesar 15,87 persen.

Indeks harga yang dibayar petani (ib) subsektor Hortikultura pada Desember 2021 sebesar 110,05. Kenaikan indeks harga yang dibayar petani dipengaruhi oleh naiknya indeks harga konsumsi

rumahtangga dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,77 persen dan 0,16 persen.

4.3 NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)

Nilai tukar subsektor tanaman perkebunan rakyat selama Desember 2021 mengalami kenaikan perubahan indeks sebesar 0,06 persen. Nilai NTPR yang sebelumnya sebesar 107,86 pada bulan November 2021 naik menjadi 107,93 pada Desember 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh perubahan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,82 persen, adapun perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen.

4.4 NTP Peternakan (NTPT)

Subsektor peternakan pada bulan Desember 2021 mengalami penurunan NTP sebesar 1,15 persen. Nilai NTPT yang semula 99,11 pada November 2021 turun menjadi 97,98 pada Desember 2021. Kondisi ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,67 persen, sedangkan indeks yang diterima petani (It) mengalami penurunan indeks sebesar 0,48 persen.

Indeks harga yang diterima (It) petani subsektor peternakan pada bulan Desember 2021 tercatat sebesar 108,47 sedangkan (Ib) tercatat sebesar 110,71. Kenaikan (Ib) dipengaruhi oleh naiknya perubahan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 1,21 persen, sedangkan untuk indeks BPPBM tidak mengalami perubahan indeks. Perubahan indeks harga yang diterima petani (It) dipengaruhi oleh perubahan turunnya indeks ternak besar 0,77 persen dan hasil ternak/unggas sebesar 0,22 persen. Sedangkan untuk ternak kecil dan unggas masing-masing naik sebesar 0,33 persen, 0,47 persen dan 0,76 persen.

4.5 NTP Perikanan (NTNP)

Selama bulan Desember 2021, subsektor perikanan mengalami kenaikan perubahan indeks nilai tukar sebesar 1,47 persen atau berubah dari 102,76 pada November 2021 naik menjadi 104,28 pada Desember 2021. Kondisi ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 2,25 persen lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib)sebesar 0,77 persen.

Pada kelompok perikanan tangkap (NTN), terjadi kenaikan nilai tukar nelayan sebesar 1,54 persen yakni dari 102,97 pada November 2021 naik menjadi 114,70 pada Desember 2021. Kenaikan nilai tukar pada subkelompok perikanan tangkap disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) pada kelompok penangkapan ikan di perairan umum dan di laut masing-masing sebesar 2,66 persen dan 2,33 persen.

Kelompok perikanan budidaya (NTPi) mengalami kenaikan indeks nilai tukar sebesar 0,69 persen yakni dari 100,25 pada November 2021 menjadi 100,94 pada Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh naiknya (It) budidaya tawar sebesar 1,22 persen, budi daya air laut sebesar 0,86 dan budidaya air payau sebesar 2,39 persen. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga mengalami kenaikan perubahan indeks sebesar 0,58 persen. Kenaikan (Ib) dipengaruhi oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,86 persen dan indeks biaya produksi danpenambahan barang modal (BPPBM) sebesar 0,12 persen.

5. Indeks Harga Dibayar Petani Menurut Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pengeluaran petani selama Desember 2021 dapat dirinci menurut indeks harga yang dibayar

petani baik untuk keperluan rumahtangga maupun keperluan proses produksi di sektor pertanian.

Berdasarkan 11 subkelompok konsumsi rumah tangga pada tahun dasar 2018, diketahui bahwa indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk konsumsi rumahtangga mengalami kenaikan indeks sebesar 1,02 persen, yakni dari 110,70 pada November 2021 naik menjadi 111,83 pada Desember 2021. Hal ini disebabkan naiknya seluruh indeks subkelompok, baik itu subkelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,59 persen, subkelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; subkelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar sebesar 0,31 persen; subkelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,33 persen; subkelompok Kesehatan sebesar 0,25 persen; subkelompok transportasi sebesar 0,17 persen; subkelompok penyediaan makanan dan minuman/retoran sebesar 0,09 serta subkelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 0,14 persen.

Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikan sebagian besar subkelompok yakni; subkelompok pengeluaran bibit naik sebesar 0,02 persen; pupuk, pestisida, obat dan pakan sebesar 0,58 persen; sewa dan pengeluaran lainnya sebesar 0,24 persen, subkelompok barang modal naik sebesar 0,09 persen dan subkelompok upah buruh naik sebesar 0,01 persen. Subkelompok transportasi dan komunikasi mengalami penurunan indeks sebesar 0,06 persen

Indeks yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan perubahan indeks sebesar 0,81 persen, yakni dari 110,28 pada bulan November naik menjadi 111,17 pada bulan Desember 2021.

Tabel 2.54
Indeks Harga yang Dibayar Petani Menurut Kelompok Pengeluaran, November -Desember 2021

NO.	SUBSEKTOR	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
A.	**Konsumsi Rumah Tangga**	**110,70**	**111,83**	**1,02**
	1. Makanan, Minuman dan Tembakau	112,33	114,12	1,59
	2. Pakaian dan Alas Kaki	107,46	107,52	0,05
	3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya	107,23	107,56	0,31
	4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,91	111,27	0,33
	5. Kesehatan	110,70	110,97	0,25
	6. Transportasi	107,38	107,57	0,17
	7. Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	96,87	96,87	0,00
	8. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	107,00	107,00	0,00
	9 Pendidikan	100,61	100,61	0,00
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	115,14	115,24	0,09
	11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	112,54	112,70	0,14
B.	**Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)**	**109,26**	**109,47**	**0,19**
	1. Bibit	105,03	105,04	0,02
	2. Pupuk, Pestisida, Obat dan Pakan	110,09	110,73	0,58
	3. Sewa dan Pengeluaran Lainnya	104,09	104,34	0,24
	4. Transportasi dan Komunikasi	107,69	107,62	-0,06
	5. Barang Modal	108,58	108,68	0,09
	6. Upah Buruh	110,20	110,20	0,01
C.	**Indeks yang Dibayar Petani (Ib)**	**110,28**	**111,17**	**0,81**

Sumber Data : BPS 2022

6. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Rumahtangga Pertanian (NTUP) menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), tanpa memperhitungkan pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga. NTUP diharapkan lebih mencerminkan kemampuan daya tukar hasil produksi rumahtangga petani terhadap pengeluaran biaya selama proses produksi.

Nilai Tukar Usaha Rumahtangga Pertanian (NTUP) pada bulan Desember 2021 mengalami kenaikan indeks sebesar 1,24 persen yaitu dari 103,83 pada bulan November 2021 menjadi 105,12 pada bulan Desember 2021. Namun demikian, relatif lebih rendahnya indeks NTP yakni sebesar 103,51 dibandingkan indeks Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yang sebesar 105,12 merefleksikan bahwa tingkat pengeluaran untuk biaya produksi dan penambahan barang modal, berperan cukup signifikan dalam menentukan besaran nilai tukar. Kenaikan NTUP dipengaruhi oleh naiknya NTUP subsektor Hortikultura yang sangat signifikan sebesar 15,69 persen; subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,69 persen dan subsektor perikanan sebesar 2,23 persen.

Pada bulan yang sama, NTUP tanpa perikanan sebesar 104,88 atau lebih rendah dari NTUP secara gabungan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan tetap memiliki daya ungkit terhadap capaian nilai tukar usaha rumahtangga.

Tabel 2.55
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Menurut Subsektor dan Perkembangnnya, November – Desember 2021

NO	SUBSEKTOR	NOVEMBER 2021	DESEMBER 2021	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Tanaman Pangan	98,72	98,33	-0,43
2.	Hortikultura	96,74	111,91	15,69
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	107,80	108,55	0,69
4.	Peternakan	99,57	99,09	-0,48
5.	Perikanan	106,28	108,65	2,23
	a. Tangkap	106,28	108,74	2,32
	b. Budidaya	106,31	107,54	1,15
NTUP		**103,83**	**105,12**	**1,24**
NTUP Tanpa Perikanan		**103,66**	**104,88**	**1,17**

Sumber Data : BPS 2022

7. Perbandingan Nilai Tukar Petani antar Provinsi se-Sulawesi

Perbandingan NTP antar provinsi se-Sulawesi pada bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa, untuk NTP subsektor tanaman pangan, indeks nilai tukar tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 104,83. Pada subsektor hortikultura, Provinsi Sulawesi Utara memiliki indeks nilai tukar terendah yaitu sebesar 102,33. Pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, terdapat 5 (lima) provinsi yang memiliki indeks di atas 100 yaitu Provinsi Sulawesi Utara sebesar 116,66, Provinsi Sulawesi Tengah 107,93, Provinsi Sulawesi Selatan 117,66, Provinsi Gorontalo 119,31, dan Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai NTPR 156,23. Satu- satunya provinsi dengan indeks terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni hanya sebesar 99,19. Pada subsektor peternakan, nilai tukar tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi

Tenggara yaitu sebesar 105,17 dan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 96,17. Pada subsektor perikanan, nilai tukar tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatanyaitu sebesar 107,60.

Apabila diamati lebih jauh pada bulan Desember 2021, kondisi NTP Gabungan provinsi- provinsi di Pulau Sulawesi mengalami peningkatan indeks dengan kenaikan indeks masing- masing yaitu Provinsi Sulawesi Tengah naik sebesar 0,61 persen; Provinsi Sulawesi Selatan naik sebesar 0,50 persen, Provinsi Sulawesi Tenggara naik sebesar 0,26 persen dan Provinsi Gorontalo naik sebesar 1,16 persen. Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat mengalami penurunan indeks masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,52 persen.

Tabel 2.56
Perbandingan NTP antar Provinsi Se-Pulau Sulawesi Menurut Subsektor dan Perkembangannya, November – Desember 2021

Provinsi	Bulan	Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Gabungan
1	2	3	4	5	6	7	8
Sulawesi Utara	November 2021	105,89	96,99	118,22	102,95	105,45	110,80
	Desember 2021	104,83	102,33	116,66	103,28	107,04	110,51
	Perubahan (%)	-1,00	5,51	-1,32	0,31	1,51	-0,26
Sulawesi Tengah	November 2021	96,88	94,01	107,86	99,11	102,76	102,88
	Desember 2021	95,93	108,21	107,93	97,98	104,28	103,51
	Perubahan (%)	-0,97	15,10	0,06	-1,15	1,47	0,61
Sulawesi Selatan	November 2021	93,51	105,85	116,06	99,73	105,81	99,87
	Desember 2021	93,79	105,45	117,66	98,89	107,60	100,37
	Perubahan (%)	0,30	-0,37	1,37	-0,85	1,69	0,50
Sulawesi Tenggara	November 2021	97,46	112,21	99,34	104,72	104,45	100,82
	Desember 2021	98,03	113,50	99,19	105,17	104,93	101,08
	Perubahan (%)	0,59	1,15	-0,16	0,42	0,45	0,26
Gorontalo	November 2021	103,07	104,66	117,93	105,36	95,36	104,39
	Desember 2021	102,30	129,78	119,31	103,61	96,73	105,59
	Perubahan (%)	-0,74	24,00	1,18	-1,66	1,44	1,16
Sulawesi Barat	November 2021	103,45	107,13	157,33	97,42	106,17	130,33
	Desember 2021	102,78	112,13	156,23	96,17	107,36	129,66
	Perubahan (%)	-0,65	4,67	-0,70	-1,29	1,12	-0,52

Sumber Data : BPS 2022

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pada tahun 2017 Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga dan penataan ruang telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, tahapannya salah satunya yaitu tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap indikasi program dalam rencana tata ruang terhadap data pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan target capaian dalam indikasi

program. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Dalam pemanfaatan ruang, simpangan- simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel. 2.57
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Struktur Ruang)

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
A	Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan							
	Pengembangan/ Peningkatan fungsi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
	Pengembangan baru	33%		√	√		Rendah	Tinggi
	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	0,5		√	√		Rendah	Tinggi
B	Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah	0,33		√		√	Rendah	Tinggi
C	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan							
	Pengembangan/ Peningkatan fungsi	33%		√	√		Rendah	Tinggi
	Pengembangan baru	33%		√	√		Rendah	Tinggi
	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	33%		√	√		Rendah	Tinggi
D	Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana							
	Rehabilitasi kota akibat bencana alam	0,5		√		√	Rendah	Tinggi

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
	Pengendalian perkembangan kota- kota berbasis Mitigasi Bencana	0,25	√		√		Tinggi	Tinggi
E	Perwujudan Sistem Transportasi							
	Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer, Jaringan Lintas Trans Sulawesi Tengah, Jaringan lintas Barat	50%	√		√		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan	50%	√		√		Tinggi	Tinggi
	Pembangunan Terusan Khatulistiwa	33%		√		√	Rendah	Rendah
	Pemantapan Pelabuhan Propinsi	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier	100%	√		√		Tinggi	Tinggi
F	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya							
	Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan PengendalianDayaRusak Air (SDA)	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas (Energi)Bumi	100%		√		√	Rendah	Tinggi
	Rehabilitasi Jaringan Terestrial (Komunikasi)	100%		√		√	Rendah	Rendah
	Pengembangan JaringanTerestrial (Komunikasi)	100%		√		√	Rendah	Rendah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019

Tabel. 2.58
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Pola Ruang)

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG								
A	Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan							
	Pengembangan/ Peningkatan fungsi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
A	Perwujudan Kawasan Lindung							
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Suaka Alam Laut	33%		√		√	Rendah	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Suaka Margasatwa	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Cagar Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Nasional	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Raya	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Wisata Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka Alam Laut	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka Margasatwa	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Cagar Alam	33%	√		√		Tinggi	Rendah

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Nasional	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Raya	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman WisataAlam	33%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung (KawasanResapan Air)	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru	50%	√		√		Tinggi	Rendah
B	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi Daya							
	Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi	50%		√		√	Rendah	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan	50%		√		√	Rendah	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan	25%	√		√		Tinggi	Rendah

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk industry pengolahan	50%		√		√	Rendah	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk industry pengolahan	25%		√		√	Rendah	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan	25%	√		√		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan	50%	√		√		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan Kehutanan	25%	√		√		Tinggi	Rendah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019.

Tabel. 2.59
Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Perwujudan Rencana Strategis)

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/ Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG								
A	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
B	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	50%		√	√		Rendah	Tinggi
C	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	50%		√	√		Rendah	Tinggi
D	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi	50%		√	√		Rendah	Tinggi
E	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	50%		√	√		Rendah	Tinggi
F	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan	50%		√	√		Rendah	Tinggi
	1. Penawaran Wilayah	33%	√	√			Tinggi	Tinggi
	2. Penawaran Wilayah	33%	√	√			Tinggi	Tinggi

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Jenis dan Besaran						Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/ Rendah)
		Unit (Luas/ Panjang/Jumlah/ Volume/dll)	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/ Rendah)	
			Realisasi >50%	Realisasi <50%	Sesuai	Tidak Sesuai		
	3. Pengembang	33%	√	√			Tinggi	Tinggi
G	Pengembangan Kawasan Andalan Bahan Bakar Nabati	33%		√		√	Rendah	Rendah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulteng 2019

2.1.4.2.1 Luas Wilayah Ekonomi Produktif

Dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah Sulawesi Tengah, maka kawasan pertumbuhan ekonomi produktif terbagi atas lima Kawasan Strategis Nasional yang diakomodir dalam RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yakni: (1) Kawasan Strategis Ekonomi (KSE); (2) Kawasan Kota Terpadu Mandiri; (3) Kawasan Cepat Tumbuh; (4) Kawasan Agrotourism; dan (5) Kawasan Perbatasan.

Tabel 2.60
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah

No.	Nama KSN	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Palu Utara	Kota Palu
2.	Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang, KTM Bungku, KTM Padauloyo, KTM Bahari Bolano Lambunu dan KTM Talabosa	Buol, Morowali, Tojo Unauna, Parigi Moutong dan Poso
3.	Kawasan Cepat Tumbuh Kaw. Parigi – Ampibabo dsk., Kaw. Danau Poso dsk., Kaw. Ampana dsk., Kaw. Moutong – Tomini dsk., Kaw. Damsol – Damsel dsk., Kaw. Lalundu dsk.	Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Tojo Una - Una Kab. Parigi MoutongKab. Donggala Kab. Donggala
4.	**Kawasan Agrotourism** Sausu – Manggalapi - Palolo dsk.	Kab. Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi
5.	**Kawasan Perbatasan;**	
	Kawasan Tindantana	perbatasan kabupaten Poso dengan kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
	Kawasan Teluk Matarape	perbatasan kabupaten Morowali dengan Provinsi Sulawesi Tenggara;

No.	Nama KSN	Nama Kabupaten/Kota
	Kawasan Surumana	perbatasan kabupaten Donggala dengan Provinsi Sulawesi Barat;
	Kawasan Umu	perbatasan kabupaten Buol dengan Provinsi Gorontalo;
	Kawasan Kepulauan Togian	perbatasan kabupaten Tojo Unauna dengan Provinsi Gorontalo;
	Kawasan Molosipat	perbatasan kabupaten Parigi-Moutong dengan Provinsi Gorontalo;
	Kawasan Pulau Sonit	perbatasan kabupaten Banggai Kepulauan dengan Provinsi Maluku Utara.

Sumber: RTRWProvinsiSulawesi Tengah Tahun 2013-2033

2.1.4.2.2 Perkembangan Infrastruktur

2.1.4.2.2.1 Infrastruktur Jalan

Pembangunan dibidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan kondisi jalan mengalami peningkatan. Panjang jalan Provinsi mencapai 1.643,74 km, sedangkan Panjang jalan kewenangan pusat sepanjang 2.373,40 km, serta kewenangan Kabupaten dan Kota sepanjang 12.890,60 km.

Tabel 2.61
Panjang Jalan Menurut Pemerintah Kewenangan Mengelola dan Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Tengah(km), 2020

Status Jalan	Kondisi Jalan				
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Jalan Negara	1 024,90	1 289,80	44,20	14,50	2 373,40
Jalan Provinsi	547,73	467,70	181,61	446,70	1 643,74
Jalan Kabupaten/Kota	3 025,77	2 639,53	3 077,97	4 147,34	12 890,60
Jumlah	**4 598,40**	**4 397,03**	**3 303,78**	**4 608,54**	**16 907,74**

Selanjutnya, perkembangan kondisi jalan nasional (2.373,40 km) permukaan jalan aspal, sedangkan kewenangan Provinsi dengan

Panjang jalan sepanjang 1.643,74 km, permukaan jalan diaspal sepanjang 1.192,44 km, Kerikil sepanjang 258,95 km, Tanah sepanjang 191,15 km dan beton sepanjang 1,20 km, sementara kewenangan Kabupaten/Kota permukaan jalan diaspal sepanjang 5.495,14 km, Kerikil sepanjang 4.073,69 km, Tanah sepanjang 2.926,52 km dan beton sepanjang 395,24 km.

Gambar 2.62
Perkembangan Kondisi Permukaan Jalan (km) di Sulawesi Tengah
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Status Jalan	Jenis Permukaan Jalan				
	Aspal	Kerikil	Tanah	Beton	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Jalan Negara	2 373,40	—	—	—	2 373,40
Jalan Provinsi	1 192,44	258,95	191,15	1,20	1 643,74
Jalan Kabupaten/Kota	5 495,14	4 073,69	2 926,52	395,24	12 890,60
Jumlah	**9 060,98**	**4 332,64**	**3 117,67**	**396,44**	**16 907,74**

Sumber: BPS, Tahun 2022.

2.1.4.2.2.2 Infrastruktur Daerah Irigasi

Kondisi dan perkembangan daerah irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain adalah :

1) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 6 (enam) daerah irigasi dengan luas potensial 30.564,88 Ha dan luas fungsional 20.260,15 Ha,
2) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) daerah irigasi dengan luas potensial 47.640 Ha dan luas fungsional 34.504 Ha.

Tabel 2.63
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional yang Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab Pusat (ha), 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional *(ha)*
1	2	3	4
Banggai Kepulauan	—	—	—
Banggai	3	9 550,47	7 164,99
Morowali	—	—	—
Poso	—	—	—
Donggala	—	—	—
Tolitoli	—	—	—
Buol	—	—	—
Parigi Moutong	2	12 833,76	7 820,16
Tojo Una-Una	—	—	—
Sigi	1	8 180,65	5 275
Banggai Laut	—	—	—
Morowali Utara	—	—	—
Palu	—	—	—
Sulawesi Tengah	**6**	**30 564,88**	**20 260,15**

Sumber: BPS, 2022.

Tabel 2.64
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional yang Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab Provinsi (ha), Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional *(ha)*
1	2	3	4
Banggai Kepulauan	—	—	—
Banggai	8	13 316	8 890,51
Morowali	2	3 893	4 484,00
Poso	4	5 628	3 817,00
Donggala	1	1 625	923,22
Tolitoli	3	4 348	2 947,50
Buol	1	1 028	534,15
Parigi Moutong	8	14 923	11 664,53
Tojo Una-Una	—	—	—
Sigi	2	1 669	492,90
Banggai Laut	—	—	—
Morowali Utara	1	1 210	750,00
Palu	—	—	—
Sulawesi Tengah	**30**	**47 640**	**34 504**

Sumber: BPS, 2022

2.1.4.2.2.3. Infrastruktur Kelistrikan

Kota Palu adalah titik simpul Pembangunan Sistim Kelistrikan Sulawesi dan merupakan Simpul Jaringan Kelistrikan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2021 Kondisi ketenagalistrikan Sulawesi Tengah saat ini dapat dilihat pada data berikut, dimana daya terpasang sebesar 860.174 MW, dengan jumlah produksi sebesar 1.441.205.087 MW, dan terjual sebesar 1.352.388 MW.

Sementara jumlah pelanggan listrik di Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebanyak 492.696 pelanggan, meningkat jika dibandingakan pada tahun 2020 dengan jumlah pelanggan sebanyak 352.307 pelanggan. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 70,73 persen dan Rasio Elektrifikasi desa sebesar 79,03 persen.

2.1.4.2.2.4. Infrastruktur Perhubungan

a. Angkutan Darat

Sebagai sarana jasa transportasi, kondisi ruas jalan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelancaran aktivitas perekonomian antarwilayah. Jumlah perusahaan jasa angkutan dan armada memberikan gambaran umum pangsa pasar layanan jasa transportasi selama setahun terakhir.

Jumlah pelayanan angkutan darat yang beroperasi di Sulawesi Tengah pada Tahun 2021, dengan jumlah Perusahaan Angkutan Bus sebanyak 33 perusahaan, sedangkan Bus Umum sebanyak 210 unit dengan kapasitas penunpang sebanyak 5.012 penumpang terdiri dari armada Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 440 unit, Armada Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 110 unit, Armada Antar Jemput Dalam Provinsi sebanyak 82 Unit, Armada Antar Jemput Antar

Provinsi sebanyak 8 unit, Angkutan Kota sebanyak 454 unit, dan taksi (argo meter) sebanyak 81 unit.

Berikut disajikan kondisi jaringan jalan strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 2.65
Jaringan Jalan Strategis Nasional Di Sulawesi Tengah

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS JALAN STRATEGIS NASIONAL (TERSAMBUNG)	PANJANG (KM)	KEPUTUSAN PENETAPAN
1.	018 19 K	Jl. Hasanuddin II (Palu)	0,850	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.567/KPTS /M/2001, Tanggal 10 November 2010 Perihal Penetapan Ruas-Jalan Strategis Nasional.
2.	019 16 K	Jl. Malonda II (Buluri-Watusampu) Palu.	5,640	
3.	019 17 K	Jl. Sungai Gumbasa (Palu)	0,230	
4.	019 18 K	Jl. Danau Poso (Palu)	0,400	
5.	019 19 K	Jl. Sungai Dolago (Palu)	0,200	
6.	019 1A K	Jl. Sis Aljufri I (Palu)	0,350	
7.	019 14 K	Jl. Yos Sudarso (Poso)	0,650	
8.	043	Ruas Luwuk-Batui (Banggai)	42,114	
9.	043 11 K	Jl. Samratulangi (Luwuk/Banggai)	0,321	
10.	043 12 K	Jl. A. Yani (Luwuk/Banggai)	1,492	
11.	043 13 K	Jl. Urif Sumoharjo (Luwuk/Banggai)	0,886	
12.	043 14 K	Jl. Sidirman (Luwuk/Banggai)	0,976	
13.	043 15 K	Jl. M. Hatta (Luwuk/Banggai)	10,553	
14.	044	Ruas Batui-Toili (Banggai)	40,955	
15.	045	Ruas Toili-Rata (Banggai)	53,346	
16.	046	Ruas Rata-Baturube (Morowali)	57	
17.	063	Ruas Mepanga-Pasir Putih (Parigi Moutong)	23	
18.	064	Ruas Pasir Putih-Basi (Tolitoli)	32,50	
19.	065	Ruas Tomata-Pape (Morwali)	64	
20.	066	Ruas Salakan-Sambiut (Banggai Kepulauan)	24	

Sumber : RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033

Selanjutnya Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang) di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang)
di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Nama Terminal Penumpang	Nama Kabupaten/Kota	L u a s (m^2)
	Terminal Penumpang Tipe A		
1.	Mamboro (Eksisting)	Palu	19.174
2.	Sintuwu (Eksisting)	Poso	3.115
3.	Toboli (Eksisting)	Parigi Moutong	33.800
	Terminal Penumpang Tipe B		
1.	Tentena (Eksisting)	Poso	
2.	Pasar Sentral (Eksisting)	Poso	
3.	Biak (Eksisting)	Banggai	
4.	Lelean Nono (Baru)	Tolitoli	
5.	Mensung	Parigi Moutong	

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya untuk Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah

No.	Nama Jembatan Timbang	Nama Kabupaten/Kota	L u a s (m)
1.	Toboli	Parigi Moutong	60 m x 40 m
2.	Kayu Malue	Palu	64 m x 56 m
3.	Mayoa	Poso	60 m x 60 m
4.	Moutong	Parigi Moutong	

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya untuk Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
Di Sulawesi Tengah

No.	Lokasi Pengujian	Nama Kabupaten/ Kota	Merk / Tahun Operasi	Kapasitas	Kondisi
1.	Lolu	Kota Palu	Kubota/1979	10 Ton	Rusak
2.	Poso	Poso	Kubota/2008	10 Ton	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengantisipasi pergerakan barang dan manusia dikembangkan jaringan moda transportasi angkutan penyeberangan melalui program angkutan sungai, danau, dan perairan (ASDP) seperti tabel berikut.

Tabel 2.69
Jaringan Penyeberangan Lintas Provinsi Di Sulawesi Tengah

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Lintas Penyeberangan
1.	Pagimana	Banggai	Pagimana-Gorontalo (Prov. Sulteng-Gorontalo)
2.	Luwuk	Banggai	Luwuk-Salakan
3.	Taipa	Palu	Taipa-Balikpapan
4.	Ampana	Tojo Unauna	(Prov. Sulteng - Kaltim) Ampana-Wakai-Gorontalo
5.	Tolitoli	Tolitoli	(Prov. Sulteng-Gorontalo) Tolitoli-Tarakan
6.	Banggai	Banggai Kepulauan	(Prov. Sulteng - Kaltim)
7.	Toboli	Parigi Moutong	Banggai-Luwuk-Banggai-Boniton-Banggai-Bobong Dolong-Uwebone-Marissa- Parigi-Marissa-Dolong (Prov. Sulteng-Gorontalo)

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng

b. Perkembangan Perhubungan Laut

Bidang perhubungan laut, perkembangan pelayanan transportasi laut yang mencakup penyediaan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran dan pengembangan armada pelayaran nasional baik pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran khusus dan pelayaran samudra, secara kontinu ditingkatkan. Dalam

rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran pelayaran angkutan laut di Provinsi Sulawesi Tengah telah tersedia 1 (satu) pelabuhan utama (internasional) yakni Pelabuhan Pantoloan, 14 (empat belas) pelabuhan pengumpul (nasional), yakni Luwuk, Pagimana, Bunta, Tangkiang, Banggai, Kolonodale, Leok, Tolitoli, Donggala, Wani, Ogoamas, Parigi, Poso, Ampana; dan 12 (dua belas) pelabuhan pengumpan (regional), yakni Sabang, Ogotua, Kumaligon, Paleleh, Wakai, Salakan, Menui, Sambalagi, Malala, Bungku, Dolong/Popolii, Moutong; serta 14 (empat belas) pelabuhan terminal khusus (tarsus).

Tabel 2.70
Sarana Pelabuhan Laut Utama/Nasional di Sulawesi Tengah

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/ Kota	Kapasitas Dermaga	Luas Dermaga
1.	**Pelabuhan Utama (international)** Pantoloan	Palu	4.000 DWT	250 m x 13 m
	Pelabuhan			
1	**Pengumpul**	Banggai	1.000 DWT	
2	**(nasional)**	Banggai	1.000 DWT	150mx12m
3	Luwuk	Banggai	1.000 DWT	70 mx8 m
4	Pagimana	Banggai	1.000 DWT	70 m x8 m
5	Bunta	Banggai	10.000	88mx12m
6	Tangkiang	Kepulauan	DWT	150mx8m
7	Banggai	Morowali		
8	Kolonodale	Buol	1.000 DWT	50mx8m
9	Leok	Tolitoli	1.000 DWT	81 mx8 m
10	Tolitoli	Donggala	1.000 DWT	70 mx8 m
11	Donggala	Donggala	500 DWT	46mx8m
12	Wani	Donggala	1.000 DWT	70mx8m
13	Ogoamas	Parigi Moutong	400 DWT	35 m x 8 m
14	Parigi	Poso	1.000 DWT	100mx 9m
	Poso	Tojo Una-Una	1.000 DWT	70mx 8m
	Ampana			

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng dan RTRWP Sulteng Tahun 2013-2033

a. Perkembangan Perhubungan Udara

Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu dengan status Bandar Udara pengumpul sekunder sebagaipintu gerbang utama melalui udara semakin dituntut dalam peningkatan aktifitas pelayanan penerbangan guna mengantisipasi kesiapan daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan era globalisasi. Pemerintah daerah saat ini telah menyiapkan pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu agar dapat didarati pesawat yang berbadan besar, tidak terbatas hanya mampu melayani pesawat jenis Boeing 737-900 ER dan Boeing 737-800 NG. Selain itu, di beberapa kabupaten terdapat pula Bandar Udarapengumpul tersieryakni Bandar Udara Bubung Syukuran Aminudin Amir di Kabupaten Banggai yang dapat melayani jenis pesawat Boeing 737/200, Cassa 212, ATR 500/600, Dornier 32, Bandar Udara Lalos Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli. Untuk melayani penerbangan pengumpan Bandar Udara Pogogul di Kabupaten Buol yang baru mampu didarati jenis pesawat Cassa 212 dan Dornier 32 serta Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso yang sudah mampu didarati oleh jenis pesawat N 219 dan ATR 500/600. Selain itu di Sulawesi Tengah sedang dilakukan pembangunan 2 (dua) Bandar Udara yaitu Bandar Udara Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una , Sedangkan Bandar Udara Bungku di Kabupaten Morowali saat ini terkendala dengan penyelesaian lahan untuk pembangunannya. Sehingga fasilitas transportasi udara yang ada di Sulawesi Tengah hingga Tahun 2013 berjumlah 7 (tujuh) bandar udara, selain itu juga diupayakan studi kelayakan untuk perencanaan pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Banggai Laut.

Tabel 2.71
Sarana Bandar Udara Menurut Jenisnya Di Sulawesi Tengah

No.	Nama Bandara	Nama Kabupaten/ Kota	Dimensi Landasan Pacu	Maksimal Pesawat
	Pengumpul Sekunder			
1.	Mutiara Sis Aljufri	Palu	2.250 m x 45 m	B – 737
	Pengumpul Tersier			
1.	Bubung Syukuran	Banggai	1.850 m x 30 m	B – 737.200
2.	Aminuddin Amir	Tolitoli	1.400 m x 30 m	C - 212
	Lalos Sultan Bantilan			
	Pengumpan			
1.	Pogogul	Buol	1.373 m x 30 m	C – 212
2.	Kasiguncu	Poso	1.620 m x 30 m	D - 900
	Sedang dibangun			
1.	Ampana	Tojo Unauna		
2.	Umbele	Morowali		
	Missioner			
1.	Gintu (operasional)	Poso		Cesna
2.	Tentena (operasional)	Poso		Cesna
	Bandara yang direncanakan			
1.	Banggai	Banggai Laut		

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng dan RTRWP Sulteng Tahun 2013-2033.

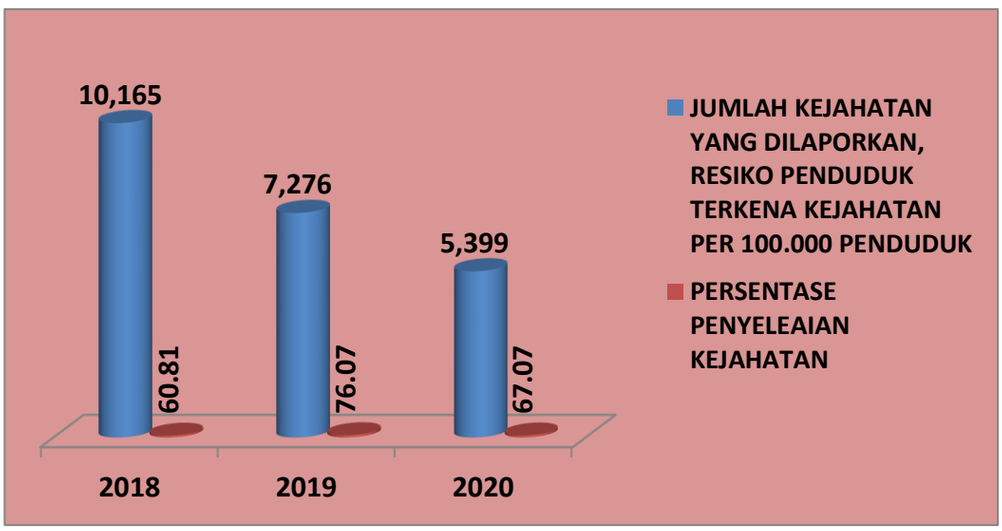
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ke depan memerlukan dukungan investasi khususnya dari kalangan sektor swasta dengan mengisyaratkan stabilitas politik, keamanan dan iklim investasi yang kondusif dan menjanjikan.

Oleh karena itu pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat investor untuk menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah. Oleh karenanya pemerintah memfokuskan perhatian pada penanganan keamanan dan ketertiban terutama masalah yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat yakni tawuran antar kampung.

Jumlah kejahatan yang dilaporkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah 10.165 kasus pada tahun 2018 menjadi 5.399 kasus pada tahun 2020, sementara persentase penyelesaiannya dari tahun 2018 sebesar 60,81 persen meningkat menjadi 76,07 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali menurun manjadi 67,07 persen, dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS, 2021.

Gambar 2.32
Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Kejahatan, Tahun 2018-2020

Sementara jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 1.768 kasus yang masih tersisa sejumlah 322 kasus dari jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan Sulawesi Tengah sejumlah 2.090 kasus, ditunjukkan pada gambar berikut :

Tabel 2.72
Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum yang Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah, Tahun 2020

URAIAN	TAHUN 2020			
	SISA LAPORAN TAHUN LALU	MASUK TAHUN LAPORAN	DISELESAIKAN	SISA AKHIR TAHUN
KEJAKSAAN TINGGI	16	183	197	2
KEJAKSAAN NEGERI 9 KABUPATEN DAN 1 KOTA	293	1.598	1.571	320
JUMLAH	**309**	**1781**	**1768**	**322**

Sumber: BPS, 2021.

Sedangkan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 36 kasus yang masih tersisa sejumlah 45 kasus dari jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan Sulawesi Tengah sejumlah 81 kasus, ditunjukkan pada gambar berikut :

Tabel 2.73
Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah, Tahun 2020

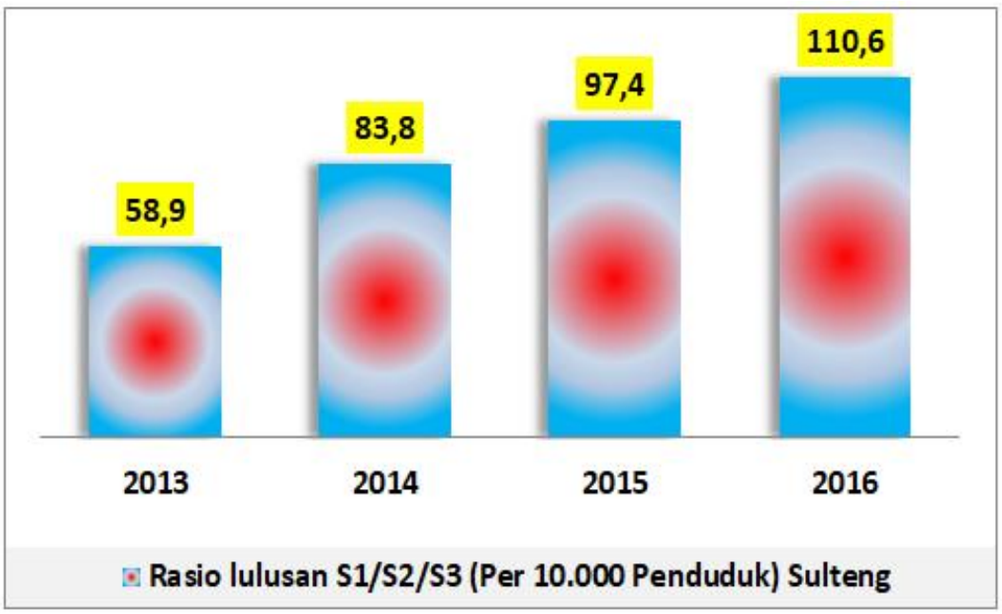
URAIAN	TAHUN 2020				
	SISA LAPORAN TAHUN LALU	MASUK TAHUN LAPORAN	JUMLAH	DISELESAIKAN	SISA AKHIR TAHUN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	12	5	17	5	12
KEJAKSAAN NEGERI 9 KABUPATEN DAN 1 KOTA	31	33	64	31	33
JUMLAH	**43**	**38**	**81**	**36**	**45**

Sumber: BPS, 2021.

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Perkembangan rasio kelulusan untuk pendidikan (S1/S2/S3) per jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2013 rasionya sebesar 59,9 per 10.000 penduduk meningkat menjadi 83,8 per 10.000 penduduk pada Tahun 2014, selanjutnya setiap tahun rasionya mengalami peningkatan hingga mencapai 110,6 per 10.000 penduduk.



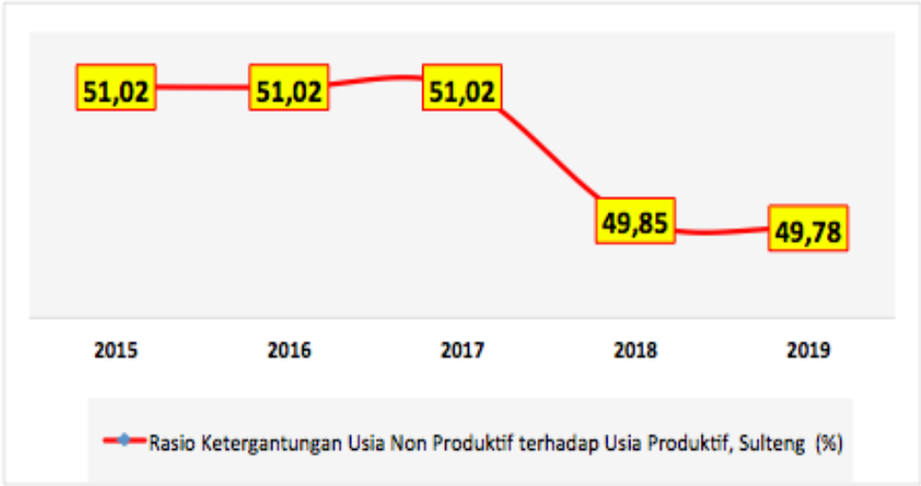
Sumber: BPS, Tahun 2017 (Data Diolah Kembali)

Gambar 2.33
Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2016

2.1.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif salah satunya dapat dilihat dari indikator *dependency ratio* atau rasio ketergantungan. Persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung mengalami penurunan (semakin rendah) yakni dari 51,02 persen pada Tahun 2015 menjadi 49,78 persen pada Tahun 2019.



Sumber: BPS, 2020 (Data Diolah Kembali)

Gambar 2.34
Trend Rasio Ketergantungan Penduduk Usia non produktif
Terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015 – 2019

2.1.4.4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsepyanglebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi pengeluaran riil perkapita; aspek pendidikan meliputi angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek kesehatan meliputi angka harapan hidup.

Pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah secara kontinu mengalami perbaikan yang cukup nyata, yang ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2021 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 69,79 poin lebih tinggi jika dibandingkan pada Tahun 2020 sebesar 69,55 poin dan telah melebihi target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 68,50-68,76 poin dan target RKPD Perubahan Tahun 2021 sebesar 69,70 poin.

Sementara IPM yang dicapai Indonesia sebesar 72,29 poin, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber: BPS, Tahun 2022.

Gambar 2.35
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2021

Perspektif pencapaian IPM kabupaten/kota Tahun 2021, capaian IPM tertinggi masih berada di Kota Palu dengan nilai IPM sebesar 81,70 poin, disusul Kabupaten Morowali sebesar 72,29 poin, sedangkan nilai IPM terendah di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 64,74 poin, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	2
Banggai Kepulauan	65,61
Banggai	70,60
Morowali	72,29
Poso	71,45
Donggala	65,72
Tolitoli	66,30
Buol	68,25
Parigi Moutong	65,82
Tojo Una-Una	64,74
Sigi	68,49
Banggai Laut	65,65
Morowali Utara	68,48
Palu	81,70
Sulawesi Tengah	**69,79**

Sumber: BPS, Tahun 2022